

Jurnal Sosial Demokrasi



Belajar dari
Sosialisme Baru Amerika Latin:
INDONESIA BARU
Mengapa Tidak!

ISSN 1978-9084



9 77 978 908490



Kebebasan
Tidak sama dengan
Kebablasan

Berekspresi



Iklan Layanan ini dipersembahkan oleh
Yayasan Indonesia Kita
&
Pergerakan Indonesia

Jurnal Sosial Demokrasi

Daftar Isi

Editorial

Jalan "Sosialisme Baru" Amerika Latin:
Sebuah Era Baru [4]

Laporan Utama

Transkrip Diskusi Jalan "Sosialisme Baru" Amerika Latin:
Sebuah Era Baru [9]

Laporan Utama

Jalan "Sosialisme Baru" Amerika Latin: Mungkin untuk
Indonesia? [32]

Artikel

Nur Imam Subono: Di balik Kemenangan Evo Morales dan
MAS di Bolivia [37]

Artikel

Nur Imam Subono: Keterkaitan Gerakan Penduduk Asli
(Indigenous Movements) dan Kekuatan "Kiri" (Left) di
Amerika Latin [43]

Artikel

Ivan A Hadar: BELAJAR DARI ARGENTINA [48]

Profil

Sritua Arief: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN DEPENDENSI DI
INDONESIA [51]

Serial Sejarah Sosdem

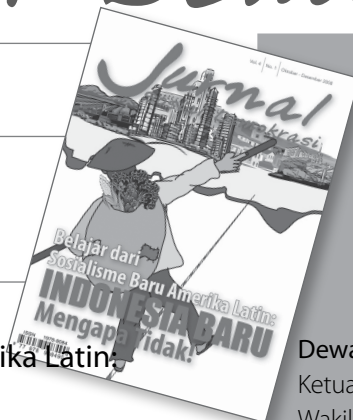
PLURALITAS KELOMPOK KIRI AMERIKA LATIN [54]

Serial Sejarah Sosdem

SEJARAH SOSDEM [56]

Resensi

Kebebasan, Negara, dan Pembangunan di Mata Arief
Budiman [61]



Dewan Redaksi

Ketua : Amir Effendi Siregar
Wakil Ketua : Ivan Hadar
Anggota : Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito

Pelaksana Redaksi

Koordinator : Azman Fajar
Redaksi : Puji Riyanto
Launa

Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358

Jl. Mampang Prapatan XIX No.34
Mampang - Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021 - 798 4559

Ilustrasi*

Kuss Indarto
Danan Arditya
Friedrich-Ebert-Stiftung

Penerbit

Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita

ISSN: 1978-9084

*) Dilarang mengcopy dan memperbanyak
ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung



Jalan "Sosialisme Baru" Amerika Latin: Sebuah Era Baru

The Latin America's "New Socialism" Way: A New Era

"Bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus berikan kekuasaan, pengetahuan, tanah, kredit, teknologi, dan organisasi pada si miskin"

Hugo Chavez, 2005

"When we are about to eliminate poverty, we must give power, knowledge, land, credit, technology, and organization to the poor"

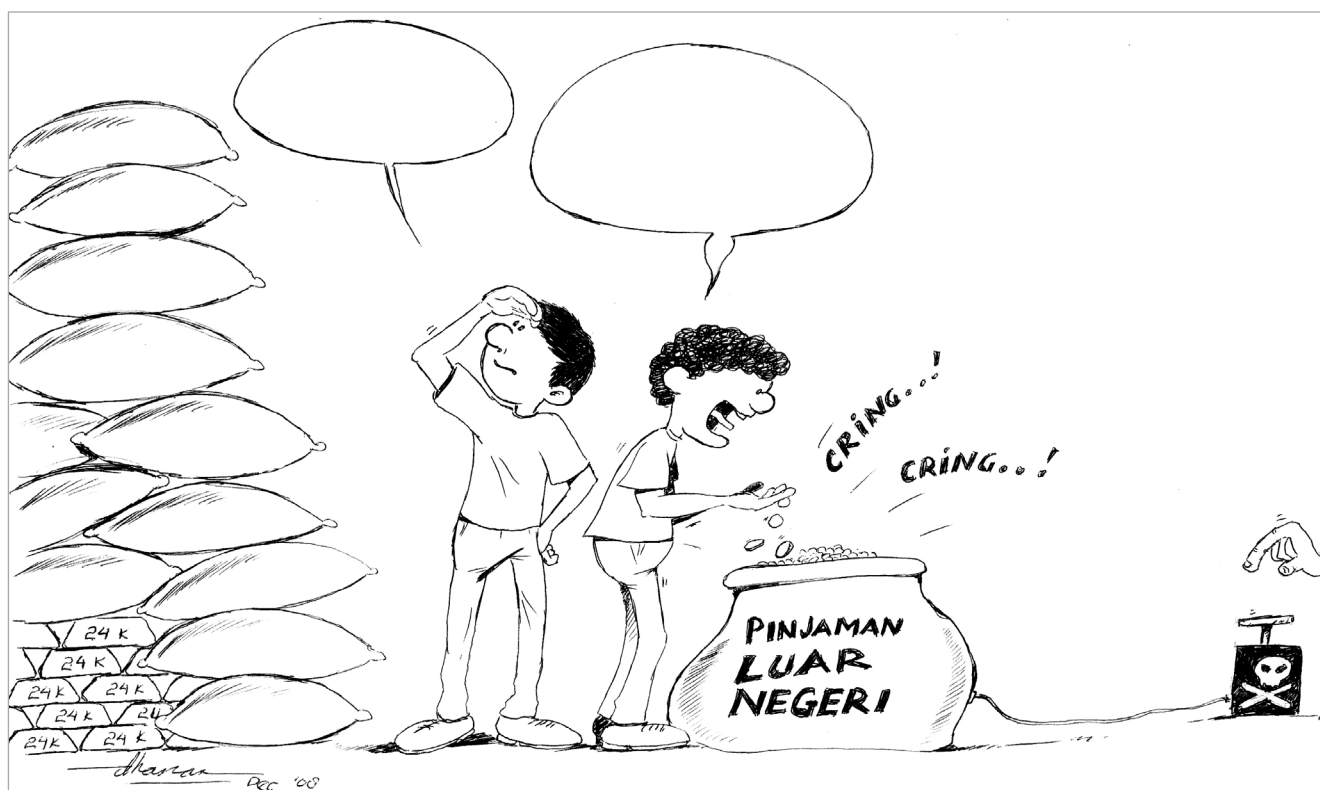
Hugo Chavez, 2005

Another Latin America is Possible. Itulah kira-kira slogan yang mengemuka ketika masyarakat dunia menyaksikan dinamika politik dan perubahan sosial berlangsung intens di negara-negara kawasan Amerika Latin. Bangkitnya kekuatan rakyat dan tampilnya para pemimpin berhaluan "kiri" dan "kiri-tengah" di kawasan ini, kerap disebut para pengamat sebagai jalan "sosialisme baru" Amerika Latin. Sejak berkobarnya revolusi demokratik di Amerika Latin yang diinisiasi oleh rakyat Venezuela pada dekade 1990-an, ide sosialisme mulai bangkit dari tidurnya. "Sosialisme Abad ke 21", sebuah frase yang dipopulerkan oleh Presiden Venezuela, Hugo Chavez, adalah slogan baru untuk menandai tampilnya era sosialisme baru Amerika Latin.

Ted Sprague (2008), memaknai sosialisme abad ke 21 yang dipopulerkan oleh Chavez tersebut sebagai versi baru sosialisme yang telah terbebas dari distorsi Stalinisme. Perspektif lain menyebutkan, sosialisme abad ke 21 yang tampil di kawasan Amerika Latin adalah sosialisme demokratik, karena perjuangan untuk mencapai panggung politik kekuasaan negara dilakukan melalui arena politik elektoral, bukan melalui sebuah revolusi proletariat seperti dianjurkan Marx. Selanjutnya, ada juga sebagian pengamat yang mengatakan bahwa sosialisme abad ke 21 ala Amerika Latin adalah gerakan sosialisme

Another Latin America is Possible. It is the prominent saying when the world witnessed the political dynamics and social change that are intensively taking place in Latin American states. The rise of people power and "left" or "center-left" in this region is often referred to as Latin America's "New Socialism" way. Since the democratic revolution in Latin America was initiated by Venezuelan people in the 1990s, the idea of socialism awakens from its long sleep. "Socialism of the 21st Century", a popular phrase by the President of Venezuela, Hugo Chavez, is a new slogan to mark the beginning of Latin American new socialism.

Ted Sprague (2008) perceived the 21st century socialism, introduced by Chavez as the new version of socialism, free from Stalinism distortion. Other perspective claims that the 21st century socialism in Latin America is a democratic socialism, for the struggle to win power politics is continued in the arena of electoral politics, instead of through Marx' suggested proletariat revolution. Additionally, some experts argued that the 21st century socialism of Latin America is a genuine socialism, characterized by the traditions of native Latin American, instead of socialism practices imported from Europe, and therefore is free



genuin, yang bercirikan tradisi penduduk asli Amerika Latin, bukan praktik sosialisme yang diimpor dari Eropa, dan karenanya bebas dari kecongkakan ras kulit putih.

Terpilihnya beberapa politisi dan aktivis politik "kiri" di berbagai negara di kawasan Amerika Latin yang mempromosikan agenda anti-neoliberalisme sebagai presiden merupakan bukti nyata kebangkitan sosialisme Amerika Latin. Mayoritas politisi dan aktivis politik di wilayah ini memenangkan suara dalam mekanisme politik elektoral; dengan perolehan suara rata-rata di atas 40 persen. Mereka yang naik ke panggung kekuasaan politik negara, antara lain adalah Presiden Venezuela, Hugo Chaves (1998); Presiden Brazil, Luis Ignacio "Lula" da Silva (2001); Presiden Argentina Nestor Kirchner (2003, yang beberapa waktu lalu digantikan isterinya, Christina Fernandez); Presiden Uruguay Tabarez Vasquez (2005); Evo Morales, petani koka miskin yang terpilih sebagai Presiden Bolivia (2006); Michelle Bachelet, aktivis Partai Sosialis, menjadi Presiden Chili (2006); tokoh revolusioner lama Nikaragua, Daniel Ortega, yang kembali ke panggung kekuasaan negara sebagai Presiden Nikaragua (2006); Rafael Correa, ekonom dan doktor ekonomi lulusan Amerika Serikat, yang terpilih sebagai Presiden Ekuador (2007); dan Fernando Lugo, Presiden Paraguay (2008).

Dan sudah pasti, dalam gerbong tersebut, ada tokoh "kiri" yang menjadi kuncen Amerika Latin, presiden Kuba, Fidel Castro. Pemimpin revolusioner Kuba yang lebih dari 30 tahun menghadapi berbagai "serangan" AS terhadap diri dan pemerintahannya ini, kini secara resmi telah digantikan adiknya, Raul Castro. Gelombang sosialisme Amerika Latin memang belum sepenuhnya mampu menarik seluruh negara di kawasan itu masuk dalam barisan anti-neoliberalisme yang

from the Caucasian arrogance.

The election of some left politicians and political activists to become president in some Latin American states that promote the agenda of neo-liberalism has brought the evidence to the rise of Latin America's socialism. The majority politicians and political activists in this region won their votes through the electoral mechanism; with more than 40 percent votes. Those who rose to the top of political power are President of Venezuela, Hugo Chaves (1998); President of Brazil, Luis Ignacio "Lula" da Silva (2001); President of Argentina Nestor Kirchner (2003, who just recently was replaced by the wife, Christina Fernandez); President of Uruguay Tabarez Vasquez (2005); Evo Morales, the poor coca farmer who was elected the President of Bolivia (2006); Michelle Bachelet, the activist of Socialist Party who was elected the President of Chili (2006); the old-time revolutionary figure in Nicaragua, Daniel Ortega, who returned to power as the President of Nicaragua (2006); Rafael Correa, an economists and US-graduate Doctor of economy who was chosen as the President of Equator (2007); and Fernando Lugo, the President of Paraguay (2008).

Certainly on the list, there is the President of Cuba, Fidel Castro, a left figure who has been safeguarding Latin America. The revolutionary leader of Cuba, who confronted the US resentment on him and his administration for more than 30 years, has currently been succeeded by his brother, Raul Castro. The wave of Latin America's socialism is not entirely able to persuade all states in the region in joining the force against US-sponsored neoliberalism. Lopez Obrador (Mexico) and Ollanta

disponsori AS. Lopez Obrador (Meksiko) dan Ollanta Humala (Peru) adalah dua tokoh sosialis di kawasan itu yang gagal menjadi presiden dalam pemilu lalu. Sementara itu, Kolombia, Kosta Rika, atau negara-negara di kawasan Amerika Tengah pada umumnya, hingga kini terlihat masih menampilkan wajah pemimpin yang pro-Barat.

Para pemimpin Amerika Latin berhaluan “kiri” yang terpilih melalui pemilu demokratis di masing-masing negaranya, kini terus berjuang memperkuat bangunan blok oposisi terhadap Washington yang mempromosikan kebijakan “pasar bebas”. Melawan “Konsensus Washington” merupakan penggerak utama gelombang sosialisme Amerika Latin. Konsensus Washington—yang berisi kebijakan pengetatan anggaran publik, liberalisasi keuangan dan perdagangan, mendorong investasi langsung asing, privatisasi BUMN, reformasi pajak, disiplin fiskal, pengendalian defisit anggaran, dan seterusnya—dianggap sebagai biang keladi dari kian terperosoknya kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara di kawasan ini dalam kubangan kemiskinan, pengangguran, dan tumpukan utang luar negeri.

Bisa dibilang, proyek sosialisme abad ke 21 yang hadir menggelegar di kawasan negara-negara Amerika Latin merupakan simbol nyata penolakan terhadap praktik kapitalisme global dan proyek neoliberalisme yang menyertainya. Ia merupakan pembuktian gagalnya tesis Francis Fukuyama dalam *“The End of Ideology”* yang mengklaim bahwa kemenangan kapitalisme adalah akhir dari babak sejarah umat manusia. Perlawanan terhadap neoliberalisme di kawasan Amerika Latin bukan tanpa sebab. Akar sejarah ekonomi-politik negara-negara pascakolonial, termasuk di kawasan Amerika Latin, sesungguhnya tak jauh beda dari kondisi ekonomi-politik negara-negara di kawasan Asia-Afrika dalam hal posisi ketergantungan terhadap penetrasi kekuatan kapitalisme global.

Tahun 1989, ketika Venezuela berada di bawah kepemimpinan Carlos Andres Perez, program ekonomi neoliberal menjadi basis utama kebijakan pemerintahannya. Program-program seperti pencabutan subsidi publik, liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, dan deregulasi, mulai dijalankan. Tak ayal, program neoliberal Perez pun menuai dampak krisis sosial-ekonomi baru. Gross Domestic Product (GDP) Venezuela mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen, dan kemiskinan meningkat 66,5 persen dari tahun sebelumnya. Gejolak sosial pun tak terhindarkan. Kondisi ini menjadi stimulus bangkitnya perlawanan rakyat Venezuela.

Ketika Meksiko dinyatakan default (dimana negeri itu tidak sanggup lagi membayar utangnya kepada IMF yang jatuh tempo) pada tahun 1982, maka dimulailah babak ekonomi baru Amerika Latin dengan sejuta ilusi penyelesaian yang ditawarkan oleh IMF untuk memaksakan reformasi ekonomi Meksiko melalui resep-resep ekonomi neoliberal, yang ironisnya, kian membuat sulit kehidupan rakyat dan ekonomi negeri itu.

Sementara itu, di Ekuador, presiden Rafael Correa lebih memilih membela rakyatnya yang miskin ketimbang memihak kaum plutokrat Ekuador dan koneksi Washington-nya. Para menteri diajak berkeliling ke berbagai pelosok negeri agar melek atas penderitaan rakyatnya untuk kemudian menyalurkan 1,3 juta dollar AS untuk rakyat Ekuador

Humala (Peru) are the socialist figures in the region that lost the presidency in the last election. Whereby, Colombia, Costa Rica, and most states in Central America, until now are still presenting the pro- Western leadership.

The ‘left-oriented’ leaders in Latin America, who were democratically elected, are now struggling for strengthening the opposition block against Washington that promotes the free-market policy. The fight against Washington Consensus is the main drive behind the wave of Latin America’s socialism. The Washington Consensus that consists of policies such as the public budget restriction, monetary and trade liberalization, foreign direct investment, the privatization of state-owned corporations; tax reform, fiscal disciplinary, budget deficit control; is regarded as the sole cause of the depleting economic and social conditions of the states in the region into poverty, unemployment, and high foreign debt.

It can be said that the groundbreaking project of 21st century socialism in Latin America is the authentic rejection symbol against the global capitalism and neoliberalism project it entails. It also proves the failure of Francis Fukuyama’s thesis in “The End of Ideology” claiming that the victory of capitalism marks the end of mankind’s history. Nevertheless, the fight against neoliberalism in Latin America is not without a cause. The historical roots of the political economy in post-colonial states; including those in Latin America, did not differ much from the Asia-African states in terms of dependency over the global capitalism penetration.

When Venezuela was under the administration of Carlos Andres Perez in 1989, the neoliberal economic program became the foundation of the state policies, such as eliminating public subsidies, economic liberalization, the privatization of state-owned corporations, and deregulation. Consequently, under Perez’s neoliberal policies the new socio-economical crisis became inevitable. Venezuela’s Gross Domestic Product (GDP) experienced contraction at 8.6 percent, poverty level increased to 66.5 percent compared with the year before, and social tension heated. Such conditions led to the rise of people power in Venezuela.

When Mexico was confirmed as default (a situation when the country was no longer able to pay its loan to IMF in due time) in 1982, it set up the new economic chapter of Latin America consisted of IMF’s various exit strategies to the crises that enforced the economic reform in Mexico through neoliberal prescription, which ironically increased the people’s hardship there.

Meanwhile, President Rafael Correa in Ecuador stood to defend his poor people instead of favoring the plutocrats of Ecuador and their Washington connections. He took the ministers around the country to witness the daily hardship of the people, and provided 100 million US dollars for housing subsidies for the poor, increasing the spending for education and health (The Economist, April 2007).

yang termiskin; menyediakan 100 juta dollar AS untuk subsidi perumahan bagi kaum miskin dan meningkatkan belanja untuk pendidikan dan kesehatan (The Economist, edisi April 2007).

Singkatnya, masa-masa kediktatoran militer dan hegemoni ekonomi kaum plutokrat yang bercokol ratusan tahun di negeri-negeri Amerika Latin telah melahirkan kesenjangan sosial yang begitu ekstem. Laporan Bank Dunia 2005 menyebutkan rata-rata angka kesenjangan antara lima penduduk terkaya dengan penduduk termiskin di seluruh Amerika Latin mencapai angka 30 berbanding 1. Di Bolivia, angka ini bahkan mencapai 90 berbanding 1, dan khusus di wilayah pedesaan yang banyak dihuni suku Indian, angkanya berkisar 170 berbanding 1 (Budiman Sudjatmiko, Kompas, 13/11/07).

Setidaknya, ada dua kata kunci yang bisa mendukung bangkitnya gelombang sosialisme dan tampilnya kebijakan populis serta pemerintahan pro-rakyat di kawasan ini. Pertama, strategi penguasaan negara melalui pemilu (panggung politik elektoral) oleh para aktivis dan politisi di wilayah itu selalu diawali dan diikuti oleh strategi pengorganisasian serta mobilisasi rakyat. Kedua, solidaritas regional yang kuat di antara pemerintahan sosialis di Amerika Latin. Sebagian keberhasilan pemulihan Argentina dari krisis ekonomi adalah juga berkat solidaritas regional dari Venezuela yang telah memberi dukungan dana melalui program "minyak untuk kemanusiaan". Venezuela di bawah Hugo Chavez misalnya, saat ini tengah mempromosikan Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin (ALBA). Wadah kerjasama regional ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarnegara di kawasan Amerika Latin. Berbeda dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika (FTAA) yang dimotori AS, ALBA memprioritaskan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan sosial, perlindungan hak-hak asasi kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, kelompok perempuan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia yang saat ini juga tengah memasuki transisi demokrasi, namun pemerintahan hasil reformasi yang sudah empat kali berganti tetap gagal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di negeri ini. Menurut Olle Tornquist (2008), kebanyakan *elite* di negeri-negeri Asia, juga Afrika, gagal membenahi kultur patrimonialisme, patronase, dan klientelisme yang telah berakar kuat dalam budaya politik masyarakatnya. Kegagalan itu pada akhirnya berdampak pada hilangnya kemampuan institusi-institusi demokratis dalam mendukung kinerja demokrasi itu sendiri. Selain itu, relasi antara negara dan masyarakat juga masih berjalan pincang, hubungan institusi politik dan pemilihan yang terbangun juga tidak berkualitas, yang kesemuanya itu akhirnya mereproduksi bangkitnya budaya "*boss-isme*" yang saat ini tengah menggejala luas di Indonesia dan Filipina.

Studi Demos (Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia, 2005) juga menunjukkan, proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia hingga kini masih dibaluti berbagai krisis. Fakta-fakta model pembangunan demokrasi dari atas melalui pembentukan institusi-institusi demokratis telah gagal dalam mewujudkan terbangunnya partisipasi rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Studi ini menunjukkan, secara keseluruhan kualitas

In summary, the period of military dictatorship and the plutocrat's economic hegemony since hundreds of years in Latin America has created an extreme social gap. The World Bank report in 2005 gave details that the average level of disparity among 5 wealthiest persons and the poorest in Latin America were 30 to 1. In Bolivia, the number reached as high as 90 to 1, and particularly in the rural areas inhabited mostly by the native American Indians, it went up to 170 to 1 (Budiman Sudjatmiko, Kompas, 13/11/07).

There are at least two keywords which can sustain the rise of socialism wave, the populist policies, and pro-people governments in the region. First, the activists and politicians' strategy to secure the state's power through election or electoral means is always been initiated by and followed with organizing strategy and mass-mobilization. Second, there is a strong regional solidarity among the Latin American socialist governments. The success of Argentina's recovery from economic crisis was partly due to the regional solidarity initiated by Bolivia that provided financial support through the 'oil for aid' program. Under Hugo Chavez, Venezuela is currently promoting the Bolivarian Alternative for the People of Our America [Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América or ALBA]. The regional cooperation forum aims for narrowing the disparity among Latin American countries. Unlike the Free Trade Agreement of the Americas (FTAA) led by the US, ALBA prioritizes poverty and social disparity eradication, the basic rights protection of the workers, farmers, urban poor, and women, as well as environmental conservation.

What about Indonesia? Until today it has been in the democratic transitions, with four administrations in the period of reform who still failed to deliver social welfare and economic justice in this country. According to Olle Tornquist (2008), most elite in Asian and African states failed to deal with the culture of patrimonialism and patron-client which have deeply rooted in the political culture of its people. This failure will result in the diminishing capacity of democratic institutions in maintaining the performance of democracy. In addition to that, the state-society interaction is still uneven, the relations of political institutions and established election is lacking of quality. These situations eventually reproduced the culture of "boss-ism", which is widely characterizing Indonesia and the Philippines.

The study of Demos (Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia, 2005) also shows that the ongoing process of democracy in Indonesia is held back by many crisis. The fact shows that top-down model of democracy development through the establishment of democratic institutions has failed to build people's political participation in the real sense. This study also shows that the overall quality of Indonesia's democracy is degrading, as the democratic institutions were 'hijacked' by the elite (in both central and local level) for the elitist and parochial objectives and interests.

demokrasi Indonesia mengalami degradasi, karena institusi-institusi demokrasi telah dibajak para *elite* (baik di tingkat pusat maupun lokal) demi tujuan dan kepentingan yang elitis dan parokial.

Kondisi seperti inilah yang disebut George Sorensen sebagai jebakan "demokrasi beku" (*frozen democracy*). Dengan kata lain, demokrasi Indonesia hari ini sesungguhnya masih tersandera dalam kubangan demokrasi prosedural yang gagal menghadirkan demokrasi substansial: demokrasi yang berkhidmat pada rakyat; demokrasi yang berkeadilan, yang mampu memberi kepastian pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan hidup pada rakyat. Demokrasi beku digambarkan sebagai demokrasi yang sedang tumbuh bersemi, namun berubah layu karena berbagai paradoks yang mengidap dalam dirinya. Empat paradoks yang mendasari hadirnya demokrasi beku adalah kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, mandeknya pembentukan masyarakat sipil, konsolidasi sosial politik yang gagal, dan penyelesaian masalah politik yang tak kunjung tuntas.

Mengutip Nur Iman Subono, apa artinya gelombang kiri yang kini tengah menguat di neger-negeri Latin Amerika, di tengah fakta ambruknya komunisme dan kemenangan kapitalisme; bersama kembarannya, demokrasi liberal? Mengapa pemerintahan di kawasan Amerika Latin bergerak ke "kiri" (sosialisme baru) di tengah gempuran gelombang neoliberalisme yang dimotori AS dan agen-agen lembaga keuangan internasional (World Bank dan IMF)? Apakah jalan sosialisme Amerika Latin bersifat homogen atau heterogen? Apakah "sosialisme baru" Amerika Latin memiliki kesamaan atau berbeda dengan "sosialisme lama"? Siapa yang menjadi aktor-aktor sosial dan politik di balik keberhasilan gelombang sosialisme Amerika Latin? Bagaimana dengan kita di Indonesia (melihat ide-ide dasar konstitusi kita yang juga sarat dengan gagasan-gagasan sosialisme) bisa belajar dari kecenderungan sosialisme baru yang berlangsung di Amerika Latin itu? Adakah potensi yang kita miliki di dalam negeri (baik secara sosial, politik, dan ekonomi) serta peluang internasional yang bisa mendorong kita untuk mendiskusikan secara lebih intens kemungkinan jalan sosialisme baru Indonesia?

Dalam konteks pemikiran di atas, Jurnal Demokrasi Sosial edisi ke-4 ini mencoba mengangkat "Jalan Baru Sosialisme Amerika Latin" sebagai tema bahasan. Redaksi berharap berbagai tulisan tentang sosialisme baru Amerika Latin yang kami rangkum dalam edisi ini bisa menjadi pengantar bagi kita dalam mendiskusikan, merefleksikan, dan menginspirasi kemungkinan dan pilihan-pilihan kita dalam merajut tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita, yakni mewujudkan cita-cita luhur the founding fathers yang tertuang secara tegas dalam landasan ideologi dan konstitusi negara kita: menuju peri kehidupan rakyat dan negara yang sejahtera, adil, berdaulat, dan demokratis.

Mudah-mudahan, berbagai ide, gagasan, dan perspektif pemikiran yang disajikan tim redaksi dalam Jurnal Demokrasi Sosial Edisi ke-4 ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca!

■ Launa dan M. Azman Fajar, Redaktur Jurnal Sosial Demokrasi

It is what George Sorensen identified as the trap of frozen democracy. In other words, the democracy in Indonesia today is still captured in procedural democracy that fails to deliver substantial democracy: democracy that respects the people, democracy with equality that is able to make education, employment, health care, and decent living for the people certain. Frozen democracy is best described as blossoming democracy which turns wilted because of too many paradoxes in it. Four paradoxes that lay basis to the frozen democracy are the break down of economic condition, stalled civil society formation, failure of socio-political consolidation, and unfinished political settlement.

Referring to Nur Iman Subono, what does the rising leftist wave in Latin America mean, amidst the fall of communism and the triumph of capitalism, together with its twin, liberal democracy? Why does the governments in Latin American region move in "left" direction (new socialism) in the intensive expansion of neoliberalism, led by the US and its agents; the international financial institutions (World Bank and IMF)? Is the socialism way of Latin America homogeneous or heterogeneous? Does the "new socialism" of Latin America inherit similarities from the "old socialism" or completely different from it? Who are the socio-political actors behind the success of the Latin America's socialism wave? How can we in Indonesia (judging from the basic principles in our constitution that are strongly characterized by socialism notions) learn from the tendency of new socialism in Latin America? Are there any Indonesian potential (social, political, economic) as well as international opportunities that can encourage an intensive discussion on the possibility of new socialism way of Indonesia?

Moving forward from the context as described above, the fourth edition of the Journal of Social Democracy attempts to bring the issue of Latin America's new socialism as the main topic. It is in the optimism of the editorial team that various articles presented in this edition will provide introduction and further bring us to discuss, reflect on, and inspire the opportunities and options in obtaining the sole objective of the country and its people, that is to achieve the ultimate goals of our founding fathers as stated in the state's ideology and constitution: towards the prosperous, equal, sovereign, and democratic state and people's living.

We are looking forward that the ideas, thoughts, and perspectives presented in this edition of the Journal of Social Democracy will provide foods for thought and bring fruitful impact. Have an enjoyable reading! ■ Launa and M. Azman Fajar, Editors, Journal of Social Democracy



Transkrip diskusi

Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin:

Sebuah Era Baru



Dalam beberapa waktu belakangan, dinamika dan perubahan politik di negara-negara Amerika Latin memiliki kecenderungan ke arah pendulum politik yang bergerak ke arah “Kiri” atau sering juga disebut sosialisme “baru”. Perubahan besar yang sedang terjadi di Amerika Latin ini sering dirujuk oleh sebagian pengamat atau praktisi sebagai Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin. Hugo Chavez menyebutnya sebagai jalan ke arah “Sosialisme Abad 21.” Kebangkitan sosialisme baru di

Amerika Latin ini, tentu saja, menarik bukan saja karena sejarah perlawanan intelektual yang panjang di kawasan tersebut, tetapi yang lebih penting adalah apakah kebangkitan sosialisme “baru” tersebut dapat menjadi inspirasi wilayah lain, terutama Indonesia. Oleh karena itulah, topik yang diangkat dalam jurnal edisi keempat ini adalah mengenai kebangkitan sosialisme “baru” di Amerika Latin. Diundang dalam diskusi tersebut diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko (Respublica/Repdem), Saiful Bahari (PPR), Said Iqbal (FSPMI), Fernando (FHUI), Ridwan Manoarfa (FSPMI), Partai Buruh, Papernas, Imam Yudotomo (CSDS), Boni Hargens (FISIP UI), dan seluruh redaksi Jurnal Sosdem. Selain itu, hadir beberapa mahasiswa yang menaruh minat terhadap kebangkitan sosialisme “baru” di Amerika Latin. Diskusi diawali dengan presentasi Nur Iman Subono (FISIP UI dan Demos) dan Budiman Sudjatmiko. Diskusi ini dipandu oleh Ivan Hadar, wakil pemred Jurnal SosDem.

Ivan A. Hadar

Terima kasih teman-teman. Malam ini, peserta diskusi tampaknya mencapai rekor, paling banyak dibandingkan dengan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, saya berharap substansi yang akan kita hasilkan dari diskusi malam ini akan menjadi sangat kaya. Berdasarkan bisik-bisik dan juga isu-isu yang berkembang sekarang ini, banyak kelompok forum sosial demokrasi, sosialis dan sebagainya, yang sekarang, menurut istilah Mas Budiman, menemukan momentum karena kapitalisme sedang menggelepar dan muncul neososialisme baru, istilah yang berkembang di Amerika Latin. Sementara itu, seperti biasa, Indonesia sebagai bangsa atau tepatnya sebagai negara yang seringkali responsif, sifatnya yang reaksioner seringkali terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di dunia luar yang membawa dampak bagi Indonesia. Mudah-mudahan malam ini, tempat ini bisa menjadi spirit revolusi.

Malam ini, kita akan mendiskusikan mengenai sosialisme “baru” Amerika Latin. Kata baru kita beri tanda petik karena definisinya masih menjadi perdebatan. Dalam hal ini, apakah sosialisme melakukan transformasi terkait dengan perkembangan kapitalisme itu sendiri dan mungkin saja berbeda dengan sosialisme ortizen? Nanti, kita akan mendiskusikan hal tersebut karena seringkali batasannya sangat cair. Namun, prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasarnya yang mungkin akan tetap atau Bahasa Jerman-nya “*ewish*” (tetap abadi).

Amerika Latin memang sangat menarik sejak dulu, yang barangkali disebabkan oleh sejarah ideologi, proses, perkembangan, diskusi, wacana dan sebagainya yang berkembang di kawasan tersebut. Fenomena tersebut mungkin dapat kita bandingkan dengan Indonesia pada masa Orde Lama dimana diskusi dan perdebatan mengenai berbagai hal tersebut sangatlah banyak.

Jika teman-teman membaca di *Term of Reference* (TOR), maka dapat kita temukan beberapa pertanyaan mendasar seperti mengapa Amerika Latin, khususnya Venezuela, Brazil, Bolivia, Chile, Uruguay dan seterusnya bergerak ke arah pemerintahan yang bisa disebut sebagai neososialisme atau sosialisme baru. Kalau sebelumnya sebagai hinterland Amerika Serikat sehingga pengaruh kapitalisme begitu kuat yang dilakukan dengan brutal dan didukung sepenuhnya oleh kekuatan militer dari Amerika Serikat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Salah satu penyebabnya mungkin adalah karena rakyat sudah bosan dengan kapitalisme yang dilakukan secara brutal sehingga menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan.

Pertanyaan lain yang layak diajukan dalam diskusi ini adalah apakah sosialisme baru di Amerika bersifat homogen ataukah heterogen, dalam pengertian ada nuansa-nuansa yang berkembang seiring kebangkitan sosialisme baru tersebut. Barangkali juga karena disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pemimpin di masing-masing negara, aktor-aktor dan pemikiran-pemikiran di belakangnya? Selanjutnya, secara kontekstual, bagaimana jika hal tersebut dibawa ke Indonesia mengingat bibitnya sudah bersemai di Indonesia? Terutama, jika dihadapkan pada pemilu 2009 yang akan datang. Jika kondisinya makin buruk, maka akan memunculkan sesuatu yang baru yang mungkin lebih radikal. Namun, tentu saja, korbannya akan sangat banyak, dan hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Malam ini, beberapa diantara yang hadir adalah teman-teman yang bergerak di level *grassroot*, kampus, ada juga yang sudah bosan menjadi aktivis, barangkali, kemudian masuk partai politik, dan lain sebagainya.

Saya kira pengantar yang saya berikan tidak perlu panjang lebar. Untuk pengantar diskusi, kita persilakan

Mas Boni (Nur Iman Subono) untuk menyampaikan paparannya bagaimana kebangkitan sosialisme baru di Amerika Latin terjadi?

Nur Iman Subono

Terima kasih. Salam Sosdem.

Sebetulnya, jurnal No. 4 ini agak terprovokasi oleh teman-teman Kompas yang menulis neososialisme. Saya sendiri tadi memilih menggunakan istilah jalan “Kiri”, tapi kalah suara sehingga akhirnya dipilih “sosialisme baru” dengan tanda petik. Tapi untuk mudahnya kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian dengan pemahaman yang kira-kira sama. Saya akan memberi pengantar saja, dan nanti saya berharap Budiman Sudjatmiko akan memberikan paparan yang lebih dalam terutama berkenaan dengan situasi yang tengah berlangsung sekarang ini mengingat ia baru saja dari Amerika Latin.

Wilayah Amerika Latin cukup luas. Sekarang ini, ada tiga orang yang menjadi icon gerakan sosialisme di Amerika Latin, yakni Castro, Chaves, dan Morales. Ketika Bill Clinton ikut menandatangani NAFTA, Hugo Chaves adalah orang pertama yang ikut menolak sehingga Fidel Castro yang selama ini musuh Amerika memberikan nota kecil, “Untuk pertama kali, ada juga yang menjadi setan selain saya”. Memang ini sesuatu yang luar biasa sehingga Amerika Serikat cukup kaget. Bayangkan saja, era tahun 1990-an ketika kerja sama regional tersebut ditandatangani, Bill Clinton sebagai presiden Amerika Serikat saat itu tidak pernah sekalipun datang ke Amerika Latin.

Sekarang ini, tidak kurang dari 10 negara melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme Amerika Serikat, dan menurut saya ini cukup mengejutkan karena sebelumnya George Bush mempromosikan demokrasi perwakilan liberal dan ekonomi pasar bebas di wilayah-wilayah tersebut. Tampaknya, George Bush lupa bahwa dalam demokrasi perwakilan terdapat prinsip

mayoritas. Orang Amerika Latin yang miskin semakin banyak. Orang-orang miskin inilah yang mendapatkan pendidikan politik dari orang-orang seperti Chaves, Morales, Lula, Rafael Correa, Daniel Ortega, dan yang terakhir Fernando Lugo. Jadi, benar-benar bumerang buat Amerika sendiri. Padahal, merekalah yang mengekspor demokrasi (liberal) ke negara-negara Amerika Latin tersebut.

Perlu dicatat bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin sebenarnya bukan unik Amerika Latin semata, tetapi merupakan bagian dari *trend* besar yang sering disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Tapi apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin sendiri tidak bisa dilihat sebagai “sesuatu” yang homogen, tetapi justru sangat heterogen sebagaimana tadi telah disinggung Ivan A. Hadar. Oleh karena itu, kecenderungan yang sekarang terjadi di Amerika Latin tidak dapat kita generalisasi sebagai kecenderungan tunggal.

Ditinjau dari konteks politiknya, apa yang sedang terjadi di Amerika Latin juga terjadi di tujuh wilayah dunia pada abad 20. Di sana, ada “keterbukaan politik”. Kemudian, ada juga demokratisasi dari atas, faksi-faksi yang berada di tingkat elit merasakan bahwa cara-cara non-demokratis ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, meski saat bersamaan, dengan derajat dan intensitas yang berbeda-beda di setiap negara, ada juga desakan dari bawah. Pelembagaan demokrasi liberal ini biasanya dibawa oleh berbagai *funding* seperti NDI ataupun IRE. Mereka mempunyai asumsi bahwa demokrasi layaknya perabotan yang bersifat *knock down*, bisa direkayasa kapan saja. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika lembaga-lembaga ini sangat antusias ketika terjadi transisi demokrasi. Mereka menjadi pemrakarsa bagi banyak undang-undang seperti UU Politik, UU Partai Politik dan Parlemen, dan lain sebagainya. Mereka

mempunyai keyakinan bahwa dengan melalui prosedural semacam itu maka perubahan yang terjadi akan menjadi lebih baik meskipun dalam kenyataannya peraturannya yang sudah baik tersebut, tidak selalu sejalan dengan orang-orangnya yang duduk dalam kekuasaan politik. Kita lebih sering melihat hal yang sebaliknya seperti yang terjadi di Indonesia.

Perubahan yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin, oleh banyak akademisi atau intelektual, sering disebut sebagai *radically democratizing democracy*. Lula di Brazil misalnya, adalah contoh yang menarik bagaimana ia memperjuangkan kekuasaan politik melalui jalan demokrasi dengan ikut serta dalam pemilu. Setidaknya, ia membutuhkan tiga periode untuk bisa memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan. Oleh karena itu, mereka tidak menolak demokrasi, tetapi demokrasi prosedural tidaklah cukup sehingga harus lebih didemokratisasikan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai demokrasi substansial. Demokrasi ini berusaha melibatkan lebih banyak orang dan tidak terbatas pada kalangan elit semata.

Ciri berikutnya adalah sifatnya yang transnasional dari gelombang demokratisasi tersebut. Secara berurutan, gelombang demokratisasi tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut: gelombang demokratisasi dimulai di Spanyol selanjutnya Portugal, kemudian bergerak ke wilayah Amerika Selatan, negara-negara Asia Tenggara dan Timur dengan menyisakan Indonesia dan Cina, negara-negara Eropa Timur dan terakhir Afrika. Berakhirnya pemerintahan Apartheid di Afrika Selatan dapat kita anggap sebagai puncak arus demokratisasi gelombang ketiga tersebut. Dengan melihat rute semacam ini, apa yang terjadi di Amerika Latin sebetulnya merupakan bagian dari gelombang besar tersebut.

Kristian Stokke, (2004) berusaha mengkuantifikasi gelombang besar tersebut dengan mengatakan bahwa

tahun 1995 negara yang mendasarkan pada demokrasi liberal mencapai 79 negara atau kurang lebih 48%. Padahal, tahun 1975, jumlah negara yang menganut demokrasi liberal baru sebanyak 35 negara. Keseluruhan gambaran di atas beserta angka-angka yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa memang telah terjadi perubahan yang besar meskipun hal ini telah mulai digugat karena mulai ada arus balik. Sebagian kelas menengah di Thailand, misalnya, lebih permisif terhadap kudeta militer yang terjadi belum lama ini. Demikian juga dengan kelompok-kelompok kelas menengah di Pakistan masih bisa “menerima” presiden yang berlatar belakang militer. Partai-partai “kanan” mulai menang lagi. Menurut saya, sosdemlah yang harus menjawab hal ini. Dalam kasus Amerika Latin, perubahan dalam demokrasi elektoral tampaknya tidak berlangsung tuntas. Ini dapat dilihat dari bagaimana militer masih bermain-main dan berusaha masuk ke dalam arena politik. Argentina menjadi contoh paling riil ketika Raúl Ricardo Alfonsín berusaha memaksakan pengadilan pelanggaran HAM. Kelompok militer yang dulunya tidak mendukung jendral-jendral militer yang terlibat ke dalam pelanggaran HAM mulai was-was jika hal tersebut akan menjadi *snow ball*. Kudeta lantas menjadi semacam peringatan terhadap presiden agar pelanggaran HAM tidak diutak-atik karena jika tidak maka mereka akan ribut.

Munculnya para pemimpin “Kiri” Amerika Latin sejak tahun 1990an pada umumnya memiliki karakter “sosialis” atau “populis”. Namun demikian, sebagai catatan yang perlu diutarakan, “Kiri” dewasa ini di wilayah Amerika Latin tentu saja berbeda dengan “Kiri” di masa lalu. Meskipun tujuan dan prioritasnya sama, tapi cara untuk mencapainya mengalami perkembangan dalam konteks globalisasi.

Jika kita harus lebih mengartikan apa yang kita sebut sebagai “Kiri”



Amerika Latin, maka secara mudahnya kita paparkan sebagai upaya para pemimpin, partai dan gerakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial melalui berbagai cara atau manifestasi, baik dengan mobilisasi "akar rumput" dari "bawah" (*bottom-up*), inisiatif kebijakan dari "atas" (*top-down*) yang dilakukan para pemimpin karismatik atau populis, maupun cara legislasi oleh partai politik yang berkuasa di parlemen.

Ada 3 elemen utama dari "Kiri" Amerika Latin yang bisa kita catat yakni; (a) adanya komitmen yang kuat, baik secara ideologis maupun politis, upaya untuk mempromosikan egalitarianisme; (b) ada keinginan yang besar untuk menjadikan "negara" sebagai pengimbang kekuatan pasar;

dan (c) penekanan pada partisipasi rakyat (*popular participation*).

Secara sederhana ada dua jalan "Kiri" Amerika Latin, sebagaimana diutarakan oleh Jorge Castañeda, seorang mantan diplomat Meksiko dan pernah menjadi menteri luar negeri.

Yang pertama, jalan "Kiri" yang lebih "terbuka" (*open-minded*), reformis, dan internasionalis meski secara historis akarnya merupakan "garis keras" (*hard-core*) dari "Kiri" masa lalu (Komunis Internasional dan Revolusi Bolshevik). (misal, Argentina, Brazil dan Chili). Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat dari jalan "Kiri" yang pertama ini antara lain, ber-evolusi hampir menyerupai kalangan sosialis di Eropa (Barat) yang mengambil jalan elektoral. Kemudian,

mereka juga menaruh perhatian pada masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, tapi saat bersamaan mereka sangat fleksibel terhadap soal-soal ekonomi karena pada dasarnya mereka tidak menolak pasar. Mereka umumnya menekankan pada kebijakan sosial meski saat bersamaan sepakat dengan hampir semua kebijakan ekonomi ortodoks

Adapun jalan "Kiri" yang kedua, cirinya lebih "tertutup" (*closed-minded*), nasionalis, vokal, dan secara historis akarnya berasal dari tradisi populisme Amerika Latin, dan berkembang di hampir seluruh wilayah Amerika Latin (misal, Venezuela, Bolivia, dan Argentina). Sebetulnya gerakan dan pemikiran populisme mewakili berbagai "Kiri" di Amerika Latin. Meski pada umumnya mereka anti-komunis, atau minimal

Ada 3 elemen utama dari "Kiri" Amerika Latin yang bisa kita catat yakni; (a) adanya komitmen yang kuat, baik secara ideologis maupun politis, upaya untuk mempromosikan egalitarianisme; (b) ada keinginan yang besar untuk menjadikan "negara" sebagai pengimbang kekuatan pasar; dan (c) penekanan pada partisipasi rakyat (*popular participation*).

tidak sejalan dengan ide-ide dan praktek komunisme. Lainnya adalah karakternya yang otoritarian (personal) dan hirau pada kekuasaan. Mereka juga umumnya sangat peduli pada rakyat miskin. Dalam catatan sejarah Amerika Latin, saya bisa menyebut nama-nama Peron di Argentina dan Vargas di Brazil yang hirau pada kaum miskin urban, atau Cardenas peduli pada petani miskin Meksiko. Biasanya mereka membangun struktur korporatis dalam menformulasikan relasi antara negara dan masyarakat (buruh dan petani). Mereka juga memiliki kecenderungan gandrung dengan proyek nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar atau multinasional. Dalam sejarahnya saya mencatat nasionalisasi ini dilakukan oleh para pemimpin populis seperti Cardenas yang menasionalisasi perusahaan multinasional dalam sektor perminyakan di Meksiko. Demikian juga dengan Peron,

kereta api di Argentina, Vargas, baja di Brazil, Juan Velasco Alvarado, tembaga di Peru, dan Victor Paz Estenssoro, timah di Bolivia. Kecenderungan yang sama saat ini juga sudah dilakukan Chavez di Venezuela dan Morales di Bolivia. Menurut Castañeda, kedua jalan ini merupakan serangan balik terhadap proyek neoliberalisme yang berkembang di Amerika Latin.

Pertanyaan berikutnya adalah pelajaran apa yang kita dapatkan dari mencermati kebangkitan neososialisme di Amerika Latin? Ada banyak pelajaran pokok yang bisa kita dapatkan. Mereka tampaknya lebih meniru kalangan sosialis di Eropa yang mengambil jalan elektoral. Dalam kaitan ini, kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi perhatian mereka, tetapi tidak anti pasar. Kasus Chile, misalnya, menjadi kasus menarik untuk dikaji. Mereka kritis terhadap keterlibatan Amerika di Haiti, tetapi Chile adalah negara yang banyak melakukan transaksi dagang dengan Amerika Serikat, baik swasta maupun pemerintahannya. Kalangan "Kiri", sebagaimana dinyatakan oleh Stevel Ellner, menyebut strategi seperti ini sebagai *the defensive strategy on*

the left. Di tingkat negara per negara bersikap moderat, tetapi di akar rumput (arus bawah) *getol* mencari solidaritas internasional. Makanya, mereka cukup gembira ketika gerakan perlawanan anti kapitalisme terjadi di Seattle. Strategi ini dilakukan karena dalam pemahaman mereka strategi frontal terhadap Barat atau AS jelas tidak akan menguntungkan mereka karena besar kemungkinan seperti yang sudah-sudah mereka akan kalah.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dibayangkan Castañeda dengan dua kategori sosialisme baru yang ada di Amerika Latin? Mengapa dalam konteks Amerika Latin dan mungkin juga kawasan lain ide mengenai sosialisme muncul kembali? Bukankah jika kita merujuk gagasan Fukuyama mestinya sudah selesai. Fukuyama mengatakan bahwa perdebatan ideologi sudah selesai dan liberalismelah yang menjadi pemenangnya. Namun ternyata, tidaklah demikian karena muncul arus balik yang menghadang liberalisme. Saya kembali mengutip Castañeda, sedikitnya ada beberapa faktor penyebabnya.

Ternyata ambruknya Uni Soviet dan Eropa Timur justru membantu

Jorge Castañeda

(Latin American's Two Lefts", Dec 2004)
(Latin America's Two Left Wings, Jan 2006)

Serangan Balik "Kiri" terhadap Neoliberalisme



Kategori 1 ➤ Chili
➤ Brazil
➤ Uruguay

Kategori 2 ➤ Venezuela
➤ Argentina
➤ Bolivia
➤ Kuba

"Kiri" Amerika Latin mengubah stigma geografis yang ada sebelumnya. Pemerintahan "Kiri" atau "Kiri-Tengah" di Amerika Latin tidak lagi harus memilih antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak ada lagi *labeling* negara mana yang menjadi satelit dari negara komunis atau negara kapitalis.

Kemudian, AS sendiri, sejak berakhirnya Perang Dingin, tidak terlalu menaruh perhatian kepada wilayah Amerika Latin lagi, meski untuk waktu yang sangat lama wilayah ini disebut sebagai "*backyard*" (halaman belakang) Amerika Serikat. Sekarang ini, Amerika Serikat lebih berkonsentrasi di Timur Tengah, Afganistan, Irak dan sekarang bermain-main di Iran, sehingga perhatiannya terhadap gerakan-gerakan sosialis dan komunis di Amerika Latin semakin ditinggalkan.

Yang penting juga untuk diamati, berakhirnya Perang Dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet dan Eropa Timur, bukan berarti mengakhiri sebab-sebab yang menyebabkan kelahiran ideologi dan program "Kiri" di Amerika Latin. Saat ini justru semakin relevan dengan ketidakmerataan, kemiskinan, dan konsentrasi kekuasaan, keadilan dispartitas sosial yang semakin akut di wilayah Amerika Latin. Ini berkaitan dengan proses globalisasi yang di "*back-up*" proyek neoliberalisme (*Washington Consensus*) ternyata justru melahirkan berbagai persoalan sosial-politik dan ekonomi yang semakin parah di Amerika Latin. Neolib dengan *Washington Consensus*-nya ternyata menjadikan masyarakat Amerika Latin semakin miskin, terutama kelompok *indigenous*-nya. Akibatnya, ide-ide sosialisme menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, ketika para pemimpin dengan ide sosialis ini masuk ke dalam demokrasi elektoral maka mereka mendapatkan dukungan di atas 40%. Salah satu pendukung utamanya adalah, kelompok miskin, khususnya dari kalangan *indigenous* inilah yang memberikan dukungan. Mereka

menjadi aset bagi orang-orang seperti Chaves dan kawan-kawan.

Rejim-rejim sosialis di Amerika Latin ini tidak isolasionis. Mereka justru terbuka. Ini dapat dilihat dari, misalnya, dengan mempromosikan *Buenos Aires Consensus* yang sebenarnya muncul ketika negara-negara Amerika Latin bertemu di Argentina untuk mengevaluasi proyek *Washington Consensus* yang banyak menimbulkan masalah kemiskinan dan disparitas di Amerika Latin. Meskipun mereka tidak melakukan serangan secara frontal, tetapi mereka menganggap bahwa *Washington Consensus* sudah gagal. Tadi sudah saya sebut, strategi ini yang dikenal sebagai *The Defensive Strategy on The Left*. Bukti lain nonisolasionis ini juga dapat dilihat pada bagaimana Chaves secara demonstratif berkunjung ke berbagai negara seperti Vietnam, Iran, Zimbabwe, Korea Utara, dan lain sebagainya. Kunjungan Hugo Chaves ke negara-negara Islam membuat Amerika Serikat kebakaran jenggot karena ternyata bisa jadi kunjungan ini memperlihatkan bagaimana Islam dapat berdampingan dengan sosialisme. Ada semangat anti-kapitalisme, atau lebih persisnya bersikap kritis terhadap Amerika Serikat, dari ciri nonisolasionisme yang dikembangkan Chavez dan kawan-kawannya di wilayah Amerika Latin.

Dalam perkembangan selanjutnya, masa depan kiri Amerika Latin mulai mendapatkan kritik. Dalam hal perbaikan taraf hidup, misalnya, para pengkritik mengatakan bahwa perbaikan memang telah ada, tetapi belum maksimal karena ketimpangan masih ada. Hal serupa juga dialami oleh *indigenous people*. Orang seperti Morales mulai dikritik. Suku pertama terbesar di Bolivia, Quechua (Runa), mulai mengkritik Morales dengan menyatakan bahwa ia tidak banyak melakukan perubahan. Morales sendiri kita tahu berasal dari suku kedua terbesar di Bolivia, Aymara. Lula pun mulai mendapat kritik. Orang-orang yang dulu masuk di Partai Partido

Siapa pun presidennya, hari pertama di kantornya sudah dihadapkan utang baik dari IMF maupun Bank Dunia. Hal ini seringkali memunculkan *policy switcher*. Ini ada *trend*-nya di Amerika Latin.

dos Trabalhadores-nya Lula sekarang ini membuat partai sendiri yang lebih radikal karena Lula dianggap terlalu kompromis dengan kalangan swasta agrobisnis dibandingkan dengan kalangan petani tak bertanah yang menjadi basis konstituennya. Perlu kita ketahui bahwa para pemimpin di Amerika Latin selalu menghadapi apa yang disebut kaum kiri sebagai *financial teorism*. Siapa pun presidennya, hari pertama di kantornya sudah dihadapkan utang baik dari IMF maupun Bank Dunia. Hal ini seringkali memunculkan *policy switcher*. Ini ada *trend*-nya di Amerika Latin. Pada waktu kampanye mereka sangat "Kiri", tetapi begitu terpilih menjadi sangat "Kanan". Diantaranya mewujudkan dalam bentuk konsesi terhadap modal asing, hutang luar negeri, dan lain sebagainya. Alberto Fujimori di Peru dan Fernando Cardoso adalah orang-orang yang awalnya sangat progresif, atau ke "kiri-kiri"an, tetapi begitu menjabat menjadi sangat "kanan", sangat *neolib*. Carlos Menem dan Alan Garcia juga demikian. Seperti dicatat Kristian Stokke, semua pemimpin di kawasan ini hampir semuanya berkhianat terhadap apa yang mereka janjikan pada waktu berjuang di jalur elektoral, dan jika tidak berhati-hati akan sangat mungkin mereka masuk ke dalam *policy switcher*.

Tidak aneh misalnya, orang seperti James Petras, pensiunan profesor di

AS, menulis artikel yang berjudul, *Is Latin America Turning Left?* Ia merasa bahwa apa yang dilakukan di Amerika Latin hanya gerakan reformasi saja, tidak fundamental, tidak struktural. Bahkan, James Petras menunjukkan banyak pemimpin melupakan *social movement* yang dulu menjadi basis dukungan mereka. Hugo Chavez merupakan tokoh sosialis yang bukan berasal dari partai, tetapi berangkat dari *social movement* yang mereka buat. Hal yang sama juga terjadi pada Evo Morales. Gerakan-gerakan sosial ini kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik, dan gerakan sosialnya mulai ditinggalkan. Mereka mulai terlalu asyik dengan *state strategy*. Bernegosiasi dengan bisnis, bernegosiasi dengan modal, dan melupakan akar gerakan mereka. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa serangan balik kiri terhadap neolib merupakan sesuatu yang berlebihan. Ia hanya memperlihatkan keberlanjutan daripada perubahan yang radikal, dari dua kategori yang disebutkan Castañeda di atas. Untuk itu, ia mengajukan 14 kriteria, yang menurut saya memang agak tidak masuk akal. Menurut saya, jika benar-benar ingin masuk sebagai eksperimen sosialisme maka kira-kira harus memenuhi 14 kriteria yang ada atau semacam *structural adjustment program*-nya Kiri. Ini tampaknya agak susah dipenuhi oleh beberapa pimpinan "Kiri" yang sekarang berkuasa sebagai presiden di Amerika Latin.

Meskipun demikian, ada juga pengamat yang tidak melihat semata secara hitam putih. Salah satunya adalah penasehat Fidel Castro, Marta Harnecker. Ia salah seorang yang berseberangan dengan James Petras. Ia mengatakan, "bedanya saya dengan Petras adalah Petras tidak menerima bahwa ada perubahan. Ia selalu berpikir apa yang seharusnya, sedangkan saya sebagai penasehat Fidel Castro berangkat dari apa yang sudah ada". Makanya, ia bilang, *The Defensive Strategy on The*

Left ini menjadi penting. Alasannya, mengapa kita harus berjuang secara frontal secara terus-menerus dengan Barat dalam bentuk gerakan bersenjata, anti kapitalisme, dan seterusnya? Oleh karena itu, dia mencoba lebih moderat bahwa sebetulnya ada peluang dari dua kategori ini; membangun tata dunia yang lebih multipolar dan masa depan bersama yang lebih otonom dari hegemoni Amerika Serikat. Jadi, mereka memanfaatkan Eropa bersatu, kekuatan negara-negara Skandinavia, dan potensi Timur Tengah agar tidak selamanya bergantung kepada Amerika Serikat. Demikian paparan umum saya mengenai kecenderungan nesosialisme atau "Kiri" di Amerika Latin. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Berdasarkan paparan Mas Boni tadi, ada dua hal yang menarik. Pertama, gerakan sosialisme di Amerika Latin tidak homogen, tetapi heterogen. Ada

nuansa yang sangat kaya. Kemudian, ada perkembangan yang dari tadinya terjadi *Policy Switcher*, tetapi yang terakhir ini agak lebih fleksibel antara pasar dan negara, Bolivia ada suara-suara dari para intelektual, dari gerakan sosial dan sebagainya yang relatif radikal, dan ini tampaknya bagian dari dinamika itu. Menurut saya, secara keseluruhan, dalam konteks Amerika Latin, meskipun memiliki nuansa yang kaya, tetapi dalam hal tertentu mempunyai perekat sangat kuat seperti keterkaitan historis, bahasa, dan lain sebagainya. Jika trend ini terus berkembang dan menjadi mayoritas, maka sangat mungkin akan menjadi kekuatan yang tangguh. Nah, sekarang kita akan mendengar saksi sejarah, yakni Budiman Sudjatmiko. Silahkan!

Budiman Sudjatmiko

Saya kira presentasi Mas Boni sudah sangat baik. Oleh karena itu, saya hanya akan menambahkan beberapa

James Petras

- ▶ Metode untuk mendefinisikan "Kiri" adalah dengan cara melihat pada esensi politik daripada menfokuskan pada simbol atau retorika politik
- ▶ "Kiri" pada kategori yang ada sangat menyesatkan, dan ini sebetulnya hanya diasosiasikan dengan kalangan elit saja
- ▶ Ada "jarak" antara yang 'dijanjikan' dengan yang 'diimplementasikan'
- ▶ Kebijakannya tetap melanjutkan proyek neo-liberalisme
- ▶ Hanya masalah sejauh mana mereka menjadi subordinat terhadap imperialisme

14 Kriteria "Kiri":

1. Mengurangi ketimpangan sosial
2. Meningkatkan standar kehidupan
3. Kepentingan umum dan pemilikan nasional daripada pemilikan asing dan privat
4. Pajak progresif
5. Anggaran untuk investasi publik dan pembiayaan sosial
6. Penguasaan sumber2 alam
7. Produksi diarahkan pada aktivitas yang membawa nilai-lebih
8. Fokus pada pasar dalam negeri
9. Partisipasi Populer
10. Gerakan Masyarakat
11. Anti pasar bebas dan pangkalan militer
12. Mengembalikan anti-privatisasi
13. Meningkatkan upah minimum
14. Mempromosikan serikat buruh, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis

hal, terutama saya akan menyoroti kasus Venezuela. Dalam pemahaman saya, Venezuela boleh dikatakan *prime mover* dari *red epidemic* di Amerika Latin. Dikatakan sebagai *prime mover*, bukan sekedar *prime* dalam pengertian *primary* dalam kronologis waktu, tetapi bahwa sebenarnya Venezuela menjadi *anchor* (jangkar-*red*) dari gerakan “Kiri” Amerika Latin. Dalam kasus Venezuela, saya kira semesta mendukung sekali kelahiran sosialisme di Venezuela karena ketika harga minyak membubung tinggi, Venezuela mempunyai seorang pemimpin yang mau menggunakan sumber daya di negerinya untuk *public service* yang luar biasa.

Di sini, saya ingin mengatakan bahwa ada faktor alam, sejarah atau apapun, yang memang memungkinkan Chaves mendanai *social service*-nya atau *public service*-nya. Begitu besarnya kapasitas yang ia miliki dari penghasilan minyak 1,8 juta barel/hari, maka 800 ribu dialirkan ke Amerika sebagai pasarnya, 600 ribu barrel/hari disumbangkan untuk program minyak kemanusiaan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Mulai dari menjual minyak murah bagi para gelandangan di Boston, atau korban Katrina di Amerika Serikat hingga program minyak murah melalui kerja sama dengan Walikota London untuk orang-orang miskin di London. Venezuela bahkan menawarkan minyak seharga \$100/barel tatkala harga minyak dunia \$123 ribu/barel ke Spanyol, yang rajanya baru saja maki-makian sama dia, dan kemudian dia tawari minyak \$100/barel.

Kegiatan-kegiatan di atas dapat kita katakan sebagai program kemanusiaan yang sifatnya karikatif. Nah, saya tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan dengan uang itu untuk mendanai gerakan-gerakan “Kiri” dan kemenangan-kemenangan kawan-kawan “Kiri” seperti dalam kasus Nikaragua, misalnya. Pada waktu Ortega belum memenangkan pemilihan presiden, yang terakhir ini, memang ada beberapa kota yang

dikuasai oleh walikota dari Sandinista. Ia menjual minyak murah di kota-kota dimana Sandinista menjadi walikotanya, dan itu sangat membantu perolehan suara yang diperoleh Sandinista. Saya tidak mengatakan bahwa kemenangan Sandinista semata-mata karena itu, tetapi hal tersebut sangat membantu.

Jika tadi Mas Boni sudah berbicara bagaimana *territory* gerakan-gerakan “Kiri” Amerika Latin dengan menggunakan perspektif historis, maka saya akan mencoba sedikit lebih reflektif. Dalam hal ini, saya ingin mencoba melihat benang merah mengenai apa sebenarnya yang dijadikan kebangkitan “Kiri” di Amerika Latin. Pertama, alasan geo-politik. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Boni soal Amerika Serikat yang sedang konsentrasi di Timur Tengah karena mereka harus berburu terorisme, memburu aktivis-aktivis fundamentalis Islam sehingga kemudian yang dilakukan adalah meninggalkan halaman belakang Amerika Serikat, yaitu Amerika Latin. Ini karena Amerika Serikat sudah merasa berhasil dengan program demokratisasinya, sudah merasa berhasil dengan program neoliberalisasi dengan mendorong berdirinya NAFTA, dan sudah merasa berhasil mendorong privatisasi yang besar-besaran di seluruh negara Amerika Latin sejak pertengahan 1980-an sampai akhir 1990-an tatkala Amerika Latin menikmati proses demokrasi dan lahirnya pemimpin-pemimpin sipil yang tadi disebut Mas Boni. Tokoh-tokoh sipil demokratis yang awalnya memakai retorika “Kiri” atau populisme, tetapi ketika berkuasa menjalankan neoliberalisme secara besar-besaran.

Saya ingin mengemukakan bahwa awal-awal demokratisasi sipil di Amerika Latin orang-orang mempunyai ilusi. Orang miskin banyak mempunyai ilusi terhadap pemimpin-pemimpin yang bisa merepresentasikan dan sekaligus menggambarkan proyeksi kehidupan dirinya. Pendeknya, “karena aku miskin aku menginginkan pemimpin yang dari

Begitu besarnya kapasitas yang ia miliki dari penghasilan minyak 1,8 juta barel/hari, maka 800 ribu dialirkan ke Amerika sebagai pasarnya, 600 ribu barrel/hari disumbangkan untuk program minyak kemanusiaan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Mulai dari menjual minyak murah bagi para gelandangan di Boston, atau korban Katrina di Amerika Serikat hingga program minyak murah melalui kerja sama dengan Walikota London untuk orang-orang miskin di London. Venezuela bahkan menawarkan minyak seharga \$100/barel tatkala harga minyak dunia \$123 ribu/barel ke Spanyol, yang rajanya baru saja maki-makian sama dia, dan kemudian dia tawari minyak \$100/barel.

kalangan elit". Karena mereka bodoh, mereka menginginkan pemimpin yang artikulatif, baik secara teoritis maupun praktis". Jika dibandingkan dengan sekarang, maka sangat mengejutkan. Ada bekas tukang semir sepatu dan buruh pabrik menjadi presiden, bekas petani menjadi presiden, dan juga ada Lugo, seorang pendukung kaum papa menjadi presiden. Orang-orang yang menurut kategori LSI adalah tidak menarik, tidak *electable*.

Kemudian, jika ditinjau dari perspektif ekonomi, maka ada beberapa hal atau enam parameter yang menjadi pendorong munculnya fenomena Amerika Latin. Pertama, kondisi-kondisi yang bersifat material dalam bentuk kemiskinan-dimana banyak orang menjadi lebih miskin-dan akhirnya memilih figur-figur "Kiri". Namun, miskin saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan. Kita harus melihat tolak ukur kedua, yaitu *related of social forces*. Hubungan-hubungan kekuatan sosial seperti kekuatan pengusaha, gereja, gerakan sosial, dan juga tentara. Faktor ketiga adalah subyeknya itu sendiri, si pelaku itu sendiri. Pelaku-pelaku utama dari *prime mover* sosialisme baru di Amerika Latin juga bervariasi atau beragam. Misalnya, *prime mover* atau pelaku utama gerakan sosialisme di Bolivia adalah suku-suku anak dalam, Indian. Suku-suku Indian yang memang tercampakkan dari segi ekonomi, dari segi kultural dan juga politik. Ini yang terjadi di Bolivia dan Ekuador. Di Brazil, pelakunya adalah gerakan petani dan perubahan sektor formal. Di Venezuela, pelakunya adalah informal urban sector. Di Argentina, buruh-buruh pabrik yang formal dan perubahan sektor informal. Dalam hal ini, saya tidak mengatakan bahwa hanya mereka yang bergerak, tetapi mereka berhasil menemukan apa yang dalam teori perang disebut sebagai *center of gravity*-nya. Kontradiksi-kontradiksi yang menyebabkan atau yang paling menjadikan sesuatu hal itu jika digerakkan akan mempunyai efek

berganda. Mereka berhasil menemukan dan melakukan hal tersebut.

Gerakan "Kiri" yang dilakukan di Bolivia pernah mengalami kegagalan ketika mereka terlalu mengandalkan buruh-buruh tambang. Buruh-buruh tambang ini menjadi *prime mover*-nya. Namun sekarang, sudah mulai ke suku-suku anak dalam yang jauh lebih punya basis sosial. Jadi, agen sosial yang menjadi *prime mover* masing-masing gerakan "Kiri" agak berbeda satu sama lain meskipun kemudian menjadi bersifat lintas sektoral.

Keempat adalah tingkat kesadaran rakyatnya, *popular consciousness*-nya, yakni bagaimana mereka menafsirkan krisis yang terjadi tersebut harus dihadapi dengan sebuah sistem alternatif, bukan sekedar presiden alternatif. Di Argentina, jika tidak salah dalam dua minggu ketika krisis terjadi pernah dua atau tiga kali ganti presiden. Namun, mereka tidak puas dengan presiden tersebut. Mereka butuh sesuatu yang baru. Namun, maaf dengan teman-teman, sebelumnya saya ingin memberi catatan bahwa term sosial demokrasi atau kelompok-kelompok yang secara *officially* menyatakan dirinya sosial demokrasi dalam konteks Amerika Latin jika di Argentina tokohnya Fernando de la Rúa, di Peru adalah Alan García, di Brazil ada Cardoso, dan di Venezuela adalah Acción Democrática (AD), mereka dikategorikan ke dalam kelompok "Kanan". Jadi, term sosial demokrasi sebenarnya tidak bisa diletakkan secara pas untuk konteks Amerika Latin. Dia sosialis, dia marxian sosialis. Campuran dengan nasionalisme, campuran dengan indigenisme, semangat kepribumian, dan lain sebagainya. Ketika mereka berbicara menolak neoliberalisme maka pada dasarnya mereka tidak menjadikan sosial demokrasi sebagai alternatif. Kasus Cardoso, Fernando de la Rúa, dan Alan García setidaknya seperti itu. Sebaliknya, kesadaran mereka adalah kesadaran sosialis dalam pengertian yang baru, yang kita sebut neososialisme. Dilihat



dari konteks kelahirannya, mereka tidak didukung oleh komunisme internasional, tetapi dalam doktrin revolusi terutama Venezuela dan Bolivia, yang saya amati dan lihat, sangat ortodoks dalam *policy* ekonomi. Mereka bicara mengenai nasionalisasi meskipun tentu saja dibayar dan tidak dirampas. Mereka juga berbicara land reform, tidak bicara pajak progresif yang menjadi primadonanya kaum sosial demokrat. Jadi, bedanya sosial demokrat dan sosialis adalah kalau sosial demokrat "bermain" di pajak, sedangkan sosialis tidak. Mereka bermain dalam soal penguasaan alat produksi, dan ini terjadi di Venezuela. Cemex, Holcim, dan PDPSA dinasionalisasi. PDPSA ini merupakan perusahaan yang sebenarnya sudah lama di nasionalisasi di Venezuela, yakni era tahun 1970-an atau bahkan tahun 1960-an. Kemudian, di bawah pemerintahan sosial demokrat Carlos Peres, diliberalisasi kembali. Akibatnya, Venezuela sebagai produsen minyak terbesar kelima di dunia bukannya untung, tetapi justru menanggung hutang. Sampai akhir tahun 1998, Chaves belum berbuat apa-apa. Ia melakukan perubahan konstitusi. Melalui referendum konstitusinya diubah.

Mulai tahun 2002, Chaves sudah mulai menyentuh alat produksi, sudah mulai menyentuh brangkasnya elit Venezuela, yaitu ketika Chaves menginisiasi atau jika dalam kasus Indonesia disebut hak angket. Suatu legal studi tentang kemana

uang-uang minyak Venezuela mengalir. Setelah diteliti, ada tujuh kesalahan yang dilakukan dalam kontrak-kontrak di Venezuela yang isinya sebenarnya adalah penipuan, penggarongan dan segala macamnya yang sejenis. Mereka ternyata merupakan sumber dari 80% penduduk di bawah garis kemiskinan Venezuela. Padahal, mereka penghasil minyak kelima terbesar di dunia. Dalam sebuah pidato yang diucapkan Rafael Ramires, presiden direktur PDPSA yang baru-seorang insinyur, bekas gerilyawan “Kiri”, yang judul pidatonya tidak mirip seperti seorang direktur Pertamina di sini, tetapi mirip seperti pidatonya aktivis PRD atau BPR, “Kebijakan migas yang nasionalis, pro-rakyat dan revolusioner,” ketika berpidato mengenai reformasi PDPSA, ia mengatakan bahwa “keuntungan minyak harus kita ambil dan kita alokasikan untuk kesejahteraan”. Sekarang ini, PDPSA menjadi semacam “negara” dalam negara karena menguasai sekolah, pendidikan, pembelian Sukhoi, dan membeli pabrik senjata AK bekerja sama dengan Rusia.

Apa yang terjadi dalam tubuh PDPSA (Pertamina-nya Venezuela) sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang terjadi dalam tubuh Pertamina. Sebelum dilakukan reformasi, negara tidak boleh mempunyai saham. Penguasa negara hanya sekedar menjadi perlindungan hukum. PDPSA hanya menjadi perusahaan yang sifatnya jasa. Pengeboran-pengeboran semuanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing. Kemudian, kontrak-kontrak yang hanya berapa puluh hektar kemudian diam-diam diperluas dengan korupsi birokrasi setempat. Makanya, ketika Chavez hendak menyentuh birokrasi PDPSA, Chavez langsung dikudeta. Perubahan konstitusi masih ditoleransi, demikian juga dengan reformasi UU Partai Politik, tetapi tidak pada isu-isu kepemilikan. Jadi, memang neoliberalisme dalam bentuknya yang paling adjusting ada di semua tempat dalam wajah yang sama. Persoalannya

Dalam sebuah pidato yang diucapkan Rafael Ramires, presiden direktur PDPSA yang baru-seorang insinyur, bekas gerilyawan “Kiri”, yang judul pidatonya tidak mirip seperti seorang direktur Pertamina di sini, tetapi mirip seperti pidatonya aktivis PRD atau BPR, “Kebijakan migas yang nasionalis, pro-rakyat dan revolusioner,” ketika berpidato mengenai reformasi PDPSA, ia mengatakan bahwa “keuntungan minyak harus kita ambil dan kita alokasikan untuk kesejahteraan”.

lebih pada pemimpin negara yang tidak sama.

Saya kira hanya di Venezuela dimana pasal-pasal dalam konstitusi dijadikan bungkus kacang, permen, ataupun coklat agar ketika orang membeli coklat, membeli permen di toko-toko milik negara atau koperasi, mereka akan selalu membaca pasal mengenai hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Jadi, bagaimana konstitusi itu menjadi “kitab suci”nya, menjadi firman-firman yang ketika mereka berdebat hanya dengan membawa bungkus coklat, “Hei saya punya hak di sini.”

Venezuela juga paling *legitimated*

in-term of jumlah referendum dan plebisit yang mereka lakukan. Dari tujuh referendum yang dilakukan, enam referendum menang. Hanya yang terakhir ketika Chavez meminta perpanjangan kepresidenannya ia kalah tipis. *Popular consciousness*-nya dibangun melalui konstitusi. *Popular consciousness* juga dapat dilihat dari cara orang Amerika Latin meraih kepemimpinan. Seperti telah disinggung Mas Boni, apa sih artinya menjadi pemimpin Amerika Latin pada zaman sekarang? Saya berkali-kali bilang, ibaratnya orang sakit, orang Amerika Latin pernah menderita sakit lama, kediktatoran militer. Mereka hanya ingin mengenyahkan itu, mereka ingin lepas dari penyakit lama tersebut, mereka tidak ingin melihat pemimpin yang kejam, yang otoriter, yang tidak ramah. Oleh karena itu, ketika terjadi proses demokratisasi mereka mencari pemimpin yang layak. Sebagai orang sakit, pertama kali, mereka mencari hiburan dulu. Mereka tidak mau segera mencari obat atau dokter karena obat itu pahit, dan dokter itu kalau nyuntik menyakitkan. Oleh karena itu, mereka mencari hiburan, yakni figur-figur yang menghibur seperti artis, intelektual, tokoh flamboyan, dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang dipilih di Amerika Latin pada waktu itu. Pemimpin yang populis, kampanye kerakyatan dan elegan, dan ketika mereka diberi kesempatan ternyata gagal. Kemudian, ketika hiburan rasa sakit itu tidak menyelesaikan sakit mereka akhirnya mencari dokter, yakni orang-orang yang tidak menghibur dari segi penampilan, orang-orang yang tidak menghibur dan tidak menakutkan dari segi kelas mereka, seperti petani, buruh, bekas buronan, bekas tahanan politik, bekas pemberontak. Itu menarik sekali. Ketika bertemu Lugo, saya tidak membayangkan bahwa kekuasaan itu menjadi begitu *simple, very simple* karena dua hari menjelang pelantikan presiden tidak ada karangan bunga dari PT Bumi

Resource, misalnya. Di rumahnya, hanya ada ubi rebus dan ikan bakar. Di sebuah rumah yang mirip Ketua RT di Jakarta. Saya bayangkan, ternyata rumah seperti itu, dan dua hari kemudian menjadi presiden. Sampai saya bilang sama teman saya, Rikard, "Pak Rikard, saya malu karena pernah ingin menjadi orang kaya". Kedua, ia orang yang sangat sederhana. Ketika hari pertama masuk istana, ia mengendarai mobilnya dari rumah ke istana. Saya bersama rekan Bagun dan Romo Martin ke ruang kerjanya, dan hari pertama ke istana ia memanggil kabinet dan sudah menumpuk 100 *draft* dekrit. Hari pertama menjadi presiden, ia telah membuat dekrit tentang *land reform*, reformasi birokrasi, renegosiasi, dan lain sebagainya. Jadi, kekuatan bisa menjadi sangat *simple* ketika di tangan orang-orang yang *simple minded person*. Jadi, bagi orang seperti Lugo, 100 hari terlalu lama untuk membangun perubahan sehingga dalam 1 hari telah dihasilkan 100 dekrit. Tentu saja, hal ini mempunyai akibat. Setelah saya pulang dari istana, saya mendapat SMS dari Romo Martin bahwa Lugo mau dikudeta oleh ketua MPR dan calon presiden yang dikalahkan.

Saya juga bertemu dengan Chaves. Saya bicara dengan dia agak banyak, dan waktu itu saya mengajukan pertanyaan, "Kenapa Anda begitu peduli dengan Dunia Ketiga?" Lantas ia menjawab dengan diplomatis, "Saya hanya ingin dikenang sebagai rakyat Dunia Ketiga". Saya kira ini menjadi fenomena yang menarik.

Kasus Lugo adalah juga sangat menarik. Lugo pernah lama kuliah di Vatikan. Dia sering bersama Romo Martin dari Flores yang berasal dari Garis Orde SPD. SPD ini adalah sebuah orde yang sangat kuat di Flores. SPD adalah tempat dulu Bung Karno berkonsultasi pada saat dia dibuang di Ende. Bersama merekalah mendiskusikan dan merumuskan Pancasila. Jadi, saat Lugo di Vatikan belajar betul tentang Pancasila dan Bung Karno dari orang-

Ketika bertemu Lugo, saya tidak membayangkan bahwa kekuasaan itu menjadi begitu simple, very simple karena dua hari menjelang pelantikan presiden tidak ada karangan bunga dari PT Bumi Resource, misalnya. Di rumahnya, hanya ada ubi rebus dan ikan bakar. Di sebuah rumah yang mirip Ketua RT di Jakarta. Saya bayangkan, ternyata rumah seperti itu, dan dua hari kemudian menjadi presiden.

orang SPD Flores sehingga dia paham betul siapa Soekarno dan Pancasila. Pada akhirnya, bagaimana mereka bermain dalam ranah konstitusi. Mereka mengubah konstitusi, dan partai Politik dianggap sebagai kelanjutan dari sosial movement itu sendiri.

Aliansi yang mendukung Lugo sebagai presiden adalah Alianza Partidos por Cambio (Aliansi Partai Untuk Perubahan). Aliansi ini merupakan gabungan dari partai dan gerakan sosial. Lugo didukung oleh 11 organisasi yang membentuk aliansi. Chaves ada banyak partai dan sekarang mau disatukan dalam sebuah aliansi besar partai persatuan dan sosialis Venezuela.

Dari keseluruhan cerita di atas, salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari keseluruhan gerakan neososialisme

di Amerika Latin adalah munculnya solidaritas antarnegara Amerika Latin. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa gerakan neososialisme di kawasan tersebut tidak mengandung kelemahan. Menurut saya, kelemahan dan kekurangan terutama untuk Venezuela bahwa setiap gerakan yang dipimpin oleh pemimpin kharismatik adalah ketakutan untuk tidak mendapatkan calon pengganti. Itu permasalahan besar di Venezuela, yakni institusionalisasi gerakan politik. Persoalan terbesar yang dihadapi Venezuela adalah *the lack of institutionalization* (kurangnya institusionalisasi). Evo Morales relatif stabil gerakan sosialnya karena sudah berlangsung lama meskipun Morales bukanlah satu-satunya tokoh gerakan "Kiri" Amerika Latin. Bahkan, boleh dikatakan dia berada diantara gerakan "Kiri" yang lain, dia hanya salah satu dari sekian tokoh. Namun, dia berani maju dan berani bersaing dengan tokoh-tokoh lain dari gerakan kiri juga.

Selanjutnya, jika kita menengok kasus Indonesia, maka apakah momentum seperti yang terjadi di Amerika Latin ada. Ini karena dari 6 faktor yang tadi saya sebutkan tidak hadir bersamaan. Kadang-kadang, ketika kondisi ekonominya matang, tetapi *popular consciousness*-nya tidak nyambung. *Popular consciousness*-nya matang, tetapi teknologi berorganisasinya tidak cukup mendukung. Dalam kasus Indonesia, kondisi ekonominya cukup mendukung, kegerahan pada neoliberalisme juga sudah mulai marak, tetapi teknologi berorganisasi kita kurang begitu canggih atau berpolitik kita kurang begitu canggih. Akibatnya, gerakan di Indonesia belum mampu mengubah apapun. Sementara itu, di Amerika Latin, keenam faktor tadi berkumpul menghasilkan *cappucino*. Persoalannya adalah apakah ini bisa bertahan menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab? Ini karena dari seluruh negara Amerika Latin yang baru berhasil melakukan regenerasi kedua

adalah Argentina, generasi gerakan "Kiri" 1990-an. Namun, regenerasi itu terjadi pada istrinya sendiri, yaitu Christina Fernandez, sedangkan yang lainnya belum melakukan regenerasi. Lula sudah dua kali menjabat presiden, dan Hugo Chavez kebingungan mendorong regenerasi kedua. Ini akan sangat penting untuk melihat apakah ini bisa sukses atau tidak, apakah sebuah gerakan atau proyek ideologi, sebuah proyek politik itu sustainable, atau diukur dari sejauh mana gerakan itu mampu melakukan institusionalisasi tidak peduli apa pun ideologinya? Dalam konteks Amerika Latin, ini belum terbukti. Kita masih harus melihat apa yang akan terjadi. Namun, apapun kelemahan ataupun kelebihan mereka, menurut saya, mereka belajar lebih cepat dan lebih baik dari kebanyakan orang-orang Asia.

Satu hal saja waktu saya bertemu dengan Lugo, pada pagi hari menjelang pelantikan jam 9 pagi, dia di rumahnya bersama Romo Martin, yang menemani Lugo selama bertahun-tahun mengorganisir petani di sebuah provinsi. "Martin, beberapa jam lagi, saya akan dilantik jadi presiden, saya ingin mengucapkan terima kasih, kamu sebagai pendamping aku, sebagai uskup selama ini, melawan Vatikan, menyakinkan Vatikan bahwa saya bisa menjadi presiden. Kamu mendampingi saya mengorganisir petani, mengorganisir demo-demo petani. Nah, apa yang saya bisa berikan untuk kamu?". Pada waktu itu, Romo Martin hanya bilang dan sambil menunjuk saya dan rekan Bagun, "Bantu dua teman saya ini untuk mewujudkan sosialisme di Asia". Itu saja dan terima kasih.

Ivan A. Hadar

Baik teman-teman, mendengar dua narasumber tadi kita dibuat sangat takjub. Mungkin teman-teman lain ada yang akan memberikan komentar.

Amir Effendi Siregar

Dari laporan Kompas, dan dari apa yang tadi disajikan Boni maupun Budiman, saya mempunyai beberapa catatan. Pertama, jika saya tidak keliru, maka apa yang terjadi sekarang ini adalah proses pembelajaran memahami sosialisme dalam konteksnya yang lain. Kedua, ketika Kompas memberikan klasifikasi yang mereka sebut dengan sosialisme pragmatis dan sosialisme ideologis atau dalam klasifikasi lain disebut sosialisme dalam praktik maka ini sebenarnya perlu dielaborasi lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan istilah tersebut? Saya sendiri tidak begitu sepakat dengan terminologi yang memberikan klasifikasi semacam itu karena ideologi tetaplah ideologi. Bahwa dalam implementasinya disesuaikan dengan perubahan zaman maka itu tidak akan menjadi soal. Mungkin orang-orang seperti Hugo Chavez berbeda dengan Castro dan lainnya karena mereka belajar melalui sebuah proses yang mungkin juga berbeda. Sebuah pelajaran baru yang tadi sudah dijelaskan bahwa sosialisme bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, menurut saya, tidak perlu dibuat klasifikasi semacam itu. Ini semacam proses pendewasaan saja dari sosialisme. Ketiga, pencapaian para pemimpin di Amerika Latin tersebut diraih melalui sebuah proses pemilihan umum. Di sini, demokratisasi politik dan demokratisasi sipil yang sebenarnya mempunyai basis yang sama dengan liberalisme, tetapi mereka melanjutkannya dalam pemikiran. Oleh karena itu, jika tadi Budiman mengatakan berbeda dengan sosialis demokrat maka sosdem dalam konteks Eropa tentu saja berbeda dengan Sosdem dalam konteks Amerika Latin atau dalam konteks-konteks yang lainnya. Oleh karena itu, Sosdem dalam konteks Amerika Latin atau negara berkembang lainnya mungkin bukan pajak masalahnya, tetapi yang lain.

Amerika Latin menjadi kasus menarik bahwa sosialisme bisa dibangun secara implementatif melalui pemilihan umum.

Ini sebenarnya yang mungkin mau dikejar oleh PKS. Saya tidak tahu sejauh mana hal ini akan berhasil. Namun, Amerika Latin sebagai contoh yang paling menarik bahwa itu bisa dilakukan. Nah, dari pelajaran yang kita tidak perlu lihat lagi, tentu saja kapasitas Boni dan Budiman soal Amerika Latin itu jauh lebih mumpuni untuk menjelaskan hal ini paling tidak dibandingkan dengan saya, tapi yang paling penting adalah bagaimana jika kasus Amerika Latin ini ditarik untuk kasus Indonesia?

Pada dasarnya, sosialisme telah dituangkan dalam UUD '45 seperti kalau kita melihat implementasi Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33, sampai 34. Artinya, konstitusi kita sudah menuangkan beberapa prinsip dasar sosialisme. Persoalannya adalah mengapa sosialisme tidak terjadi di Indonesia? Dalam pikiran saya, ini karena para penguasa politik termasuk pimpinan pemerintahannya secara dominan merupakan "*komprador*" yang mempunyai hubungan ekonomi politik dengan kekuatan internasional, kapitalisme, bukan dari kekuatan sipil. Mereka yang berkuasa sebenarnya secara dominan mempraktikkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan liberalisme atau katakanlah neoliberalisme meskipun saya mempunyai catatan menyangkut perdebatan antara neoliberalisme dengan liberalisme *orthodoks*. Sebenarnya, yang disebut dengan neoliberalisme menurut pikiran saya adalah praktik liberal ortodoks oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara berkembang. Ini karena pada dasarnya Amerika sendiri sudah tidak menerapkan prinsip-prinsip liberal *orthodoks*. Di dalam internal mereka sendiri, protektif. Mari kita lihat perdebatan antara Barack Obama dan John McCain. Dari perdebatan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat dinamika internal dimana liberalisme *orthodoks* tidak pernah berlangsung di negara Amerika sendiri. Ia hanya berlangsung ketika berhadapan dengan Irak, Indonesia, dan negara-negara Dunia Ketiga. Di sini,

yang berlangsung adalah implementasi dari pikiran-pikiran liberalisme. Dengan demikian, neoliberalisme harus dipahami bagaimana mereka mempraktikkan pikiran liberalisme *ortodoks* kepada Dunia Berkembang bukan pada dirinya. Pada dirinya, sudah berubah seperti dapat dilihat dari adanya UU anti *trust*, *tax progressive*, dan lain sebagainya.

Catatan berikutnya yang sebenarnya harus kita pelajari adalah mengenai otonomi daerah, yakni bagaimana para bupati atau gubernur kadang-kadang mempraktekkan atau mengimplementasikan pikiran-pikiran sosialis. Ada beberapa kasus, dan menurut saya ini menarik. Salah satunya adalah Provinsi Gorontalo. Menurut saya, kemenangan Fadel Muhammad sebesar 82% bukan karena dia Golkar. Namun, karena ia mempraktikkan beberapa kebijakan sosdem, misalnya, dalam hal jagung. Dulu, ketika produksi jagung tinggi maka harga turun dan diambil oleh tengkulak. Petani tidak pernah mendapatkan apa-apa. Sekarang ini, tidaklah demikian. Fadel mematok harga jagung dan jika tidak ada tengkulak yang beli, maka ia yang akan membeli jagung-jagung petani tersebut. Di sini, ia melakukan intervensi sehingga akhirnya harga jagung naik sampai stabil, dan pada akhirnya para tengkulak mau tidak mau mengikuti harganya. Kedua, penjaminan kredit. Selama ini, untuk mendapatkan kredit, petani harus mempunyai agunan. Namun, di Gorontalo, tidak. Pemerintah daerah ikut memberikan penjaminan kepada petani-petani yang butuh modal sehingga ada intervensi pemerintah pada hal-hal yang menyangkut kebutuhan rakyat. Di sini, tanpa disadari bahwa Fadel telah menerapkan pikiran-pikiran yang sifatnya sosialis. Nah, baru sekarang ini, ia mencoba mempelajari ideologi tersebut. Inilah catatan tambahan saya untuk bisa mengaitkannya dalam konteks Indonesia. Terima kasih.

Imam Yudotomo

Dari semua cerita ini, tampaknya lebih banyak merujuk pada pengalaman tokoh. Padahal, di belakang itu, menurut saya, pasti ada organisasi. Namun, hal ini seolah-olah tidak pernah diungkap. Jika kita berbicara tentang Indonesia, maka persoalan yang dihadapi oleh kaum sosialis adalah organisasi. Oleh karena itu, jika kita ingin menarik dalam konteks Indonesia, maka saya rasa pemahaman tentang organisasinya harus ada betul. Itu catatan saya yang pertama.

Catatan kedua, saya sependapat mengenai pengertian neososialisme atau mungkin pengertian neososial demokrat juga. Dalam pandangan saya, new sosial demokrat ketika kita memilih ikut dalam pemilihan umum maka saya rasa dari sisi yang sangat kiri menarik, tapi mereka harus kita kecualikan sebagai orang sosial demokrat. Jadi, pengertian Bung Budiman, menurut saya, sosial demokrat yang radikal, dan penting untuk Indonesia.

Pengalaman saya pribadi, misalnya, ketika mempropagandakan sosial demokrasi dalam menghadapi Soeharto maka banyak yang tidak suka karena sosial demokrasi dianggap ambigu. Oleh karena itu, banyak teman-teman, termasuk temannya Bung Budiman yang juga teman saya larinya ke PRD yang lebih revolusioner. Menurut saya, yang harus dicari formula adalah bagaimana menjadikan sosial demokrat itu revolusioner. Jadi, sosial demokrat selalu dibilang kiri, tetapi tidak revolusioner, sosialis kanan.

Satu hal lagi mengenai perjuangan sosialisme Amerika Latin bahwa apa yang dicapai oleh Latin Amerika merupakan hasil kerja keras, tidak kenal lelah dan tidak kenal ampun. Mereka konsisten. Salah satu contoh, misalnya, bagaimana konsistensi Nikaragua, Daniel Ortega, dia bergerilya, tetapi karena prinsip demokrasinya maka sesudah menang bergerilya dia ikut pemilihan umum. Dia berusaha sampai menang kembali. Menurut saya, itu konsistensi dan kerja keras yang luar biasa. Saya kira

apa yang dilakukan Chaves, Moralez dan mungkin juga Bachelet merupakan kerja keras yang tidak kenal lelah dan tidak kenal ampun.

Fernando

Saya senang mendengar paparan tentang konstitusi dan semua hal yang berkaitan dengan hal itu karena kebetulan saya tidak terlalu paham mengenai Amerika Latin karena terlalu lama saya tidak membaca referensi tentang itu. Namun, saya tidak menjumpai dalam konstitusi sebagaimana dikemukakan Bang Amir bahwa dalam konstitusi kita mengandung sosialisme. Ini karena sejauh yang saya baca dalam satu naskah yang baru dikumpulkan seseorang, Ananda B Kusuma, jika kita perhatikan satu per satu gagasan para pembuat konstitusi, maka kita ragu ada nilai sosialisme di dalamnya. Saya malah cenderung ada pengaruh korporatisme. Dalam pengertian yang lebih kasar, saya bilang setengah fasis.

Point yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau agenda perubahan konstitusi di Amerika Latin menjadi agenda politik yang luar biasa, saya tidak terlalu percaya bahwa agenda perubahan konstitusi itu juga masih relevan di sini. Ini karena yang saya tahu bahwa sebuah perubahan UU atau perubahan konstitusi harus diambil dari syarat-syarat materialnya yang jelas. Namun, saya melihat bahwa perubahan konstitusi yang terjadi dari tahun 1999 sampai sekarang tidak berangkat dari syarat material yang jelas.

Konstitusi Republik Indonesia yang sekarang diamandemen hanya sebuah wajah yang membebaskan otoritarianisme, membebaskan sisi jelek dari korporatisme, yaitu otoritarianisme sehingga kita mempunyai hak-hak politik dan sipil yang lebih luas dan lebih longgar. Namun, tidak menjelaskan bahwa konstitusi tersebut bisa mendorong agenda-agenda perubahan konstitusi yang mengarah pada ide-ide sosialisme atau ide-ide sosdem. Menurut

saya, amat menarik apabila pengalaman Amerika Latin di dalam mendorong perubahan konstitusi sebagai sebuah wahana untuk mewujudkan gagasan sosdem. Namun, apakah akan menjadi solusi yang juga tepat atau alternatif yang baik dalam pengalaman Indonesia akan tetap menjadi persoalan. Kita harus bertanya secara kritis, apakah memang harus begitu? Jelasnya, walaupun, misalnya, pengalaman Amerika Latin tentang perubahan konstitusional didorong ke Indonesia, saya tidak percaya bahwa akan ada pergerakan bandul menuju ke “Kiri” atau minimal “Kiri-Tengah”. Ini karena sejauh yang saya lihat ketika amandemen UUD ‘45 dilakukan kita relatif belum terpuruk seperti apa yang terjadi dari pemaparan teman-teman tadi. Impresi yang saya dapatkan demikian.

Amir Effendi Siregar

Kebetulan, *background* saya adalah sosial politik sehingga kalau menganalisis yang disebut liberal kapitalisme, sosial otoritarian, dan sosialisme memang mendasarkan pada asumsi tertentu. Misalnya, jika kita melihat kapitalisme, apalagi kapitalisme ortodoks maka seluruh mekanisme atau asumsi dasarnya adalah memberikan kepercayaan kepada orang per orang untuk melakukan kebebasan seluas-luasnya dan peran negara diperkecil sekecil mungkin. Selanjutnya, ekonomi pasar diberikan keleluasaan sebesar-besarnya dengan harapan akan tercipta kesejahteraan. Sebaliknya, otoritarianisme atau sosialisme *ortodoks* itu, dalam praktiknya, negara diberi peran yang dominan yang mengatur hampir seluruh dimensi kehidupan sehingga negara menjadi bagian yang sangat penting di dalam mengatur kesejahteraan manusia. Dalam dua konsensus ini, kita bisa bergerak dari “Kiri” ke “Kanan” atau sebaliknya. Pertanyaannya adalah bagaimana konstitusi kita melihat ini?

Jika kita mau melihat pikiran sosdem, maka ada lima hak dasar yang harus



dipenuhi, yakni hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak sipil dan hak budaya. Nah, apakah konstitusi kita mencoba mencari jawaban untuk adanya jaminan kelima hak ini? Dengan menganalisis pasal-pasal dalam UUD 1945, kita bisa mengatakan bahwa konstitusi kita menjamin atau memerintahkan kepada seluruh pelaksana negara untuk mewujudkan kelima hak tersebut. Saya melihat konstitusi kita dari sudut pandang ini. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa konstitusi kita sudah mencoba untuk memberikan jawaban agar kelima hak ini terpenuhi. Itu tambahan dari saya.

Boni Hargens

Melihat fenomena Amerika Latin memang menarik. Ada sebuah buku cukup menarik yang berusaha menggugat Fukuyama. Ternyata sejarah tidak berakhir di dalam tangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Sebaliknya, ada tendensi baru bahwa sejarah ini berbalik. Arus balik sejarah ini yang terjadi. Itu bisa kita lihat pada kebangkitan aristokrasi di Rusia, Cina dengan komunisme yang hampir kekal meskipun pasarnya sudah dibuka sejak 1978 era Deng Xioping. Salah satu poin pokok yang ditulis dalam buku tersebut adalah kalau Amerika tidak memahami konteks global, tidak membuka mata, atau tidak mereformasi diri mereka

sendiri maka Amerika Serikat akan diatur oleh dunia lain, oleh orang lain. Dengan kata lain, ia hendak mengatakan, “hegemonimu akan berakhir”. Kemudian, Farid Zakaria bilang, “saatnya kelompok yang tersisa, di luar Amerika, yang akan berkuasa”.

Jika kita melihat fenomena Amerika Latin, maka saya kira tidak lepas dari konteks gereja. Bukankah mereka mayoritas Katholik Roma. Oleh karena itu, sangat wajar jika Huntington tidak suka dan panik. Bukunya yang terakhir, “*who are we*”, bukankah sangat membenci Katholik sebagai sebuah ancaman nasionalisme Amerika. Munculnya Teologi Pembebasan, misalnya, pada dasarnya merupakan kelanjutan reformasi yang dilakukan oleh Konsul Vatikan Kedua. Ajaran tersebut selalu menjadi dasar, dan gereja kemudian berbicara tentang teori perubahan sosial. Gereja yang mendunia, gereja yang menjadi bagian dari proses sejarah, peradaban dan segala macam. Munculnya Teologi Pembebasan untuk mewujudkan ini. Menurut saya, Lugo dan kawan-kawan merupakan bentuk politik dari Teologi Pembebasan. Sehingga dalam konteks Amerika Latin, saya lebih memilih istilah politik pembebasan dibandingkan dengan neososialisme.

Kebangkitan neososialisme di Amerika Latin harus dilihat dalam dua

konteks, global dan domestik. Untuk global, mungkin merupakan *the direction of history*. Dalam konteks domestik, tidak dapat dilepaskan dari politik despotik otoritarian. Kelompok-kelompok yang marginal dan kaum papa yang menjadi *concern* kaum gereja.

Untuk konteks Indonesia, kita akan kesulitan jika hendak mengkaitkannya dengan neososialisme Amerika Latin karenalatarsosialnyaberbeda. Kemudian, ruh yang tadi saya bilang, telah ada di AmerikaLatin, yakni gereja dengan ajaran sosialnya, terus kemudian persoalannya yang sangat regional di sana, dan munculnya Teologi Pembebasan sebagai protes juga terhadap kecenderungan gereja Katholik, gereja yang terlalu sakramental, gereja liturgi. Oleh karenanya, protestanisasi mulai berkembang dalam beberapa tahun belakangan, orang Katholik pindah ke Protestan karena lebih liberal dalam arti dia lebih bebas memperjuangkan hak-haknya. Di Indonesia, proses semacam itu akan sulit. Saya kurang yakin bahwa hal tersebut akan terjadi di Indonesia. Namun, untuk menemukan suatu varian baru dari sosialisme mungkin menarik.

Said Iqbal

Paparan yang telah dikemukakan oleh Boni (Nur Iman Subono) dan Budiman Sudjatmiko sangatlah menarik. Pertanyaan kami adalah apakah yang dialami oleh Amerika Latin dapat pula terjadi di Indonesia? Saya hendak melihatnya dari perspektif buruh. Saya ingin melakukan perbandingan terlebih dahulu antara Indonesia dan Amerika Latin. Pertama, kondisi antara Amerika Latin dan Indonesia hampir sama. Tadi Budiman sudah menyinggung mengenai peran agama. Jika di sana ada Katholik, maka di Indonesia ada Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, tingkat korupsi yang tinggi, masyarakat yang termarginalkan, isu-isu budaya, dan lain sebagainya. Jadi, dalam beberapa hal, ada aspek kesamaan yang memungkinkan sosialisme yang terjadi di Amerika Latin dapat terjadi

di Indonesia. Ketiga, dari segi sejarah, sosialisme sudah hidup di Indonesia, termasuk Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, Sama'un dan sebagainya. Saya pernah membaca bagaimana serikat buruh mengambil peran terhadap gerakan sosial politik ketika masa kolonial penjajahan Belanda. Ideologi mereka jelas, yaitu "Kiri" maupun sosialis. Ada juga yang mengatakan sosialis religius.

Kita bisa membayangkan pada zaman kolonial ketika terjadi Gerakan Buruh tahun 1926 melalui surat kabar Lokomotif, serikat buruh sudah menuntut lampu penerangan yang cukup. Buruh-buruh pelabuhan sudah minta upah yang layak jika mereka harus mengangkut karung, dan jika beratnya lebih dari sekian kilo gram harus ada tambahan. Mereka juga meminta ruang tidur yang tidak lagi bertumpuk-tumpuk.

Pada waktu itu, gerakan buruh tidak hanya berbicara tentang sosial ekonomi, tetapi juga tentang lampu penerangan, upah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Serikat buruh sudah mulai ikut menentukan arah kebijakan dan membidangi lahirnya gerakan sosial politik. Kesadaran-kesadaran kolektif adalah medium yang paling tepat bagaimana sosialisme di Indonesia. Dengan demikian, kita tidak hanya diskusi dalam tataran teori kemudian berhenti. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana medium hidup, dan organisasi yang masif menjadi penting. Terima kasih.

Arie Sujito

Terima kasih. Cerita ini cukup inspiratif untuk melihat Indonesia, apakah sosdem atau sosialisme baru bisa mempunyai nasib baik? Tadi, Mas Imam menyebut perlunya analisis aktor, pejuang politik, organisasi, dan basis sosial perlu nyambung. Kecenderungan para aktor pro-demokrasi yang berhaluan sosial demokrasi sering mengabaikan fungsi sosial organisasi. Pertanyaannya apakah secara obyektif Indonesia belum cukup

untuk mewujudkan sosial demokrasi? Sebetulnya, kalau ditinjau dari segi dialektika yang berlangsung di level kelas menengah kota kecenderungan tinggi untuk diolah, minimal di Jawa juga saya lihat. Hanya saja, yang keliru ditafsir oleh teman-teman, hal tersebut tidak mampu diolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah alat analisis atas dialektika tersebut sehingga sekalipun mereka mengaku garis keras "Kiri", tetapi dalam praktiknya kadang-kadang sangat, bahasa saya, Hegelian. Mereka berusaha mencoba membangun imajinasi, tetapi tanpa basis itu. Ini point pertama menurut saya yang nanti perlu kita lihat. Runtutannya, seperti tadi disebutkan Mas Imam, antara analisis aktor, perjuangan politik, dan struktur organisasi. Dalam kasus Amerika Latin, misalnya, Bolivarian selalu menjadi kekuatan mereka untuk bersama-sama. Kedua, perubahan formasi kekuasaan setelah reformasi harus dihitung. Jika Budiman tadi menyebut perubahan diarahkan untuk mengambil alat-alat produksi musuh, maka sudah pasti akan terjadi kegoncangan. Jika *basic need* sudah disentuh, maka rakyat pun mudah sekali marah. Namun, sejak diperkenalkan demokrasi liberal, hal tersebut mudah sekali dialirkan. Buruh juga begitu. Ini terjadi karena tata kelola (*governance*) cukup banyak mengadopsi hal tersebut sehingga radikalisme mudah ditimpulkan. Oleh karena itu, perubahan formasi sosial ini harus menjadi basis analisis yang penting. Ini karena jika teman-teman tidak memperhatikan perubahan formasi sosial akibat liberalisasi politik, demokrasi, dan seterusnya, maka yang frustrasi bukan rakyat, tetapi aktivisnya sebagai akibat kekeliruan alat analisis yang dipakai. Ketiga, antara analisis masalah dengan solusi banyak yang tidak nyambung. Jika ini sudah *clear*, maka Indonesia sangat luar biasa. Dalam kaitan ini, alat analisis yang digunakan bisa berupa marxian, sosialisme. Selanjutnya, oleh karena formasi kekuasaan sangat liberal,

maka solusinya bisa sangat neolib. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai kesempatan untuk mendekati eksekutif yang "Kiri", tetapi karena keliru analisis maka input pada pengambil kebijakan akan sangat neoliberal karena kesalahan analisis. Saya kira itu saja. Terima kasih.

Budiman Sudjatmiko

Di Amerika Latin ataupun dimanapun gerakan "Kiri" berada, mereka bisa melakukan lompatan dari *social movement* menuju *electoral*, dari *electoral* menjadi berkuasa, dari berkuasa menjadi hegemonik. Itulah gerakan ketika sampai pada tahap kematangan. Chaves muncul dalam proses semacam itu, sedangkan dalam kasus Indonesia, maka prosesnya mirip dengan mitologi Yunani, Sisifus, mendorong batu dari kaki bukit, sampai tengah, dan jatuh lagi ke bawah. Persoalannya di sini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan sebuah gerakan pada akhirnya "bersepakat" menjadi dewasa dan bersatu?

Orang bergerak dengan harapan. Di Amerika Latin, harapan tersebut berhasil diwujudkan secara kongret sehingga mereka merasa bahwa Chaves *workable* karena ada kemenangan-kemenangan kecil yang konkret. Artinya, perbedaan taktik bisa dipertanggungjawabkan. Masih ada kemenangan walaupun sedikit. Itu sudah cukup untuk membuat orang tidak mau lagi mundur ke belakang karena ada sesuatu yang mau dipertahankan atau disepakati. Kemenangan sederhana adalah ketika kita bisa mengkonsensuskan ukuran-ukuran kemenangan-kemenangan tersebut, sekecil apapun yang kemudian kita sepakati dan tidak bisa dimundurkan untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Amerika Latin pada akhirnya bisa sampai pada tingkatan mengkonsensuskan kemenangan tersebut meskipun tidak semua *stakeholder*-nya menyepakati. Namun, pada akhirnya, mayoritas menyepakati bahwa "OK, ini kita anggap

sebagai kemenangan bersama atau kemenangan sebagian dari kita."

Saya tidak terlalu menyinggung organisasi karena asumsinya kita sudah sadar organisasi. Selama 20 -25 tahun, saya berorganisasi. Namun, di kalangan kaum "Kiri" Indonesia, ketika sudah berbicara strategi dan kepemimpinan maka akan selalu menyebabkan bola menggelinding kembali ke bawah. Sementara di Amerika Latin, tidak.

Saya kira ukuran untuk mengukur kemenangan minimum yang sampai sekarang belum pernah tercapai di Indonesia. Ukurannya selalu maksimalis. Jadi, ketika belum sampai ke ukuran maksimal, maka tidak ada satupun mempunyai hak untuk mengklaim kepemimpinan yang rakyat bisa mengikuti sebuah faksi atau gerakan tertentu.

Organisasi memang penting, tetapi organisasi harus dilihat sebagai hasil. Ketika Venezuela mulai melakukan gerakan, jumlahnya tidaklah banyak. Namun, mereka melakukan komunikasi politik dengan berbagai macam kelompok "Kiri" yang lain. Dia melakukan komunikasi politik guna mencapai konsensus. Dalam konteks inilah, menurut saya, analisis politik dan organisasi terjadi. Namun, perlu diingat bahwa buruh pabrik di Amerika Latin ternyata sudah bukan kekuatan utama meskipun dalam konteks Argentina hal tersebut masih berlaku, tetapi itupun ketika pabrik mengalami kebangkrutan.

Di Indonesia, di era de-industralisasi sekarang, melakukan perekrutan buruh pabrik, menurut saya, agak susah. Kalau kita bicara konteks awal abad ke-20 maka gerakan sosialisme yang didorong oleh IFTP, PSPP dan lainnya tidak pernah mencapai sosialisme. Dia hanya berhasil mencapai radikalisme anti-kolonial. Itu berbeda. Sebagai pemantik iya, tapi sebagai alat konsolidasi akhir, penyelaras akhir, adalah soal lain. Oleh karena itu, politik reformatif jangan masuk melalui organisasi. Jikapun dari organisasi, maka organisasi yang membuat ide. Organisasi

adalah hasil dari ide. Sampai sekarang, kita belum mempunyai mekanisme konsensus antar gerakan. Itu saya kira yang paling penting untuk dipikirkan oleh PPR dan Pergerakan Indonesia, dan mungkin dalam diskusi ini kita bisa membangun konsensus. Apakah teman-teman sepakat, misalnya, dengan kemenangan-kemenangan kecil seperti aktivis "Kiri" menjadi anggota parlemen, bupati, gubernur, dan lain sebagainya?

Selama ini, jika kita bertemu, maka konsensus yang berusaha dibangun lucu karena sangat maksimal atau jika tidak, merupakan akibat provokasi karena lahirnya revisi UU Tenaga Kerja, maka hal tersebut dimasukkan skala mikro. Tapi ketika ini berhasil itupun tidak menghasilkan konsolidasi organisasi. Oleh karena itu, kita harus mencari suatu garis tengah, antara tuntutan maksimalis dengan tuntutan minimalis. Ini karena maksimalis tuntutannya akan melahirkan utopisnya. Jadi, kita terjebak diantara dua bentuk ekstrim. Utopis ketika targetnya maksimalis, sedangkan menjadi pragmatisme ketika target minimalis. Makanya, harus dicari sebuah titik ekuilibrium dimana dia membutuhkan banyak kekuatan untuk bisa diklaim oleh berbagai kelompok dan menghasilkan putusan baru, tetapi dia juga terlalu dekat untuk kemudian kita bisa mengorganisasikan segera. Jadi, kita perlu sepakati capaian-capaian yang ada, misalnya, gubernur, bupati, dan lain sebagainya.

Nur Iman Subono

Kalau melihat kasus Amerika Latin, maka jangan melihat setelah mereka berhasil seperti sekarang ini. Lula tiga kali pemilu, dan pemilu di Brazil enam tahun sekali. Jadi, dia 18 tahun berjuang untuk menjadi presiden. Demikian juga apa yang dilakukan Chaves. Ketika Chaves melakukan kudeta pertama kali, maka ia sadar bahwa orang tidak mendukung dia, teman-temannya juga tidak mendukung sehingga yang dia lakukan adalah melakukan *political journey* ke

berbagai tempat di Venezuela untuk belajar dari masyarakat, mendengar dan kemudian mengorganisir. Elemen militer di Venezuela pun juga perlu diperhitungkan sebagai studi kasus. Akademi militer pada waktu Chavez masuk adalah pertama kali pasca-Perang Dingin sehingga tangan Amerika Serikat tidak terlalu banyak terlibat di dalamnya. Ini yang menyebabkan Chavez dan kawan-kawannya mempunyai karakter atau dimensi yang lain dari angkatan-angkatan sebelumnya. Akademi militer ini juga kebanyakan datang dari menengah ke bawah. Jadi, Chavez paham sekali mentalitas prajurit-prajurit yang benar-benar datang dari kelas bawah. Berbeda pada waktu militer masih sangat ditutorial oleh Amerika, kebanyakan anak-anak kelas menengah berada di sana karena jalan cepat menjadi elit, seperti kita juga pada era Orde Baru khususnya, menjadi tentara untuk jalur vertikal menjadi elit.

Morales juga mengalami masa yang panjang untuk menjadi presiden. Empat suku besar yang ada di Bolivia sama-sama termarginalkan, tetapi tidak rukun. Jadi, jangan membayangkan sesama suku yang tertindas terus mereka mempunyai solidaritas. Morales memerlukan waktu yang lama untuk itu. Lawan-lawan Morales mengecam. Morales sendiri sebetulnya bukan yang paling hebat. Dia berasal dari suku kedua terbesar di Bolivia.

Cerita-cerita itu sebetulnya sudah menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin merupakan proses panjang. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita tidak melihat dan berharap bahwa hari ini Indonesia akan mempunyai orang-orang seperti Chavez. Kedua, yang paling penting, pada awal perjuangan, mereka tidak bermain di tingkat nasional. Lula sadar sekali. Ia mulai dari Porto Alegre tempat ia kemudian mempromosikan *participatory budget* karena Porto Alegre memiliki tradisi perlawanan yang panjang. Mereka mulai bermain di tingkat seperti

kabupaten, kemudian lebih tinggi, kota, provinsi, baru nasional.

Di Indonesia, secara umum, biasanya ada tiga model yang berkembang. Pertama yang tadi saya sudah sebut, *crafting democracy*, yakni keterlibatan dari lembaga-lembaga *funding* yang cukup besar. Menurut saya, dalam kasus Amerika Latin, pada tahun 1980/1990-an, inilah yang sering disebut sebagai istilah *ekspor* demokrasi. Jadi, bagaimana merekayasa instrumen-instrumen demokrasi yang ada di negara-negara berkembang seperti UU, partainya, dan parlemennya dengan harapan orang-orangnya kemudian akan lebih baik. Kedua, *diaspora*. Masuk ke partai atau membuat partai politik seperti dilakukan rekan Budiman atau teman Saiful. Itu juga kita bisa katakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Ketiga, biasanya dipilih oleh teman-teman di forum-forum warga, *direct democracy* atau demokrasi langsung. Mereka tidak percaya lagi dengan parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu, mereka membentuk forum warga untuk digunakan langsung ke para pelaksana kebijakan.

Ketiga model ini sebetulnya mempunyai kelemahan. Pertama, persoalan representasi. *Crafting democracy* pada akhirnya hanya dibajak oleh orang-orang lama, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam sistem demokrasi kita harus menerima hal-hal seperti itu. Kelompok-kelompok yang dulu anti demokrasi sekarang justru memanfaatkan instrumen itu dengan baik. Kedua, masuk ke partai politik kendalanya selalu representasinya. Demikian juga model-model *direct democracy* akan berhubungan dengan persoalan representasi, yakni menyangkut kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Meskipun begitu, pada titik ini, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Amerika Latin sebetulnya terletak pada rekonektas antara *social movement* dan praktik politik. Hal ini yang sekarang berada dalam situasi

rentan karena kekhawatiran yang tadi saya sebut sebagai *policy switcher*. Salah satu penyebabnya barangkali *financial terrorism*. Seseorang yang menjabat sebagai presiden akan diuber-uber untuk membayar hutang kepada IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Lula sudah mulai ditinggalkan oleh para petani karena mereka menganggap Lula terlalu banyak memberikan konsesi pada agrobisnis. Para pemodal besar, dan ia mulai mengurangi anggaran sosial karena *financial terrorism* tersebut.

Di sisi lain, meskipun konektas antara *social movement* dan gerakan politik berjalan, tetapi mereka harus berhadapan dengan kekuasaan yang mereka pegang. Ujiannya adalah kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, saya setuju bahwa tokoh penting, dan organisasi juga penting. Kita tampaknya bermasalah dalam hal tokoh ini.

Dalam konteks Amerika Latin, kita menyaksikan munculnya apa yang disebut sebagai solidaritas kawasan. Dalam konteks Asia Tenggara, susah membayangkan bagaimana Indonesia akan mempunyai solidaritas yang sama dengan Singapura mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang sangat berbeda. Kapitalisme di Singapura dapat dianggap membawa kemakmuran, sedangkan Indonesia menciptakan keterpurukan dan keterbelakangan.

Di Amerika Latin, Argentina mampu melunasi hutangnya ke Bank Dunia karena salah satunya jasa Chavez. Kuba tidak menghadapi krisis minyak juga karena jasa Chavez. Dalam hal ini, Kuba mengirim dokter-dokter dan gurugurunya ke daerah-daerah di Venezuela, sedangkan ia mendapatkan harga minyak bersubsidi. Negara-negara Karibia sekarang mengambil model yang sama, dan mereka mendapatkan minyak. Solidaritas inilah yang menjadi mimpi Simon Bolivar yang sekarang berusaha direproduksi terus oleh Hugo Chavez. Kita mempunyai mimpi Seokarno. Oleh karena itu, Saudara Budiman pernah bercerita ketika KTT

Non Blok di Kuba bagaimana seorang Hugo Chaves mengutip nama Soekarno sebanyak tiga kali, mengutip konferensi Asia Afrika sampai tiga kali, sedangkan Pak SBY tidak mengutip satupun, baik Soekarno maupun KTT Asia Afrika.

Saya selalu cerita ke mahasiswa saya, buku John Lee Anderson, yang berjudul *Che Guevara: A Revolutionary Life*, melukiskan bagaimana Che Guevara ketika bersalaman dengan Soekarno ia mengatakan, "Ini orang yang menggetarkan dunia, yang saya selalu bermimpi bisa bersalaman." Sementara sejarah di kita, hampir sama sekali dibunuh oleh Orde Baru. Kita selalu didorong mengingat sesuatu yang jauh. Padahal, kita mempunyai Soekarno, Tan Malaka, dan lain sebagainya.

Ridwan Manoarfa

Saya sependapat dengan Bung Iqbal. Buruh baru sebatas gejala, belum sampai pada sebuah kesadaran. Sebagai contoh, kalangan politisi buruh yang akan masuk caleg berkumpul di YTKI. Pertanyaan yang saya ajukan jika kapitalisme runtuh di Indonesia, maka apa yang dipikirkan buruh? Saya kira jawabannya tidak ada. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa buruh baru beranjak dari proses depolitisasi dan deideologisasi yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, yang hingga saat ini ekornya masih terasa. Akibatnya, ketika gerakan buruh akan masuk ke dalam gerakan politik mereka bertengkar. "Oh, nanti akan terkooptasi oleh partai, kita tidak independen, kita hanya menjadi alat dan seterusnya." Persoalannya kedua adalah jika kita hendak berpolitik maka kita tidak cukup memiliki basis ideologis. Basis ideologi yang digambarkan oleh elit bisa saya gugat. Pemilihan umum bahwa dia diajak partai, beraliansi, dijanjikan, dan kemudian selesai sehingga mereka hanya memanfaatkan momentum.

Menurut saya, pada akhirnya, kembali kepada kawan-kawan apakah bersedia menyusun suatu strategi

pendidikan tentang Indonesia dan gerakan buruh. Ini penting menurut saya. Yang kedua, kita harus membuat peta yang melibatkan basis buruhnya kuat jangan seluruh Indonesia karena besar kemungkinan akan gagal. Kita mempunyai banyak kantong-kantong buruh, dan jika dikoordinasi dengan baik, akan luar biasa hasilnya. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan menggali potensi gerakan buruh yang ada.

Saya hendak mengajukan kritik tentang Fadel Muhammad ketika ia mengatakan, "Saya ini hidupnya habis dengan suasana kapitalisme dan kapitalisme tidak mensejahterakan rakyat. Saya sekarang sosialisme." Dia katakan hal itu di depan *floor* yang begitu banyak. Namun, saya sendiri mengatakan apakah ia sudah sampai pada kesadaran sosialisme atau hanya sebagai gejala yang ikut-ikutan terhadap suasana yang sedang membalik arus. Ini karena persoalannya adalah apakah basis sosial yang dia bangun ada atau tidak?.

Menurut saya, Fadel Muhammad adalah seorang elit yang datang dari Jakarta dan kemudian membeli seluruh orang miskin. Politisi yang bodoh-bodoh itu dibeli dengan proyek-proyek negara. Selanjutnya, dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakannya kita mengatakan bahwa ia seorang sosialis. Menurut saya, perlu dipersoalkan. Kebetulan saya orang Gorontalo. Kebijakan harga, yang tadi Pak Amir Siregar, menyangkut jagung. Persoalannya adalah bagaimana dengan struktur tanah di sana apakah dikuasai oleh beberapa elit atau oleh rakyat yang terbagi dengan baik. Kalau seandainya oleh tuan tanah-tuan tanah, maka semuanya tidak ada artinya. Kemudian, apakah tingkat harga itu betul-betul ada dalam konteks petani atau dalam konteks pedagang? Sayangnya, ini tidak dicek betul. Oleh karena itu, ia tidak bisa mengatakan begitu saja sebagai seorang sosialis.

Mengenai gerakan buruh persoalan

utamanya terletak pada basis ideologi. Jika gerakan buruh masuk ke politik tanpa basis ideologi yang jelas, maka gerakan tersebut akan menjadi bersifat pragmatis dan terfragmentasi. Mereka akan senantiasa bertengkar sehingga hasilnya seperti sekarang ini. Tokoh-tokoh buruh begitu banyak dicalonkan, tetapi begitu banyak buruh yang tidak memilih.

Nurul Qoiriah

Tadi, saya mencatat tiga hal yang diungkapkan. Yang dikemukakan dalam konteks Indonesia ini jauh dari apa yang terjadi di Amerika Latin, bisa jadi dalam proses pemilu di Indonesia. Sampai hari ini, saya belum bisa melihat apakah ketika rakyat ikut nyoblos dalam pemilu maka mereka memilih PDIP karena Budiman atau karena alasan lain? Artinya, mereka belum memiliki sebuah kesadaran bahwa mereka memilih karena hal tertentu atau mereka sebenarnya memilih hanya karena supaya tidak dibilang PKI, misalnya, atau mereka memilih karena tidak enak dengan Pak RT-nya, dan sebagainya. Dalam proses pemilu di Indonesia, ketika kampanye berlangsung, para peserta tidak mengikuti pidato pemimpinnya, tetapi justru berkonvoi dengan kendaraan bermotor. Ini menunjukkan tingginya massa mengambang. Kesadaran kritis belum muncul. Dalam konteks Amerika Latin, di dukung lebih 40% oleh suara rakyat, dan dalam konteks Indonesia tampaknya ini sesuatu yang mustahil. Tadi, dikatakan negara sebagai penyeimbang kekuatan pasar. Saya melihat ini merupakan konsepsi liberal, yang dalam pemahaman saya belum mungkin dalam konteks Indonesia. Pasar justru mengontrol negara, dan ini tentunya tidak bisa serta merta hanya menyalahkan, "Oh, SBY yang tidak becus dan sebagainya". Namun, dalam konteks ini, kita harus melihat bahwa ada proses kompetisi diantara negara berkembang. Sebagai hal kecil saja, dimana ini sangat *related* dengan kehidupan saya sebelum

saya kembali ke sini, soal buruh migran. Ketika buruh migran Indonesia meminta gaji sesuai dengan standar di Hong Kong seperti layaknya buruh Filipina menerima upah, Kedutaan Indonesia mengatakan dengan *simple*, "what the hell are you asking about?" Kalian itu tidak *educated*, tidak bisa Bahasa Inggris, dan jika kalian ingin meminta gaji yang sama dengan orang-orang Filipina maka tidak ada satu pun orang yang akan meng-*hire* TKW dari Indonesia. Kita berkompetisi. Oleh karena itu, kalian jangan demonstrasi atau berbuat macam-macam karena nanti kalian tidak bisa datang ke Hong Kong. Pemerintah Hong Kong akan mengambil TKW dari Filipina dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada proses kompetisi yang terjadi diantara negara berkembang atau bahkan terjadi diantara negara Asia sendiri yang berakibat negara mudah sekali dikontrol oleh pasar karena tidak ada solidaritas diantara negara Asia itu sendiri sebagaimana terjadi di Amerika Latin.

Yang ketiga mengenai partisipasi

rakyat. Dalam konteks ini, saya mungkin akan melihat secara positif. Otonomi, menurut saya, bisa menjadi peluang kendati hal ini banyak dimanfaatkan oleh raja-raja kecil yang ingin menjadi raja di daerah-daerah. Meskipun demikian, ini tidak berarti tidak dapat diubah. Kita hanya memerlukan proses yang mungkin agak panjang. Mengenai *outsourcing* yang tidak akan memungkinkan gerakan buruh di Indonesia berkembang, saya ingin mengatakan bahwa baru saja saya menyelesaikan disertasi tentang buruh dan saya banyak melihat *outsourcing*, yang sebenarnya hukum internasional dan bukan lagi UU Indonesia, telah mensyahkan gerakan buruh menjadi tidak besar. Jadi, yang mesti kita lihat secara clear adalah proses penghambatan gerakan buruh. Reformasi hukum perburuan di Indonesia yang *leading* adalah ILO.

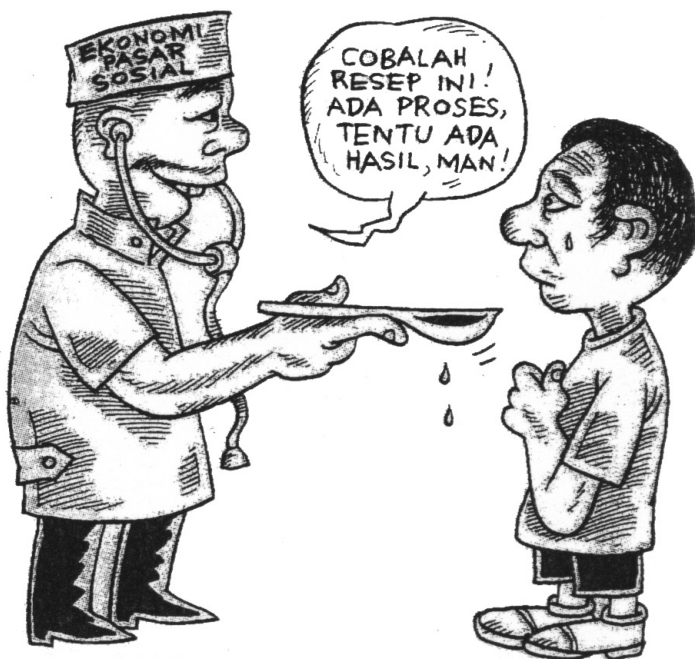
Tadi ada sebuah *statement* bahwa buruh harus tidak ditinggalkan. Mungkin *statement* ini juga bisa dibalik. Jangan-jangan gerakan buruh yang sudah kritis, ada kelompok-kelompok buruh kritis

yang saya lihat di Indonesia ini, yang justru anti dengan Partai Politik karena sejarah bahwa tingkat kepercayaan dengan partai masih sangat rendah. Dalam konteks ini, saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari teman-teman gerakan buruh migran di Hong Kong ketika mereka bilang, "mengapa kita tidak membuat partai?", lantas saya jawab, "Saya bukan orang yang bisa memfasilitasi kalian, kenapa kalian tidak berusaha berkomunikasi dengan gerakan buruh di Indonesia?". Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan rakyat ini belum digarap dengan baik. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan Amerika Latin masih sangat jauh. Ketika saya pergi ke beberapa negara dimana buruh banyak migran Amerika Latin, maka terlihat mereka sudah tergarap dengan baik. Dalam hal ini, mari kita lihat di Indonesia. Manakah partai politik yang secara *clear* dan sistematis melakukan proses pendidikan bahkan termasuk buruh migran di luar negeri yang jumlahnya lebih dari 4 juta itu. Ada PKS melakukan itu di Malaysia, tetapi hanya untuk dimobilisasi saja. Namun, tidak ada proses edukasi yang mereka lakukan. Ini sangat berbeda dengan di Amerika Latin dimana gerakan buruh sudah tergarap dengan baik. Bahkan, mereka membantu gerakan-gerakan rakyat di negaranya. Ini terjadi mungkin karena buruhnya yang belum mempunyai kesadaran atau juga karena mereka belum digarap dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih

Tavip

Menyambung pernyataan Bang Amir, apakah kita sepakat bahwa negara kita adalah negara sosialis sebagai apa yang sudah dituangkan dalam UUD '45 Pasal 27-34? Persoalannya adalah jangan-jangan kita masih gamang untuk mengatakan negara kita sosialis atau mungkin kita masih gamang bahwa kita adalah kaum sosialis.

Peserta



Bagaimana saat ini pun, kita belum berani mengatakan, “Eh, Faisal Basri, Anda presiden?”, tidak ada yang berani. “Eh, kau Chalid Muhammad, kau jadi presiden,” tidak ada yang berani.

Konstitusi kita mengatakan itu?

Tavip

Iya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah jika PDIP yang kita representasikan atau Megawati jadi presiden, apakah kita akan mengatakan bahwa negara kita dipimpin oleh orang-orang sosialis? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya pikir perlu kita angkat ke permukaan untuk menyakinkan sejauh mana tahapan-tahapan pencapaian yang diraih kaum sosialis ini sudah mencapai suatu titik kemenangan. *Nothing* buat saya kalau sekedar anggota DPR dianggap kita sudah meraih sesuatu yang berarti bagi kita karena penjelasan Budiman tadi mengatakan bahwa kemenangan itu presiden, bukan seorang anggota dewan. Berikutnya, berdasarkan pengalaman, saya melihat bahwa tingkat konsolidasi dari semua elemen gerakan pro-demokrasi yang berbasis sosialis atau selalu ada yang mengatakan ini hanya kegenitan politik saja. Kita mungkin telah begitu banyak menghimpun aktivis yang katanya sosdem, tetapi Fajrul Rachman tidak didukung. Fajrul Rahman mungkin tidak muda lagi atau kita begitu sulit untuk mengatakan tokoh yang bisa disepakati sebagai *icon* pergerakan, *icon* perubahan?

Sementara itu, masuknya para aktivis buruh ke politik baru gejala yang

bisa kita katakan sebagai arus sosialisme. Faktanya ketika UU No. 13 Tahun 2003 disahkan, konflik antaraktivis buruh luar biasa. Dalam konteks *outsourcing*, misalnya, sebagian mengatakan mendukung sebagian mengatakan menolak. Dalam situasi semacam ini, bagaimana mungkin kita akan mengusung sebuah gagasan sosialis jika untuk hal-hal yang sifatnya parsial kita masih terus berdebat. Kondisi inilah yang kadang kala membuat saya pesimis ditambah dengan masing-masing aktivis asyik dengan agendanya sendiri-sendiri. Teten Masduki, misalnya, asyik dengan ICW-nya dan Usman Hamid dengan Kontrasnya. Lantas, kapan kita akan bersatu?

Nah, saya pikir kita kehilangan sosok atau icon yang bisa menjadi semacam panutan, simbol perjuangan sehingga semua bergerak ke arah yang sama. Itu masih sangat sulit. Bagaimana saat ini pun, kita belum berani mengatakan, “Eh, Faisal Basri (Pergerakan Indonesia-red) Anda presiden?”, tidak ada yang berani. “Eh, kau Chalid Muhammad (Aktivis Lingkungan-red) kau jadi presiden,” tidak ada yang berani. Semua masih gamang. Ini berarti bahwa jika kita mau mengusung sebuah ideologi maka kita harus memperhatikan dulu struktur, basis perjuangan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka hanyalah omong kosong. Meskipun demikian, mudah-mudahan jurnal Sosdem bisa memulai sesuatu yang signifikan.

Azman Fajar

Saya merasa cukup beruntung bahwa saya secara pribadi tidak dekat dan tidak ada relasi secara pribadi dengan Hugo Chavez, Lula, atau lainnya seperti Mas Boni atau Budiman. Oleh karena itu, mudah-mudahan karena tidak dekat dengan beliau-beliau maka bisa sedikit lebih objektif atau malah ngawur.

Saya cukup optimis bahwa sosialisme bisa jalan di Indonesia. Michael Newman menyitir bahwa sosialisme di Eropa,

Swedia itu merupakan hasil pergulatan dari revisionisme ala Edward Bernstein dan Bolshevik. Sosdem memilih cara parlemen untuk mendirikan sosialisme sementara komunisme ala Bolshevisme dengan revolusi sosial. Jadi, ia melihat bahwa ternyata perjuangan melalui parlemen suatu hal yang mungkin terjadi untuk menjalankan sosialisme. Di Indonesia, mungkin saja itu juga terjadi. Bahkan di Swedia, ada beberapa tema sentral yang diusung dalam rangka menghidupkan sosialisme, misalnya, mereka meyakini sebuah demokrasi yang disebut dengan demokrasi integrasi. Kemudian, negara sebagai rumah dari masyarakat atau *Folkhemmet* dalam bahasa mereka harus mempunyai kesetaraan dalam sosio ekonomi dan efisiensi dalam ekonomi. Kemudian, ekonomi pasar harus dikontrol secara sosial dan juga ekspansi sektor publik yang didasarkan pada kebebasan memilih. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa sosialisme atau neososialisme secara hitam putih antara pilihan tentang sosialisme yang dibuat Marx atau sosialisme yang lain-lain, yang merupakan pengembangan-pengembangan atau justru antitesis dari Marx sendiri. Khusus untuk Amerika Latin, saya melihat memang tidak bisa dilihat cerita suksesnya sekarang seperti tadi dikemukakan Mas Boni. Namun, kita harus melihat kembali ke belakang pada era tahun 1950 ketika Raul Prebisch dari ECLA (*Economic Commission of Latin Amerika*) menuliskan artikelnya berdasarkan rujukan kritik dari Hans Singer tentang tesis mereka. Saya melihat hal itu sedikit banyak menimbulkan gerakan yang disebut *new left* atau strukturalis dengan teori dependensinya. Theotonio Dos Santos, Paul Barran melalui *The Political Economy of Growth*, kemudian Andre Gunder Frank, Immanuelle Wallerstein, Samir Amin, dll. Sementara di Indonesia, kita hanya mendapati Sritua Arif dan Adi Sasono.

Fenomena Amerika Latin sudah

terjadi sejak tahun 1950-an sehingga wajar jika mereka bisa mencapai neososialisme seperti sekarang. Dalam konteks Indonesia, apakah prasyarat ini sudah dipenuhi? Menurut saya, rezim kita sangat *developmentalis*. Dulu, kita mendengar *The Stages of Economic Growth* ala WW. Rostow. Pertumbuhan adalah *the first thing*, pertumbuhan 7% harus dicapai supaya kita tidak ketinggalan dibandingkan dengan Korea Selatan. Lebih parah lagi, stabilitas harus diciptakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengganggu stabilitas harus dihilangkan sehingga terjadi de-ideologisasi. Pada zaman Soeharto, orang-orang yang berani berideologi sangat sedikit dan eksklusif, sedangkan sisanya adalah orang-orang yang sangat pragmatis. Dulu saya merasa mewah turun ke jalan untuk demo, dulu saya merasa senang ketika dikejar-kejar intel, sekarang bukan barang mewah lagi, semua orang sudah bisa.

Mengenai gerakan buruh itu sendiri, jelas sekali bahwa stabilitas yang diusung telah membunuh Marsinah. Lantas, bagaimana langkah pemerataan pada zaman Orde Baru? Pada zaman itu, pemerataan harus dilakukan, tetapi juga tidak tercapai karena rezim *developmentalis* banyak mengutang sehingga pada akhirnya justru *collapsed*. Saya sepakat dengan pemikir-pemikir *new left*, yang berusaha diangkat oleh Sritua Arif meskipun gagal karena kuatnya orang-orang dari gerakan neoliberal yang menjalankan perekonomian Indonesia. Menyitir Michael Newman kembali, saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang seharusnya bisa dipenuhi untuk mencapai *new socialism*. Pertama, sosialisme seharusnya selain bersifat lebih demokratis, baik dalam hal keorganisasian maupun dalam hal institusi. Kemudian, dia menyarankan bahwa kaum sosialis saat ini harus bisa mengembangkan strategi ekonomi yang bersifat sustainable, tidak hanya program-program pendek kemudian berhenti. Dalam hal ini, harus ada

jawaban-jawaban konkret atas masalah yang ditimbulkan kapitalisme karena kalau pun ditunggu belum tentu kapitalisme bangkrut. Ia juga tidak akan pernah mencapai kesempurnaan untuk membagi kesejahteraan kepada para buruh.

Imam Yudotomo

Tidak akan pernah karena basis kapitalisme itu bukan didasarkan buruh, Jadi, jangan mendambakan bahwa kapitalisme akan mensejahterakan buruh.

Azman Fajar

Inilah pokok persoalannya. Ada teman saya yang mengatakan, "Ya udah kawan-kawan buruh jangan bergerak dulu biarkan saja kapitalisme matang dulu nanti akan sejahtera sendiri." Menurut saya, tidak bisa. Justru buruhlah yang harus bergerak, dan jangan menunggu kapitalisme matang.

Saiful Bahari

Saya justru ingin mengajukan pertanyaan, yang sebenarnya menjadi kegelisahan bersama. Kalau disebutkan jalan Amerika Latin dengan istilah populisme, maka pertanyaan mendasar sebetulnya adalah apakah jalan populisme yang terjadi seperti Amerika Latin dapat menuntaskan proyek sosialisme? Pertanyaan kedua apakah memang proyek sosialisme itu bisa bergantung sepenuhnya pada demokrasi liberal? Saya kira ini perdebatan yang cukup panjang terhadap bagaimana proyek sosialisme itu dijalankan. Kalau kita lihat dalam konteks historisnya Amerika Latin, maka memang ada begitu banyak perbedaan, baik geo politik atau juga sejarah mereka. Namun, ketika Amerika Latin di bawah rezim represif pada tahun 1950an dan 1960an meskipun cukup kejam karena banyak juga yang dibantai, tetapi gerakan "Kiri"nya tidak pernah punah. Termasuk juga partai-partai "Kiri"nya. Itu yang membedakannya dengan kita

di sini. Di Indonesia, tidak hanya partai yang musnah, tetapi ormasnya pun punah.

Nah, saya pernah bertemu dengan beberapa aktivis, sebelum Chaves menang dan sebagainya, mereka bercerita bagaimana partai tetap bekerja di tengah situasi represif. Dulu, mereka mengatakan menggunakan strategi 70:30, 70 artinya ofensif, gerilya, sedangkan 30 pendidikan massa dan pengorganisasian. Namun, pada tahun 1970-an, ada juga satu buku yang bicara tentang transformasi gerakan-gerakan "Kiri" di Amerika Latin. Cukup menarik ketika mereka kemudian mengubah itu menjadi 30:70. 30 defensif dengan menggunakan perjuangan bersenjata, sedangkan 70 adalah pendidikan massa.

Menariknya lagi, gerakan sosial yang muncul di sana memang berbeda dengan gerakan sosial di sini. Gerakan sosial di Amerika Latin bisa nyambung antara gerakan sosial dengan partai progresif. Ini karena gerakan sosial di sana dibangun oleh elemen-elemen partai bawah tanah. Itu yang membedakan. Di sini, gerakan sosial dibangun oleh LSM dan aktivis mahasiswa sehingga hasilnya berbeda. Oleh karena itu, dalam konteks Amerika Latin, berapa tahun mereka mengorganisir masyarakat Indian, misalnya, maka jawabnya bertahun-tahun sehingga hasilnya sekarang baru terlihat.

Terakhir, dalam hal apa kemudian perbedaannya jalan sosialisme baru dengan jalan sosialisme lama? Menurut saya, ada sesuatu hal yang paling penting, yang tadi sudah disebut walaupun tidak eksplisit bahwa hampir rata-rata kalau tidak ada satu hubungan partai politik yang sangat kuat ketika mereka menang, yang terjadi adalah koalisi. Chaves baru menyadari ketika kekuatannya mulai pudar sehingga dia menghimpun kekuatan "Kiri", dan Lula sudah mulai ditinggalkan oleh blok-blok politiknya. Yang terjadi sebetulnya memang ada *land reform*, ada nasionalisasi, tetapi sebetulnya

bunga-bunga dari revolusi, belum menjadi satu proyek sosialisme yang sesungguhnya. Persoalannya terlepas basis ideologi seperti di Vietnam atau Cina. Transformasi yang begitu mendalam terjadi yang mewujudkan sosialisme dilakukan oleh mesin partai. Jadi, jelas. Jika ini tidak terjadi, maka yang terjadi memang redistribusi tanah seperti di Brazil, tetapi tidak terjadi transformasi sosialisme di sektor agraria. Itu kemudian banyak yang tidak puas dan sebagainya. Demikian juga dugaan saya, nasionalisasi yang akan datang dan sekarang sedang terjadi akan sulit melakukan transformasi kalau tidak ada dukungan dari partai politik atau organisasi yang cukup kuat. Nah, inilah pekerjaan rumah kita terbesar, yang dalam konteks Amerika Latin adalah problem mereka.

Saya kira ini memang masih merupakan jalan yang panjang. Menurut saya, merupakan kebutuhan mendasar kita, terlepas dari bunga-bunga revolusi di Amerika Latin. Namun, yang paling penting adalah bagaimana partai atau elemen-elemen itu bekerja baik pada masa-masa represif, dan pada masa-masa kemenangan awal sekarang ini. Saya kira itu yang menjadi penting buat kita. Oleh karena itu, untuk kasus di Indonesia, proyek sosialisme tidak mungkin terjadi jika tanpa ada kekuatan politik, organisasi, dan partai politik.

Budiman Sudjatmiko

Soal konsensus. Ini penting. Dalam konteks Amerika Latin, mereka mempunyai konsensus dalam bentuk tokoh yang melakukan pemberontakan. Chaves, misalnya. Argentina mempunyai konsensus bahwa jika mereka melaksanakan proyek sosialisme dengan jalan terorisme tidak akan laku. Oleh karena itu, mereka harus membuat proyek sosialisme di luar terorisme. Di Nikaragua, mereka mempunyai konsensus Sandinista dan itu tidak perlu disangkal lagi. Itu ada dalam setiap gubuk petani di sana, Sandino. Mari kita

lihat konteks Indonesia. Bagaimana kita melihat Soekarno, Tan Malaka, ataupun Sutan Syahrir? Lantas, mari kita bertanya kepada para petani dari 100 juta orang Indonesia, apakah mereka lebih mengenal Soekarno atau Tan Malaka, Sultan Syahrir atau Sukarno? Sesederhana itu. Dalam *gubug-gubug* para petani, kita akan menemukan lebih banyak gambar Bung Karno dibandingkan dengan Tan Malaka atau lebih banyak gambar Bung Karno ketimbang gambarnya Thomas Meyer, misalnya. Ini berarti bahwa konsensus ada dua tingkat, yakni konsensus yang sudah ada (*embedded*) dalam kesadaran rakyat dan kemudian kelompok intelektual progresif yang bersepakat bahwa kita menghormati konsensus sosial yang sudah tertanam di hati rakyat. Saya kira itu merupakan konsensus. Oleh karena itu, konsensus *embedded* dalam kesadaran rakyat, dan tidak perlu rekayasa. Orde Baru melakukan *de-Soekranisasi*, tetapi gagal.

Abdus

Diskusi ini menarik. Namun, pertanyaannya adalah sosialisme apa yang sebenarnya kita bicarakan? Saya mungkin hendak melaporkan saja. Di Istanbul, ada pertemuan gerakan masyarakat adat di tingkat internasional setiap tahun di PBB dan salah satu peserta yang datang adalah Evo Morales. Diskusinya sebenarnya sama, yakni tentang *ideological clarity*. Itu sesungguhnya karena tanpa itu sebenarnya gerakan-gerakan sosial tidak bisa berkomunikasi, dan itu yang terjadi di Indonesia. Apakah saya bisa berkomunikasi secara politik dengan Budiman? Saya ragu-ragu, apa sesungguhnya sosialismenya dia. Kita harus bicara pada level itu. Menurut saya, dan ini selalu diingatkan teman-teman dari Amerika Latin, "Hei sosialisme itu variannya banyak. Hei, demokrasi itu variannya lebih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan bicara sosialisme dan demokrasi tanpa konteks." Sebenarnya

cuma itu. Oleh karena itu, mengapa kemudian gerakan masyarakat adat diterima dalam gerakan sosial "Kiri" di Amerika Latin? Kita saja belum diterima karena penuh kecurigaan karena gerakan masyarakat adat di beberapa negara itu belum punya *ideological clarity*, dan itu disadari di AMAN termasuk yang saya geluti sehingga komunikasi politik antar sektor itu baru bisa berjalan. Menariknya, Evo Morales bukan sebagai pemimpin tertinggi gerakan masyarakat adat di Bolivia. Ada komandante nya. Dia sebenarnya dalam daftar gerakan masyarakat adat bukan komandante. Namun, ia adalah komunikator politiknya dengan sektor-sektor lain. Persoalan yang kita hadapi bahwa kita tidak mempunyai yang demikian itu. Jika saya ingin berkomunikasi dengan gerakan buruh, maka siapa juru bicara dari gerakan buruh? Jika saya berkomunikasi dengan gerakan petani, maka dengan siapa saya harus bicara? Juru bicara tidak clear di kita. Jadi, terima dulu bahwa sosialisme itu variannya banyak, demokrasi juga variannya banyak. Pertanyaan berikutnya mengapa gerakan masyarakat adat kemudian memperkaya dan bahkan dianggap sebagai faktor penting dalam kesuksesan Amerika Latin? Ini karena ketika mereka bingung mengenai bentuk sosialisme macam apa, sosialisme level komunitas, sosialisme adat. Sosialisme adat menyentuh hal paling mendasar, yakni *communal right*, *collective right* untuk alat-alat produksi yang namanya tanah, hutan. Hak-hak komunal penting dipertahankan karena menghambat kemungkinan terjadinya pasar tanah yang bebas. Jadi, di Amerika Latin, terjadi trend dimana organisasi-organisasi petani berubah menjadi organisasi masyarakat adat (*indigenous movement*) karena mereka mengalami kekalahan terus menerus. Setelah tanah dibagi, disertifikasi menjadi tanah-tanah individu, dibeli lagi oleh orang kota sehingga mengakibatkan kekalahan yang terus-menerus. Itu yang dialami

oleh BPRPI sehingga oleh teman-teman federasi serikat petani, "Oh, BPRPI diambil oleh AMAN," Bukan, sekali lagi bukan. Itu kesadaran karena mereka kalah terus. Setelah *reclaiming* per satuan ribuan hektar, dibagi-bagi maka kembali lagi orang kaya yang beli. Memang ada problemnya, tetapi itu terjadi karena ada komunikasi. Buruh dengan gerakan masyarakat adat di sana. Buat buruh-buruh tambang, masyarakat adat ini sumber malapetaka karena banyak menutup pabrik *plywood*. Ini terjadi karena tidak ada komunikasi. Menurut saya, kita organisasi masyarakat adat. Kita berkomunikasi dengan para juru bicara, dan ini harus ada yang memfasilitasi. Di Amerika Latin, ada para pastur-pastur. Di kita, tidak ada. LSM banyak tergantung pada lembaga donor. Persoalannya adalah bisa tidak LSM yang ada sekarang bebas dari kepentingan-kepentingan yang mendanainya karena pastur di Amerika Latin lebih independen karena kalau pastur jelas lebih bebas.

Kasus Amerika Latin memang lama, 35 – 45 tahun. Tapi persoalan ada fungsi-fungsi fasilitator yang terbebaskan dari kepentingan-kepentingan. Bagaimana mempertemukan AMAN dengan organisasi-organisasi tani? Kita juga menghadapi krisis ideologi. Saya membaca buku hitamnya PPR, saya tahu persis ini sosialisme, tapi PPR sendiri tidak merasa yakin ini sosialisme atau bukan. Artinya, perlu kepercayaan diri untuk mengatakan ini yang kita sebut sosialisme dan sosialisme itu kita kembangkan variannya sesuai dengan konsep kita masing-masing, untuk buruh, masyarakat adat, dan lain sebagainya sehingga lebih produktif, tidak bertengkar soal taktik-taktik karena tidak produktif. Menurut saya, point-nya adalah bagaimana menjalinnya. Saya pikir itu saja untuk sementara.

Imam Yudhotomo

Saya sependapat dengan Bung Budiman soal Soekarno-Tan Malaka, karena pada waktu proklamasi diakui

oleh Tan Malaka dan Syahrir bahwa faktor objektif itu ada di Soekarno, meski secara subyektif ada di Tan Malaka atau Syahrir.

Faktor subjektifnya Tan Malaka sama Syahrir, tapi objektifnya Soekarno. Menurut saya, kita hanya memerlukan adanya redefinisi dari marhaenisme yang ada sekarang. Saya rasa ini menjadi tugas penting karena Soekarno itu unsur religiusnya banyak, sosial demokrasinya ada, dan unsur anarkhisnya juga ada. Oleh karena itu, menurut saya, harus ada *clarity* usaha yang kita lakukan guna merangkum karena sebenarnya ini cermin ketidakdewasaan kita. Ini sangat berbeda dengan zaman Syahrir dan Tan Malaka yang cukup mempunyai kedewasaan politik. Ia tahu bahwa dia hebat, tetapi tidak mampu untuk melakukan proklamasi maka ia serahkan kepada Soekarno. Jadi, kedewasaan berpolitik yang kita butuhkan.

Amir Effendi Siregar

Saya cuma tambah sedikit saja supaya lebih *clear*. Saya sepakat tadi dengan apa yang disebut *ideological clarity*. Namun, itu memerlukan proses yang terus menerus. Nah, beberapa indikator utama kita sudah tahu. Ini berarti melalui beberapa indikator utama kita dapat mencoba mencari jalan yang disebut *ideological clarity*. Selanjutnya, dalam proses semacam itu, ada beberapa hal yang disebut *solidarity*. Ini memang harus dilakukan. Kita tidak bisa seperti dikatakan oleh Budiman mengenai capaian-capaian yang bersifat maksimalis dan minimalis. Maksimalis cenderung menjadi utopis, sedangkan minimal cenderung sangat pragmatis. Dalam hal ini, kita memerlukan konsensus. Termasuk dalam hal ini, jika ada orang yang sudah merasa bahwa dirinya melakukan tindakan sosialis, maka kita tidak perlu bilang, "Ah *you* bukan sosialis". Menurut saya, itu tidak akan memberi nilai tambah. Seharusnya, jika ada yang mengatakan, "Wah saya sudah melakukan ini, saya

ingin jadi sosialis", maka harus diisi. Oleh karena itu, jika, misalnya, *trend*-nya sudah memperlihatkan diri untuk mengarah ke sosialisme maka harus kita dukung. Menurut saya, itulah sebenarnya yang harus dilakukan. Kemudian, kita mencari titik temu antara yang maksimalis dengan yang minimalis yang disebut dengan konsensus tadi. Jadi, *trend* saupun harusnya sudah di-*support*. Kita harus mencoba mencari konsensus kemudian baru kemudian bicara partai.

Peserta

Barangkali, figur menjadi belakangan. Namun, figur yang bisa mencapai kemenangan minimal itu harus didukung. Moralez bukan yang utama. Oleh karena itu, setiap individu harus saling berpacu dan jangan saling menegasikan. Siapa yang bisa menang maka kita beri tepuk tangan.

Amir Effendi Siregar

Kesimpulannya saja. Perlu adanya *clarity*, efektivitas yang tidak perlu maksimalis, konsensus, dan terakhir bicara partai. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Luar biasa. Saya kira banyak hal yang kita dapatkan dalam diskusi ini. *Applause* untuk kita semua, dan terima kasih.



Resume Diskusi

Jalan “Sosialisme Baru” Am Mungkinkah untuk Inc



Fenomena yang terjadi di Amerika Latin memang sangat menarik, yang barangkali disebabkan oleh sejarah ideologi, proses, perkembangan, diskusi, wacana dan sebagainya. Dalam hal perdebatan ideologi, misalnya, kasus Amerika Latin menjadi inspirasi lahirnya bagi pemikir-pemikir dependensi seperti Paul Barran, Fernando Cardoso, Samir Amin, atau Immanuel Wallerstein. Sejarah pemikiran inilah yang turut menopang kebangkitan neososialisme di Amerika Latin. Menurut Ivan A. Hadar, perdebatan teoritik dan ideologis semacam itu dapat dibandingkan dengan Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa tersebut, lahir orang-orang seperti Tan Malaka, Sutan Syahrir, Moh. Hatta, Soekarno, dan lain sebagainya.

Perjalanan pemikiran dan juga gerakan ini, membuat kasus Amerika Latin menarik untuk didiskusikan. Setidaknya, ada tiga pertanyaan dasar yang layak dijawab berdasarkan pada kasus kebangkitan neososialisme di Amerika Latin. Pertanyaan pertama adalah apakah sosialisme melakukan transformasi terkait dengan perkembangan kapitalisme itu sendiri dan mungkin saja berbeda dengan sosialisme “ortizen”? Pertanyaan kedua,

Amerika Latin: Indonesia?

apakah sosialisme baru di Amerika bersifat homogen ataukah heterogen, dalam pengertian ada nuansa-nuansa yang berkembang seiring kebangkitan sosialisme baru tersebut. Barangkali juga karena disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pemimpin di masing-masing negara, aktor-aktor dan pemikiran-pemikiran di belakangnya? Ketiga, secara kontekstual, bagaimana jika hal tersebut dibawa ke Indonesia mengingat bibitnya sudah bersemai di Indonesia?

Perkembangan Neososialisme Amerika Latin

Konteks Politik: Demokratisasi

Sekarang ini, tidak kurang dari 10 negara melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme Amerika Serikat. Ini merupakan fenomena yang cukup mengejutkan karena sebelumnya Amerika Serikat mempromosikan demokrasi perwakilan liberal dan pasar bebas neoliberal di wilayah-wilayah tersebut. Inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin di Amerika Latin yang saat ini berkuasa. Seperti dikemukakan Nur Iman Sobono, dalam demokrasi perwakilan, terdapat prinsip mayoritas. Neoliberalisme telah menciptakan

rakyat miskin yang semakin banyak, dan orang-orang inilah yang pada akhirnya dipolitisasi dan mendapatkan pendidikan politik oleh orang-orang seperti Evo Morales, Hugo Chaves, ataupun Rafael Correa.

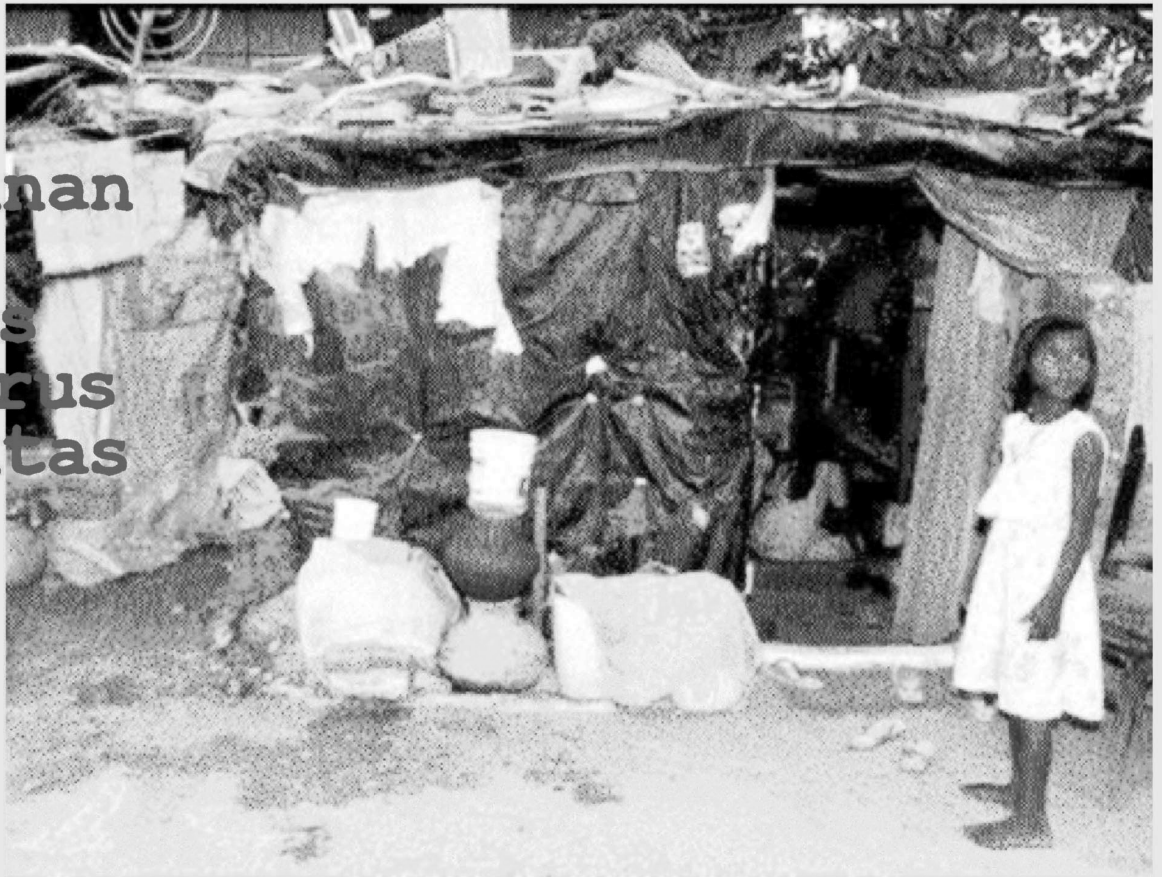
Meluasnya demokratisasi di Amerika Latin yang pada akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang seperti Chaves, pada dasarnya, menurut Nur Iman Subono, bukanlah merupakan monopoli Amerika Latin. Namun, merupakan bagian dari *trend* besar yang sering disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Nur Iman Subono mengatakan bahwa ditinjau dari konteks politik, apa yang sedang terjadi di Amerika Latin juga terjadi di tujuh wilayah dunia pada abad ke-20. Gelombang demokratisasi ini dicirikan oleh (1) keterbukaan politik (*political openness*), (2) demokratisasi dari atas (*democratization from above*), (3) rekayasa pelembagaan demokrasi liberal (*crafting liberal democratic institutions*), (4) demokrasi dari bawah (*democracy from below*) yang dicirikan oleh: demokratisasi demokrasi (*radically democratizing democracy*), rekonektas gerakan sosial dengan tindakan politik formal, dan gerakan demokrasi yang bersifat transnasional. Lebih jauh, gelombang

demokratisasi yang menerpa Amerika Latin tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: gelombang demokratisasi dimulai di Spanyol selanjutnya Portugal, Amerika Selatan, negara-negara Asia Tenggara dan Timur dengan menyisakan Indonesia dan Cina, Negara-negara Eropa Timur dan terakhir Afrika. Berakhirnya pemerintahan *Apartheid* di Afrika Selatan dapat dianggap sebagai puncak arus demokratisasi gelombang ketiga tersebut. Dengan melihat rute semacam ini, masih menurut Nur Iman Subono, apa yang terjadi di Amerika Latin sebetulnya bagian dari gelombang besar tersebut.

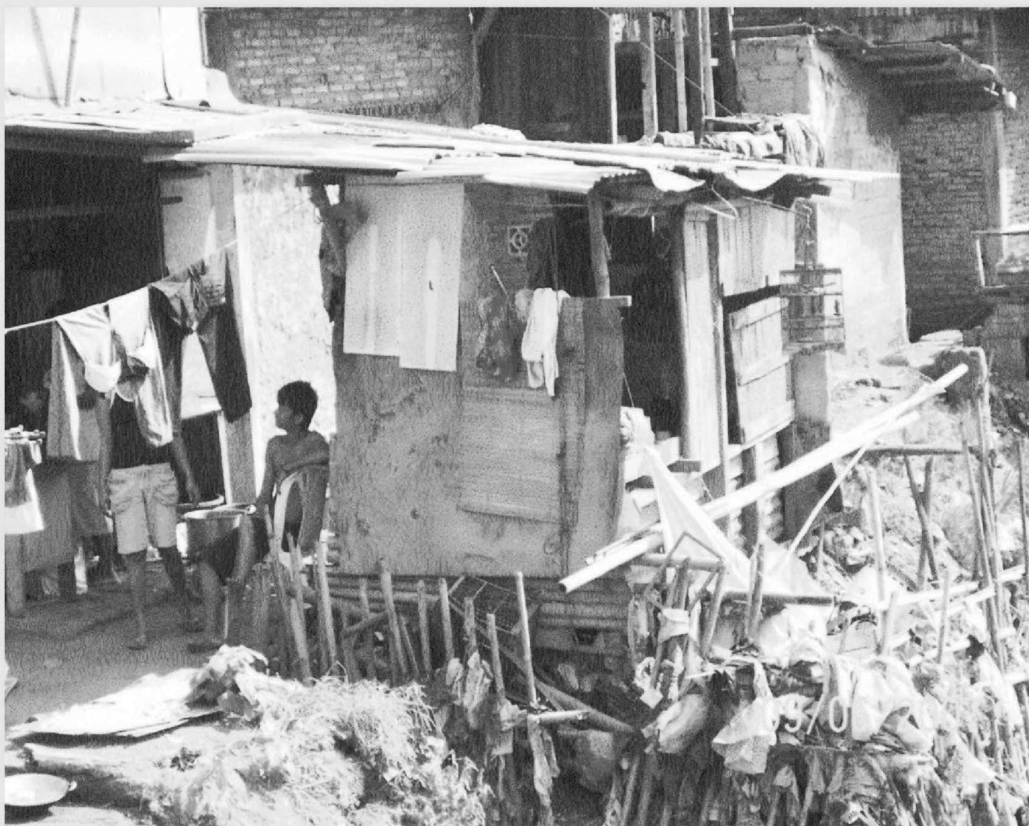
Trend Sosialisme

Secara umum, gerakan sosialisme baru di Amerika Latin berusaha mempromosikan egalitarian, dan menempatkan negara sebagai penyeimbang kekuatan pasar karena neoliberalisme telah benar-benar hampir melepaskan seluruhnya pada pasar. Ide neoliberalisme yang menyandarkan pada liberalisasi dan deregulasi pasar telah menempatkan hampir semua urusan publik pada pasar. Bahkan, hingga dihapuskan tanggung jawab sosial dengan meletakkannya ke dalam tanggung jawab individu. Jadi, menurut Nur Iman Subono, "Jika Anda miskin, maka itu menjadi

**Kemiskinan
adalah
Realitas
yang harus
diberantas**



Kemiskinan Bukanlah Komoditas
Untuk Diperdagangkan Demi Kepentingan Politik Tertentu



*"kemiskinan adalah
pangkal dari kekufuran"*

Iklan layanan ini dipersembahkan oleh:

**Yayasan Indonesia Kita
&
Pergerakan Indonesia**

urusan Anda dan negara tidak mempunyai kewajiban untuk turut campur dalam mengatasi persoalan tersebut”.

Dengan merujuk Jorge Castañeda, Nur Iman Subono mengatakan bahwa *trend* neososialisme di Amerika Latin dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Pertama, *open minded* reformis. Mereka berakar dari partai komunis yang dulu sangat berorientasi pada Uni Soviet, dan lebih banyak memilih gerakan bersenjata. Ambruknya Uni Soviet menyadarkan mereka bahwa cara-cara bersenjata sebagaimana mereka lakukan selama ini tidak dapat lagi dilakukan. Oleh karena itu, mereka masuk ke dalam demokrasi elektoral. Uruguay, Brazil, dan Chile menjadi contoh dari kecenderungan ini. Kedua adalah populisme. *Trend* ini yang berkembang di Venezuela, Bolivia, dan Argentina. Para pemimpin yang berada dalam kecenderungan ini diantaranya adalah Hugo Chaves di Venezuela, Néstor Carlos Kirchner di Argentina yang kemudian diganti oleh istrinya Christine Fernandez, Evo Morales di Bolivia, Tabaré Vázquez di Uruguay, Daniel Ortega di Nikaragua, dan yang terakhir Fernando Lugo di Paraguay.

Berbagai Faktor Pendorong

“Keberhasilan” gerakan neososialisme di Amerika Latin tidaklah terjadi dalam ruang hampa. Namun, ia terjadi dalam konteks tertentu, ada faktor-faktor yang turut menjadi pendorong keberhasilan gerakan tersebut. Menurut Nur Iman Subono, keberhasilan gerakan neososialisme dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. Pertama, berakhirnya perang dingin. Hal ini menyebabkan gerakan-gerakan sosialis di Amerika Latin lebih bebas. Mereka tidak terkena *labelling* sebagai satelitnya Uni Soviet. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengurangi pengaruhnya di Amerika Latin karena mereka berpikir telah sukses seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Padahal sebelumnya,

kawasan ini senantiasa dianggap sebagai *backyard*-nya atau halaman belakangnya Amerika Serikat. Sekarang ini, Amerika Serikat lebih berkonsentrasi di Afganistan, Irak, dan Iran. Akibatnya, gerakan-gerakan sosialis di Amerika Latin semakin ditinggalkan. Budiman Sudjatmiko menyebut faktor ini sebagai alasan geopolitik kebangkitan neososialisme di Amerika Latin karena Amerika Serikat sedang berkonsentrasi di Timur Tengah. Faktor kedua, menurut Nur Iman Subono, adalah berakhirnya gerak ide sosialis bukan berarti ide-ide yang menyebabkan lahirnya ide sosialis selesai. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan semakin parah. Proyek neoliberalisme yang dilakukan sejak tahun 1980an dan 1990an dengan *Washington Consensus*-nya ternyata semakin menjadikan masyarakat Amerika Latin miskin, terutama kelompok *indigenous*-nya. Akibatnya, ide-ide sosialisme menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, ketika para pemimpin dengan ide sosialis ini masuk ke dalam demokrasi elektoral, menurut Nur Iman Subono, mereka mendapatkan dukungan di atas 40%. Ini karena sebagian besar, terutama kelompok *indigenous*-nya, merupakan orang-orang yang termarginalkan.

Faktor ketiga adalah alasan ekonomi. Dalam hal ini, Budiman Sudjatmiko mengajukan beberapa parameter, yakni: kondisi-kondisi yang bersifat material-kemiskinan; *related of social forces*; subjek gerakan; dan kesadaran rakyat (*popular consciousness*). Kondisi-kondisi yang bersifat material dalam bentuk kemiskinan-dimana banyak orang menjadi lebih miskin-dan akhirnya memilih figur-figur Kiri. Namun, ini saja, menurut Budiman Sudjatmiko, tidaklah cukup. Sebaliknya, harus juga dilihat hubungan-hubungan kekuatan sosial (*related of social forces*). Hubungan-hubungan kekuatan sosial seperti kekuatan pengusaha, gereja, gerakan sosial, dan juga tentara. Dalam kaitan ini, Boni Hargens mengemukakan bahwa

kelompok-kelompok yang marginal dan kaum papa telah menjadi *concern* kaum gereja. Munculnya teologi pembebasan, menurut Boni Hargens, pada dasarnya merupakan kelanjutan reformasi yang dilakukan oleh Konsul Vatikan Kedua. Ajaran tersebut selalu menjadi dasar, dan gereja kemudian berbicara tentang teori perubahan sosial. Gereja yang mendunia, gereja yang menjadi bagian proses sejarah, peradaban dan sebagainya. Munculnya teologi pembebasan untuk mewujudkan ini, dan apa yang dilakukan Lugo dan kawan-kawan, menurut Boni Hargens, merupakan bentuk politik teologi pembebasan.

Kondisi material dan juga relasi sosial kekuasaan harus didukung dengan subjeknya itu sendiri. Menurut Budiman Sudjatmiko, pelaku-pelaku utama *prime mover* sosialisme baru di Amerika Latin sangat berbeda, misalnya, *prime mover* atau pelaku utama gerakan sosialisme di Bolivia adalah suku-suku anak dalam, Indian. Suku-suku Indian yang memang tercampakkan dari segi ekonomi, dari segi kultural dan juga politik. Ini yang terjadi di Bolivia dan Ekuador. Di Brazil, pelakunya adalah gerakan petani dan perubahan sektor formal. Di Venezuela, pelakunya adalah informal urban sektor. Di Argentina, buruh-buruh pabrik yang formal dan perubahan sektor informal. Parameter selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tingkat kesadaran rakyatnya, *popular consciousness*-nya.

Faktor keempat, menyangkut sifat gerakan itu sendiri, dan inilah yang membedakannya dengan Indonesia. Saiful mengatakan bahwa kalau dilihat dalam konteks historisnya ketika Amerika Latin di bawah rezim represif pada tahun 1950-an meskipun cukup kejam karena banyak juga yang dibantai, tetapi gerakan Kiri-nya tidak pernah punah. Termasuk partai kirinya. Ini sangat berbeda dengan Indonesia dimana tidak hanya partai yang musnah, tetapi ormasnya pun punah. Sebagian besar gerakan sosial di Amerika Latin

dilakukan oleh partai politik bawah tanah sehingga gerakan politik dengan sosialnya saling berhubungan. Pada era tahun 1950-an, gerakan sosial dan politik di Amerika Latin menggunakan strategi 70:30, 70 artinya ofensif, gerilya, sedangkan 30 pendidikan massa dan pengorganisasian. Namun, pada tahun 1970-an, terjadi transformasi gerakan kiri di Amerika Latin. Mereka telah mengubah strategi tersebut menjadi 30:70. 30 defensif dengan menggunakan perjuangan bersenjata, sedangkan 70 adalah pendidikan massa.

Faktor kelima adalah *ideological clarity*. Dalam konteks Amerika Latin, seperti dikemukakan oleh Abdus, *ideological clarity* adalah penting karena tanpanya tidak akan terjadi komunikasi antarberbagai gerakan sosialisme. Di Amerika Latin, ideologinya jelas. *Ideological clarity* inilah yang akhirnya menjadi dasar gerakan untuk berkomunikasi. Seperti dikemukakan Abdus, tanpa *ideological clarity* sebenarnya gerakan-gerakan sosial tidak bisa berkomunikasi. Indonesia mengalami hal ini.

Faktor keenam, kemampuan untuk membangun konsensus. Dalam konteks Amerika Latin, menurut Budiman sudjatmiko, mereka mempunyai konsensus dalam bentuk tokoh yang melakukan pemberontakan. Chaves, misalnya. Argentina mempunyai konsensus bahwa jika mereka melaksanakan proyek sosialisme dengan jalan terorisme, maka hal tersebut tidak akan berhasil sehingga mereka harus membuat proyek sosialisme di luar terorisme. Di Nicaragua, mereka mempunyai konsensus Sandinista. Menurut Budiman, konsensus ini ada dua, yakni konsensus yang sudah ada (*embedded*) dalam kesadaran rakyat dan kemudian kelompok intelektual progresif yang bersepakat bahwa kita menghormati konsensus sosial yang sudah tertanam di hati rakyat.

Keseluruhan faktor inilah yang turut mengantarkan suksesnya kebangkitan

Oleh karena itu, seperti dikemukakan Nur Iman Subono, “Cerita-cerita itu (kebangkitan neososialisme Amerika Latin-red) sebetulnya sudah menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin merupakan proses panjang. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita tidak melihat dan berharap bahwa hari ini Indonesia akan mempunyai orang-orang seperti Chaves”.

neososialisme di Amerika Latin. Keseluruhan kombinasi ini membuat gerakan sosialisme Amerika Latin tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, tetapi juga transnasional. Berada dalam satu kawasan.

Beberapa Pelajaran Penting

Dari diskusi mengenai kebangkitan neososialisme di Amerika Latin, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil untuk konteks Indonesia. Pertama, keberhasilan Amerika Latin tidak dicapai secara instan. Namun, memerlukan waktu yang lama. Nur Iman Subono mencontohkan bagaimana Lula di Brazil harus menunggu hingga 18 tahun untuk menjadi presiden, dan apa yang dilakukannya adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Hal senada dikemukakan oleh Azman Fajar. Ia mengatakan bahwa cerita sukses Amerika Latin tidak bisa dilihat semata dalam konteks

sekarang. Namun, harus dilihat kembali ke belakang pada era tahun 1950 ketika Raul Frebisch dari ECLA (*Economic Commission of Latin America*) menuliskan artikelnya. Menurutnya, tulisan tersebut telah menjadi semacam penyulut bagi timbulnya gerakan yang disebut new left atau strukturalis dengan teori dependensianya. Theotonio Dos Santos, Paul Barran melalui *The Political Economy of Growth*, kemudian Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, Samir Amin, dan lainnya. Para pemikir inilah yang harus diakui turut serta dalam mendorong kemunculan neososialisme sekarang ini di Amerika Latin. Menurut Azman Fajar, fenomena Amerika Latin sudah terjadi sejak tahun 1950-an sehingga wajar jika mereka bisa mencapai neososialisme seperti sekarang. Oleh karena itu, seperti dikemukakan Nur Iman Subono, “Cerita-cerita itu (kebangkitan neososialisme Amerika Latin-red) sebetulnya sudah menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin merupakan proses panjang. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita tidak melihat dan berharap bahwa hari ini Indonesia akan mempunyai orang-orang seperti Chaves”.

Pelajaran kedua adalah kasus Amerika Latin bersifat *heterogen*, dan sosialisme ternyata memang bisa diimplementasikan. Dalam kaitan ini, konteks dapat saja berbeda, dan sosialisme dapat diterapkan sesuai dengan konteksnya. Menurut Amir Effendi Siregar, implementasi sosialisme dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Menurutnya, “Mungkin orang-orang seperti Hugo Chaves berbeda dengan Castro dan lainnya karena mereka belajar melalui sebuah proses yang mungkin juga berbeda. Sebuah pelajaran baru yang tadi sudah dijelaskan bahwa sosialisme bisa diimplementasikan”.

Kemungkinan untuk Indonesia

Para peserta diskusi berada dalam dua pandangan dalam

“Sampai hari ini, saya belum bisa melihat apakah ketika rakyat ikut nyoblos dalam pemilu maka mereka memilih PDIP karena Budiman atau karena alasan lain?”.

melihat kemungkinan-kemungkinan di Indonesia dengan, tentu saja, mengambil pelajaran dari apa yang sudah berlangsung di Amerika Latin. Kelompok pertama adalah kelompok yang bisa dibilang skeptis atau pesimis. Ada beberapa alasan mengapa kebangkitan neososialisme di Amerika Latin patut diragukan untuk konteks Indonesia. Alasan pertama merujuk pada kesadaran rakyat yang belum baik. Dalam hal partisipasi politik, misalnya, masih dapat diragukan apakah sebenarnya yang mendorong masyarakat terlibat dalam pemilihan umum. Nurul Qoiriah, misalnya, mengemukakan bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin jauh dari apa yang terjadi di Indonesia. “Sampai hari ini, saya belum bisa melihat apakah ketika rakyat ikut nyoblos dalam pemilu maka mereka memilih PDIP karena Budiman atau karena alasan lain?”. Menurut Qoiriah, mereka belum memiliki sebuah kesadaran bahwa mereka memilih karena hal tertentu. Dalam proses pemilu di Indonesia, ketika kampanye berlangsung, para peserta tidak mengikuti pidato pemimpinnya, tetapi justru berkonvoi dengan kendaraan bermotor. Menurut Qoiriah, ini menunjukkan tingginya massa mengambang. Kesadaran kritis belum muncul. Meskipun demikian, ini tidak berarti sudah tidak ada peluang sama sekali. Otonomi daerah yang meskipun banyak dibajak oleh raja-raja kecil di tingkat daerah, tetapi tetap

memberikan peluang. “Hanya saja,” menurut Qoiriah, “memerlukan proses yang agak panjang”.

Gerakan buruh juga baru bisa dilihat sebagai sebuah gejala belum sampai pada sebuah kesadaran. Seperti dikemukakan Manoarfa, buruh baru beranjak dari proses depolitisasi dan deideologisasi yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, yang hingga saat ini ekornya masih terasa. Akibatnya, ketika gerakan buruh akan masuk ke dalam gerakan politik mereka bertengkar. Selain itu, basis ideologis juga menjadi persoalan. Dalam hal ini, buruh belum mempunyai basis ideologis yang jelas meskipun seperti dikemukakan Budiman bahwa buruh bukan menjadi satu-satunya *prime mover*, dan dalam konteks Indonesia akan sulit untuk menjadikannya sebagai *prime mover* karena proses deindustrialisasi yang tengah berlangsung.

Alasan kedua yang menyebabkan sulitnya kebangkitan neososialisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh sulitnya membangun konsensus diantara para aktivis. Dalam konteks Indonesia, seperti dikemukakan oleh Budiman, konsensus yang berusaha dibangun lucu karena sangat maksimal. Maksimalis tuntutan akan melahirkan *utopis*-nya, sedangkan minimalis akan menjadi pragmatis ketika targetnya minimal. Oleh karena itu, menurut Budiman, harus dicari sebuah titik *ekuilibrium*, suatu garis tengah, antara tuntutan maksimalis dengan tuntutan minimalis.

Alasan ketiga yang diajukan peserta diskusi mengenai kesulitan Indonesia dalam mengadopsi kebangkitan neososialisme Amerika Latin karena konteks sosialnya berbeda. Dalam hal ini, Boni Hargens mengemukakan bahwa kita akan kesulitan jika hendak mengkaitkannya dengan neososialisme Amerika Latin karena latar sosialnya berbeda. Ruh gereja dengan ajaran sosialnya juga telah berkembang di Amerika Latin, munculnya teologi pembebasan sebetulnya protes juga

terhadap kecenderungan gereja Katholik, gereja yang terlalu sakramental, gereja liturgi. Oleh karenanya, protestanisasi mulai berkembang dalam beberapa tahun belakangan, orang Katholik pindah ke Protestan karena lebih liberal dalam arti lebih bebas memperjuangkan hak-haknya. Di Indonesia, menurut Boni Hargens, proses semacam itu akan sulit.

Di luar pandangan yang cukup pesimis dan skeptis di atas, terdapat banyak pandangan yang cukup optimis dalam melihat kemungkinan kebangkitan neososialisme di Indonesia. Iqbal, misalnya, mengatakan bahwa kondisi antara Amerika Latin dan Indonesia hampir sama. Jika di Amerika Latin ada gereja, misalnya, dan agama mempunyai peran yang sangat kuat, maka di Indonesia ada Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi, masyarakat yang termarginalkan, isu-isu budaya, dan lain sebagainya. Jadi, dalam beberapa hal, menurut Iqbal, ada aspek kesamaan yang memungkinkan sosialisme yang terjadi di Amerika Latin dapat terjadi di Indonesia. Dari segi sejarah, sosialisme juga sudah hidup di Indonesia, termasuk syariat Islam, Syariat Dagang Islam, Sama'un dan sebagainya. Menurut Iqbal, mereka mempunyai sejarah perlawanan yang cukup panjang.

Hal senada juga dikatakan oleh Arie Sujito. Ia mengatakan bahwa cerita mengenai Amerika Latin cukup inspiratif bagi Indonesia. Dilihat dari segi dialektika, menurut Arie Sujito, yang berlangsung di level kelas menengah kota kecenderungannya tinggi untuk diolah. Hanya saja, menurut Arie Sujito, kondisi semacam itu seringkali disalahtafsirkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah alat analisis atas dialektika tersebut sehingga sekalipun mereka mengaku garis keras kiri, tetapi dalam praktiknya kadang-kadang sangat Hegelian. Mereka membangun imajinasi, tetapi tanpa basis yang jelas. Oleh karena itu, ada tiga hal yang dilakukan, menurut Arie Sujito, yakni (1)

antara analisis aktor, perjuangan politik, dan struktur organisasi; (2) formasi sosial setelah reformasi harus dihitung; dan (3) antara analisis masalah dengan solusi harus berhubungan.

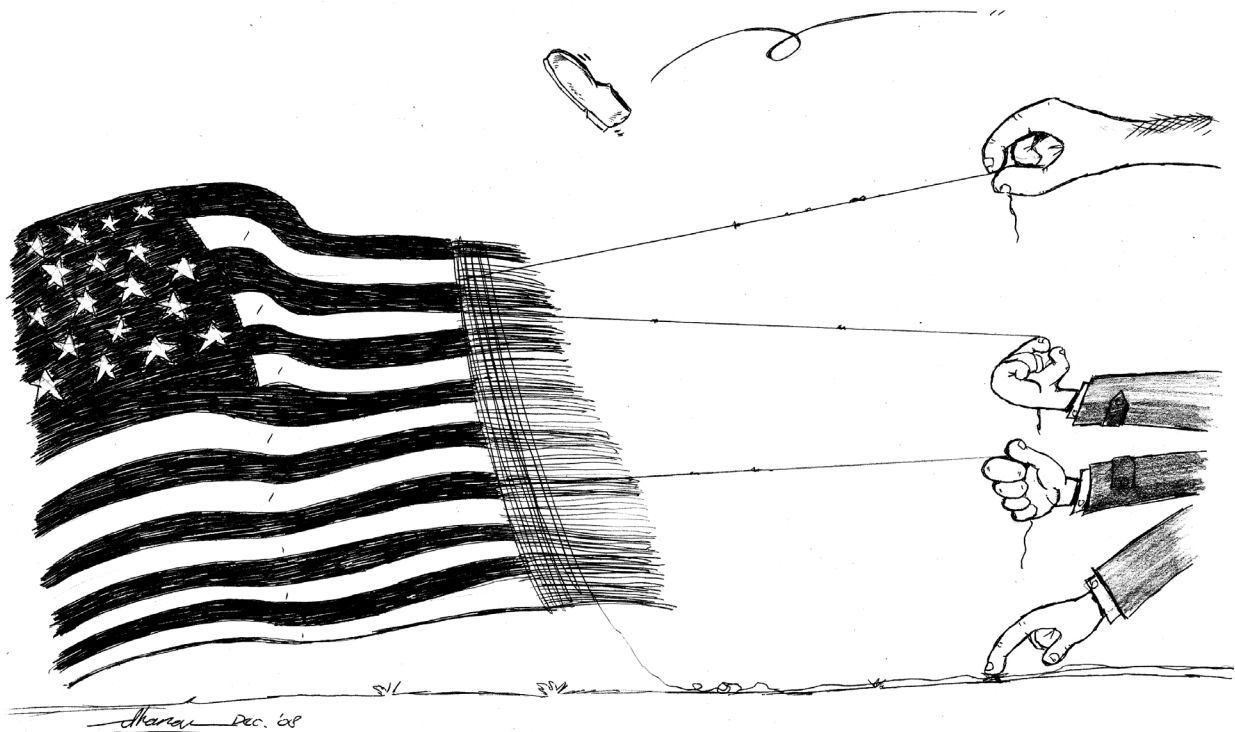
Optimisme juga muncul karena sosialisme pada dasarnya telah dituangkan dalam UUD '45 seperti dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33, sampai 34. Menurut Amir Effendi Siregar, konstitusi sudah menuangkan beberapa prinsip dasar sosialisme. Sosialisme sulit diimplementasikan di Indonesia karena posisi dominan atau mayoritas para penguasa politik termasuk termasuk pemerintahannya lebih merupakan "*komprador*" yang mempunyai hubungan ketergantungan dengan kekuatan internasional, kapitalisme, bukan dari kekuatan sipil. Menurut Amir Effendi Siregar, mereka

yang berkuasa sebenarnya secara dominan mempraktikkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan liberalisme atau katakanlah neoliberalisme dibandingkan dengan sosialisme sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Penutup

Dari diskusi yang telah dilakukan, ada beberapa hal penting yang layak dicatat. Pertama, proses yang terjadi di Amerika Latin merupakan proses panjang, usaha gigih tanpa henti yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kedua, apa yang terjadi dalam kasus Amerika Latin merupakan sesuatu hal yang bersifat heterogen sehingga tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. Ketiga, dalam konteks Indonesia, kebangkitan neososialisme di Amerika Latin dapat saja terjadi asalkan syarat-syaratnya

dipenuhi. Dalam banyak hal, apa yang terjadi di Amerika Latin mempunyai kemiripan dengan Indonesia meskipun banyak juga perbedaannya seperti sifat dan karakter gerakan sosial dan politik. Di Amerika Latin, gerakan sosial dimobilisasi oleh partai politik bawah yang selama masa pemerintahan represif tidak mengalami kehancuran, sedangkan di Indonesia tidak demikian. Meskipun demikian, ide sosialisme, kemiskinan, dan lain sebagainya telah berlangsung lama di Indonesia dan ini menjadi basis penting bagi kebangkitan sosialisme di Indonesia. Asalkan, meminjam istilahnya Arie Sujito, strategi, dan alat analisis tepat maka neososialisme di Amerika Latin sangat mungkin terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan.





Nur Iman Subono

Di balik Kemenangan Evo Morales dan MAS di Bolivia

"Musuh paling jahat dari umat manusia adalah kapitalisme. Itulah yang mendorong pemberontakan seperti yang kita alami, pemberontakan melawan sebuah sistem, melawan sebuah model neo-liberal, yang merupakan representasi dari kapitalisme yang buas. Bila seluruh dunia tidak mengakui realitas ini, bahwa negara-negara nasional tidak memberikan bahkan yang paling minimal kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan gizi untuk rakyat, maka setiap hari hak-hak manusia yang paling asasi sedang dilanggar" (Evo Morales, 1997)

Tahun 2005, tepatnya tanggal 18 Desember, Bolivia memiliki presiden baru. Apa sebetulnya istimewanya? Bukankah itu peristiwa biasa dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi? Ada pemilu, pemenangnya menjadi presiden, habis perkara. Tapi nanti dulu, ceritanya lain untuk kasus pemilu dan presiden terpilih kali ini. Evo Morales Aima, demikian nama lengkapnya, adalah presiden terpilih dengan suara di atas rata-rata yakni 53,7% suara pemilih, dan ini jauh lebih tinggi dari saingannya, Jorge "Tuto" Quiroga, mantan wakil presiden di bawah diktator Hugo Bánzer, dan Samuel Doria Medina, salah satu dari sedikit orang terkaya di Bolivia. Dengan mengantongi suara mayoritas tersebut, Evo, demikian sapaan akrab pendukungnya, melangkah dengan mudah menjadi presiden Bolivia tanpa perlu lagi pemungutan suara di Kongres. Tapi bukan itu saja,

dan ini yang fenomenal, pria kelahiran Orinoca, sebuah kota pertambangan di wilayah Oruro, di Altiplano (daerah Dataran Tinggi), Bolivia, pada tanggal 26 Oktober 1959, ini adalah anak suku Indian pertama, Aymara, yang menjadi presiden, dengan kendaraan politiknya Partai Gerakan Menuju Sosialisme atau MAS (*Movimiento al Socialismo*), di salah satu negeri termiskin di Amerika Selatan.

Kita tentu ingat bahwa Bolivia adalah negara dengan penduduk asli (*indigenous*) terbesar di Amerika Selatan. Populasinya sekitar 67% mengidentifikasi diri mereka sebagai penduduk asli. Tapi kita pun menyadari bahwa untuk waktu yang lama, hanya minoritas kulit putih dan *mestizo* yang menguasai kehidupan politik, ekonomi dan bisnis di sana. Karenanya pada saat Morales terpilih sebagai presiden, masyarakat Amerika Latin terhenyak, demikian juga komunitas internasional (baca: khususnya Amerika Serikat). Betapa tidak! Media besar AS pada umumnya begitu meremehkannya, dan bahkan Morales pun dijuluki sebagai aktivis politik yang "drop out" dari SMA, dan juga seorang "macro-trade unionist" atau "narco-terroris". Meskipun demikian kehadiran Morales ini bukanlah datang secara tiba-tiba. Di tingkat kawasan, kehadirannya merupakan bagian dari gerbong yang sudah sejak awal diusung Hugo Chavez dari Venezuela (1998), Nestor Kirchner (2003) dari Argentina (yang kemudian digantikan istrinya, Christina Fernandez dalam pemilu 2007), Tabarez Vazquez dari Uruguay (2005), serta Ignacio "Lula" da Silva dari Brazil (2001). Kemudian, Michelle Bachelet (2006), seorang perempuan dari Partai Sosialis, sebagai presiden Chili; Rafael Correa (2007), seorang intelektual kiri sebagai presiden Ekuador; tokoh revolusioner lama, Daniel Ortega sebagai presiden Nikaragua (2006), dan mantan uskup Fernando Lugo sebagai presiden Paraguay (2008). Meski berbeda dalam gaya dan prioritas politiknya, tapi semua presiden tersebut

Media besar AS pada umumnya begitu meremehkannya, dan bahkan Morales pun dijuluki sebagai aktivis politik yang "drop out" dari SMA, dan juga seorang "macro-trade unionist" atau "narco-terroris".

sering dianggap membawa alternatif politik dengan mengusung ide-ide sosialisme baru atau ideologi dan praktek "Kiri" di Amerika Latin. Mereka, sendiri atau bersama-sama, berada dalam *front* yang bersikap kritis, dan bahkan keras, terhadap proyek neoliberalisme dengan elemennya seperti pasar bebas, privatisasi, deregulasi, peran negara yang minimal (*minimal state*) dan investasi asing (*multinational corporations*), dan peran dominan AS, Bank Dunia dan IMF. Jika kita menengok ke belakang, Chili dan Bolivia adalah dua negara di wilayah Amerika Latin yang pertama-tama menerima (baca: dipaksakannya) rekomendasi proyek neoliberalisme tersebut.

Sementara itu, di dalam negeri Bolivia sendiri, tahun 1990an, kelompok-kelompok penduduk asli termobilisasi untuk menuntut hak politik mereka yang selama ini diabaikan, atau bahkan ditolak oleh otoritas politik. Tahun 1993, mereka sudah mengepalkan tangannya secara politik atas terpilihnya Victor Hugo Cárdenas, seorang wakil presiden pertama yang berasal dari penduduk asli. Demikian juga, beberapa dari mereka terpilih sebagai walikota sebagai dampak dari diberlakukannya Undang-undang Desentralisasi pada 1994. Morales sendiri pernah terpilih menjadi anggota Kongres Bolivia pada

1997. Ia mewakili provinsi Chapare dan Carrasco de Cochabamba dengan 70% suara di distrik itu. Ini merupakan jumlah terbanyak di antara 68 anggota parlemen yang terpilih langsung dalam pemilu tersebut. Pada akhirnya terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia dengan suara mayoritas merupakan puncak kemenangan dari perjalanan perjuangan kelompok-kelompok penduduk asli di Bolivia dalam menentang kolonialisme, neoliberalisme dan campur tangan pemerintah AS yang sangat besar dan dominan di negeri ini.

Konteks Politik Bolivia

Untuk menjawab mengapa pada akhirnya Morales terpilih sebagai presiden Bolivia, kita harus mempertimbangkan transformasi sosial-politik dan ekonomi di Bolivia yang terjadi dalam 20 tahun belakangan ini. Negara ini sebetulnya sedang berjalan ke arah kebangkrutan ekonomi dan politik yang semakin parah. Evo dan MAS-nya hadir, setelah melalui perjalanan panjang dari gerakan sosial bertransformasi menjadi partai politik, untuk tidak hanya menyuarakan kepentingan penduduk asli Indian, tapi juga aktif dalam mengorganisir, memobilisasi, dan memimpin perlawanan rakyat tersebut.

Dalam politik, setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Hernan Siles yang "Kiri", dan berkuasa antara tahun 1982 hingga 1985, ada 3 partai politik yang mendominasi arena politik selama 20 tahun berikutnya. Mereka adalah Gerakan Revolusioner Nasionalis atau MNR (*Movimiento Nacionalista Revolucionario*), Gerakan Revolusioner Kiri atau MIR (*Movimiento de la Izquierda Revolucionaria*), dan Aksi Demokratik Nasionalis atau ADN (*Acción Democrática Nacionalista*). Meskipun dari namanya partai-partai tersebut bernuansa "Kiri", tapi dalam praktek politiknya mereka adalah partai "Kanan" atau "Kanan-Tengah", yang dominasi kekuasaannya dipegang seorang pimpinan nasional

yang saling berebut atau saling berganti jabatan kepresidenan. Selama ini presiden yang terpilih dalam pemilu tidak memiliki suara mayoritas, dan karenanya mereka harus mendapatkan persetujuan Kongres terlebih dahulu. Artinya, ada semacam pakta negosiasi antara faksi-faksi partai politik di Kongres. Ini yang kemudian disebut sebagai patronase politik Bolivia yang berbasis pada klientelisme, korupsi dan personalisme. Pada saat bersamaan, masyarakat sipil, khususnya komunitas-komunitas masyarakat Indian, seolah-olah terlepas dari seluruh dinamika sosial dan politik di tingkat elit dan nasional. Sebelum masuk dalam arena politik elektoral, Evo sendiri pada tahun 1990an dikenal sebagai anggota gerakan bersenjata atau gerilyawan Tupac Katari yang menentang segala kebijakan dan otoritas politik pemerintah. Sebagai ganjarannya, ia dan kawan-kawannya pernah merasakan terali besi penjara selama 5 tahun. Selepas masa tahananannya, Evo kemudian menjadi pejuang yang konsisten, vokal, dan berani dalam memperjuangkan kepentingan penduduk asli Indian, khususnya dari suku Quecha dan Aymara. Kebobrokan politik yang merajalela di Bolivia ini direspon Evo dengan mempersatukan gerakan sosial yang terfragmentasi dan terpinggirkan dalam arena politik. MAS sendiri, yang berdiri pada tahun 1997, pada mulanya bukan partai politik yang solid dan terorganisir. Awalnya ia hanya sebuah gerakan *cocalero* (kelompok masyarakat penanam tumbuhan koka). Kemudian, ia pun tidak lebih dari koalisi longgar dari berbagai gerakan sosial seperti gerakan tani, gerakan buruh, gerakan mahasiswa sampai gerakan masyarakat adat. Namun dalam perkembangannya, mereka berubah menjadi Blok Politik yang dipersatukan oleh kepentingan yang sama, dan ini tercermin dari platform minimal mereka yakni, program nasionalisasi industri-industri strategis; pengurangan harga dan pembekuan harga barang-

barang rumah tangga, penyediaan pelayanan dasar bagi setiap orang, pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, pemberlakuan pajak progresif bagi kalangan kaya, redistribusi lahan kerja, penghapusan kebijakan ekonomi neoliberal, dan penentangan terhadap kebijakan fleksibilitas tenaga kerja.

Go Politics: Menempuh Jalur Elektoral

Pada tahun 1994, ada dorongan kuat untuk melakukan program desentralisasi pemerintahan Bolivia. Kongres meloloskan undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Partisipasi Populer (*Law of Popular Participation*). Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi organisasi-organisasi komunitas adat untuk berpartisipasi secara terbuka dalam arena politik di tingkat kabupaten/kota. Mereka juga dengan segera bisa mengambil jarak, atau bahkan independen, dari pengaruh atau tutorial partai-partai politik tradisional yang ada. Pada titik ini, MAS yang merupakan Blok Politik bertransformasi menjadi partai politik yang bergerak di tingkat nasional (sebelumnya hanya di tingkat provinsi Cochabamba, wilayah perkebunan coca).

Pada tahun 2002, MAS sebagai parpol berlaga dalam pemilu dengan hasil hanya mendapatkan 19,4% suara pemilih. Tapi ini cukup mengejutkan banyak pihak, khususnya partai politik tradisional dan bahkan AS, karena MAS langsung berada di peringkat kedua dengan memperoleh 27 kursi dari 130 di DPR, dan 8 kursi dari 27 di Senat. Kemudian, sebagaimana sudah disebutkan, tahun 2005 mereka kembali maju dalam pemilu. Kali ini mereka menang telak sekitar 53,7% dengan menguasai 72 kursi dari 130 di DPR dan 12 kursi dari 27 di Senat. Mereka pun, meski tidak fantastis, memenangkan 3 jabatan gubernur dari 9 yang diperebutkan yakni, Chuquisaca (43%), Oruro (41,0%), dan Potosi (42,7%).

Untuk pertama kalinya dalam pemilu ini, sekitar 324 kelompok-kelompok forum warga dan 69 kelompok masyarakat Indian terlibat penuh dalam partisipasi politik. Ini adalah salah satu alasan kuat mengapa pada akhirnya Evo Morales menang dalam pemilu.

Namun demikian, meski memenangkan pemilu dengan presentase telak, Evo yang bujangan ini, tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan secara merata di tiap negara bagian. Dari 9 negara bagian, ia memenangkan 5 di Bagian Barat, dan sisanya dikuasai Quirico di 4 negara Bagian Timur di mana USAID (*U.S Agency for International Development*) menyalurkan investasi yang sangat besar, khususnya dalam proyek infrastruktur di Santa Cruz yang meliputi antara lain jalan bebas hambatan (*highway*) dan jalur kereta api (*railway*), yang langsung maupun tidak, menjadikan Santa Cruz mengalami "boom" ekonomi yang berkelanjutan sejak tahun 1970an. Memang apa yang terjadi di Santa Cruz menimbulkan ketegangan, dan bahkan konflik dari apa yang dikenal sebagai dua wajah Bolivia yang berbeda. Di satu sisi, wajah penduduk asli yang miskin, tidak produktif secara ekonomi, dan tinggal di dataran tinggi atau pegunungan bagian Barat, dan disisi yang lain, wajah kalangan kulit putih dan *mestizo* yang kaya secara ekonomi maupun berkuasa secara politik, dan bermukim di wilayah dataran rendah di Bagian Timur. Ketegangan atau konflik antar wilayah atau negara bagian ini sebetulnya sudah berlangsung lama di banyak tempat di Bolivia, dan usianya sama dengan umur republik Bolivia itu sendiri. Misalnya, dalam pemerintahan periode kedua dari Sánchez de Losada, muncul konflik yang dikenal dengan "Perang Gas" (*Gas War*) pada bulan Oktober 2003. Kelompok-kelompok penduduk asli di Barat memobilisir diri mereka untuk menentang kebijakan privatisasi Losada, dan sebagai reaksi baliknya, para politisi dan pengusaha pro-pasar

bebas dan privatisasi mengundang Losada untuk memindahkan ibukota Lapaz ke Santa Cruz. Ketegangan dan konflik antara Barat dan Timur berjalan hingga saat ini, dan sudah pasti menjadi tugas berat bagi Evo Morales untuk bisa mengatasi masalah pelik ini. Misalnya dalam upaya perubahan aturan main dalam elektoral. Mereka yang ada di Barat menuntut pemilihan dalam Majelis Konstitusi (*Constituent Assembly*) yang memungkinkan mereka untuk memperluas kekuasaan politiknya untuk bisa mengubah undang-undang dalam aturan-aturan elektoral (misalnya adanya kursi cadangan untuk Kongres bagi kalangan penduduk Indian), dan kebijakan ekonomi (misalnya nasionalisasi industri gas dan minyak bumi). Sebaliknya, kalangan bisnis dan oligarki di Timur, khususnya di Santa Cruz, sangat menentang pemilihan dalam Majelis Konstitusi. Mereka justru mendorong diadakannya referendum di tingkat negara bagian untuk mempromosikan otonomi daerah yang lebih luas, yang tentu saja dengan tujuan sempit untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Kekuasaan Oligarki

Bolivia adalah negara yang paling miskin di Amerika Selatan. Menurut Laporan Bank Dunia 2004 terungkap bahwa 74% penduduk asli Bolivia hidup di bawah garis kemiskinan. Persisnya, masih menurut laporan tersebut, hampir dua pertiga masyarakat Indian adalah miskin diantara 50% penduduk termiskin. Sebaliknya, seperti sudah disebutkan, hanya minoritas kulit putih dan mestizo yang berkuasa. Mereka ini yang disebut sebagai kelompok-kelompok oligarki, dan pusatnya yang terkuat ada di wilayah Santa Cruz. Ini adalah wilayah yang paling subur tanahnya, dan juga lokasi dari sumber daya alam gas dan minyak bumi berada. Karenanya wajar sekali jika mereka tidak ingin ada perubahan kebijakan pemerintah yang akan merugikan hak-hak istimewa atas

sumber daya alam tersebut. Bahkan pada tahun 1970an, mereka berhasil melakukan kontrol penuh atas sumber daya alam tersebut melalui aparatus negara di bawah diktator Hugo Banzer (1971-1978).

Secara umum kekuasaan oligarki di Bolivia pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yang saling tumpang tindih (*overlapping*). Yang pertama adalah kalangan kaya tradisional yang mengakumulasi kapitalnya selama ratusan tahun melalui operasi pertambangan timah dan perak. Kota Potosi yang berlokasi di dataran tinggi Andes, yang luasnya lebih besar dibandingkan kota London pada Abad 16, merupakan tempat di mana asal dari dua pertiga kebutuhan perak dunia. Sementara itu, baru-baru ini, produksi timah semakin memperkaya sekelompok kecil oligarki yang melakukan kerjasama dengan kelompok bisnis atau modal asing. Dewasa ini, ekspor minyak bumi, gas dan narkoba bergerak dalam genggamannya lingkaran yang tak berujung pangkal (*vicious circle*) dari kekuatan-kekuatan lama yang sudah berlangsung ratusan tahun. Bahkan ini semakin diperkuat dengan sistem yang tertutup dari penguasaan tanah yang luas oleh latifundia yang semi-feodal. Mari kita simak laporan *United Nations* (PBB) berikut ini. Sampai dengan Oktober 2005, menurut laporan tersebut, sekitar 100 keluarga menguasai sekitar 25 juta hektar di Bolivia, dan sementara itu, 2 juta keluarga *campesino* memiliki akses hanya kepada 5 juta hektar tanah. Ini artinya, 100 tuan tanah memiliki lima kali lebih banyak tanah dibandingkan 2 juta petani gurem. Banyak dari kalangan tuan tanah tersebut terlibat juga dalam produksi dan perdagangan narkoba, dan mereka berkolaborasi dengan mafia obat bius AS. Mitra mereka ini memiliki peran yang menonjol dalam kounter-revolusi yang berhasil di Chili, dan kampanye destabilisasi yang kurang sukses di Venezuela. Kita bisa artikan bahwa tindakan yang sama bukan tidak

mungkin dilakukan juga di Bolivia.

Lain daripada itu, kita pun tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa AS sangat terlibat dalam operasi-operasi militer, dikenal dengan sebutan "*internal subversion*", sejak hari-hari revolusi di tahun 1950an dan 1960an di Bolivia. Tahun 1963, Bolivia menghasilkan lulusan akademi militer tertinggi, dari *United States Army Special Warfare School* di Fort Bragg, North Carolina, dibandingkan negara-negara lain di Amerika Latin. Bahkan bantuan finansial untuk militer pun meningkat jumlahnya, dengan nilai saat itu, dari US \$ 100.000 di tahun 1958 menjadi US \$ 3,2 juta pada tahun 1964. Pada tahun 1962-63 saja, sekitar 659 perwira militer menjalani *training* di AS, dan 20 dari 23 perwira senior militer melakukan kunjungan yang diperluas. Terbunuhnya Che di Bolivia adalah ikon keberhasilan militer yang sepenuhnya didukung AS. Mereka pun dengan sukses menghancurkan kekuatan-kekuatan revolusioner dan populis di Bolivia, dan ini mendorong terbentuknya pemerintahan diktator militer yang memberi jalan pada kekuasaan oligarki dan rejim neoliberal untuk dua dekade mendatang. Saat ini pun militer Bolivia tidak bisa lepas dari tutorial AS yang membawa program "*war on drugs*", dan juga yang baru-baru ini "*war on terrorism*".

Menemukan kembali (*Refounding*) Bolivia

Berbeda dengan para pemimpin populis tradisional umumnya di wilayah Andean yang berasal dari kelas atas dan menengah, dan yang berupaya menjalankan redistribusi yang "dihela dari atas" (*from above*) kepada masyarakat tanpa basis ideologi yang kokoh dan organisasi "akar rumput" yang kuat, Evo dengan MAS-nya, mengambil peran dan posisi yang berbeda secara diametral. Dengan berbasis gerakan massa yang terorganisir, melalui ideologi dan program yang bisa dijalankan, mereka berupaya untuk mengubah secara

mendasar dan permanen kekuasaan oligarki kelas-kelas atas dan menengah kulit putih dan *mestizo* yang memiliki kaitan atau bahkan bergantung pada korporasi multinasional dan negara yang melindungi mereka, khususnya negara AS. Tujuan mereka tidak hanya sekedar mengambil alih dan menjalankan sistem politik yang ada, tapi mengubahnya secara mendasar, dan ini coba direalisasikannya melalui program "*Refounding Bolivia*" yang dicanangkannya bulan Juni 2006 yang kemudian diajukannya di Majelis Konstitusi.

Dalam tataran ideologis, dokumen program ini mengungkapkan sejarah Bolivia sebagai "*indigenous-popular resistance to discrimination and poverty*", memproklamasikan "hak-hak" (*rights*) masyarakat Indian untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), mengontrol teritorial mereka, dan juga "sumber-sumber bersama" (*collective resources*), dan menjalankan sistem peradilan dan politik mereka yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Visi MAS untuk Bolivia adalah plural, partisipatif, komunitarian dan demokrasi perwakilan yang berbasis pada kebhinekaan masyarakat dalam rangka menghapuskan berbagai bentuk kolonialisme, segregasi dan diskriminasi. Dalam bidang ekonomi, program ini mempromosikan bahwa sumber-sumber daya alam adalah merupakan "pemilikan bersama" (*social property*) dan pengelolaannya dilakukan oleh negara, semacam model "ekonomi sosial" (*social economy*) di mana ada pemilikan produktivitas swasta selama ini digunakan untuk tujuan-tujuan sosial yang berguna.

Ada beberapa langkah berani yang diambil Evo dengan MAS-nya untuk merealisasikan program *Refounding Bolivia*. Salah satunya adalah proyek *landreform* (reformasi agraria) yang radikal. Morales pada tanggal 3 Juni 2006 mendatangi basis oposisi terkuat di Santa Cruz di dataran rendah bagian

Timur, dan menghadiahkan tanah milik negara yang bersertifikat sekitar 24.864 kilometer persegi (atau sekitar 9600 mil persegi) kepada para petani. Ini baru tahap pertama dari upaya Evo untuk membagikan tanah milik negara sekitar

Dalam tataran ideologis, dokumen program ini mengungkapkan sejarah Bolivia sebagai "*indigenous-popular resistance to discrimination and poverty*", memproklamasikan "hak-hak" (*rights*) masyarakat Indian untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), mengontrol teritorial mereka, dan juga "sumber-sumber bersama" (*collective resources*), dan menjalankan sistem peradilan dan politik mereka yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

200.000 kilometer persegi (atau sekitar 77.000 mil persegi) selama masa lima tahun pemerintahannya. Evo sendiri juga berjanji untuk memperluas dan meredistribusikan tanah-tanah yang dimiliki secara pribadi yang diperoleh

secara ilegal, disalahgunakan, atau dimiliki untuk spekulasi.

Yang paling dramatis, dan ini sesuai janjinya waktu berkampanye dalam pemilu, adalah negara kembali mengontrol semua bisnis asing, khususnya gas dan minyak bumi. Evo mengumungkannya di Lap Paz pada 1 Mei 2007, dan pengambil alihan tersebut berlaku sejak resmi diumumkan, atau setahun kemudian. Meski sebagian bisnis migas sudah dikuasai sebelum tanggal tersebut. Sebanyak 12 perusahaan asing telah bersedia menandatangani kontrak karya yang baru, dan yang langsung melaksanakannya adalah Repsol YPF SA (Spanyol-Argentina), Petrobras (Brazil), Total-Fina-Elf (Perancis-Belgia), dan British Gas (Inggris). Adapun perusahaan minyak milik negara, YPFB (*Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos*), sebuah BUMN mirip seperti Pertamina, di bawah presidennya Guillermo Aruquioa, mengontrol semua kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas. Dengan kontrak baru tersebut, semua perusahaan asing harus menyeter 82% dari penerimaan (bukan total laba) ke YPFB, dan hanya 18 persen yang diperuntukan bagi perusahaan asing yang bertindak sebagai operator eksplorasi minyak. Evo Morales sendiri masih sangat terbuka dengan dialog atau negosiasi terhadap perusahaan asing. "Kami sebagai keturunan Indian masih percaya dengan prinsip dialog", demikian Evo mengatakannya. Tapi, masih menurutnya, jika ini tidak berjalan maka mereka memiliki waktu enam bulan untuk berpikir ulang atau meninggalkan Bolivia. Dalam kesempatan yang lain, Evo pun dengan tegas menutup pintu bagi penyelesaian sengketa dengan perusahaan asing melalui arbitrase internasional. Simak saja apa yang dikatakannya berikut ini:

"Tidak pernah ada negara di dunia ini yang bisa menang dengan keberadaan arbitrase internasional. Tidak pemerintah, tidak negara, dan tidak juga rakyat. Hanya perusahaan multinasional

yang bisa menang”

Langkah-langkah Evo ini, disamping kebijakan sosial lainnya, bukannya tanpa kritik dan perlawanan. Kalangan oligarki lama bersikeras untuk mempertahankan seluruh *privelese* yang selama ini mereka miliki dalam kaitannya dengan keuntungan besar yang didapat dari industri minyak bumi dan gas. Sebaliknya, ada pendukung Evo sendiri yang juga mengkritiknya karena dianggap langkah Evo ini hanya kompromi dalam negosiasi ulang antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing, dan bukan transformasi relasi kekuasaan dan kepemilikan alat-alat produksi. Memang tidak mudah, tapi sejauh ini Evo masih mendapatkan dukungan sebagian besar masyarakatnya, dan juga koleganya di wilayah Amerika Latin, termasuk masyarakat internasional yang sudah muak dengan model ekonomi neoliberal yang tampaknya sudah sekarat.

Apa yang bisa kita pelajari?

Sebagai bangsa Indonesia, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Bolivia di bawah Evo Morales ini? Ironisnya, belum apa-apa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Indonesia, Kardaya Warnika, sudah mengatakan bahwa kondisi Bolivia tidak bisa disamakan dengan Indonesia meski kedua negara tersebut sama-sama produsen minyak. Sebagai inspirasi atau bahkan ide terobosan kelihatannya sudah sejak awal dimatikan dengan pernyataan ini. Tidak perlu menjadi pejabat publik atau memiliki pendidikan tinggi untuk mengatakan bahwa Bolivia berbeda dengan Indonesia. Evo pun juga mengatakan demikian sesaat setelah pelantikannya sebagai presiden. Mari kita simak apa yang dikatakannya sebagai berikut:

“Saya tidak hanya pengikut Chavez, tapi juga pengikut Castro dan juga Che. Tapi ini bukan berarti saya akan menjalankan program-program mereka di sini, karena Bolivia bukanlah Kuba.”

“Tidak pernah ada negara di dunia ini yang bisa menang dengan keberadaan arbitrase internasional. Tidak pemerintah, tidak negara, dan tidak juga rakyat. Hanya perusahaan multinasional yang bisa menang”

Setidak-tidaknya sejauh ini ada tiga hal yang kita bisa renungkan dari apa yang terjadi di Bolivia saat ini. Pertama, kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing bukanlah “sesuatu” yang sakral atau tabu untuk bisa diubah. Bukan seperti kitab suci yang sudah final, kontrak tersebut buatan manusia, dan apabila saat ini kita melihat bahwa perubahan tersebut bisa memperbaiki penerimaan negara, apalagi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi, mengapa tidak mungkin dilakukan. Kedua, kontrak karya antara dua belah pihak ini, apapun isi maupun kesepakatannya, tetap saja *at the end of the day*, peran dan posisi kedaulatan negara masih saja yang teratas. Artinya, jika kedaulatan negara sudah semakin tergerus dan mulai kehilangan peran dan posisinya akibat pasal-pasal dalam kontrak tersebut, maka tidak ada alasan lain untuk lebih mengedepankan perubahan sebagai jaminan atas kedaulatan negara yang lebih baik. Harga diri bangsa dan negara dipertaruhkan di sini jika memang kita tidak hanya sibuk mempromosikan retorika politik bahwa NKRI harga mati selama ini meski tanpa arti. Ketiga, keberadaan perusahaan-perusahaan asing tersebut di Indonesia sudah lama

sekali, dan ini artinya keuntungan yang mereka dapat juga sudah tak terhitung jumlahnya. Karenanya, hak atas kekayaan bumi Indonesia harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni bangsa Indonesia. Itu yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar kita bahwa hasil bumi dan seluruh isinya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Tunggu apa lagi? Jika di Bolivia bisa, mengapa tidak di Indonesia? Kelihatannya saat ini kita memang butuh orang seperti Evo, seperti dulu kita punya Soekarno, hadir di Indonesia [nis].

Daftar Pustaka

- Ahmad, Aijaz, “Bolivia: Revolution Through the Ballot? The First part of a series on Latin America,” *Frontline*, Vol. 22, Issue 27, 31 December-13 January 2006
- García Linera, Álvaro, *Estado multinacional*, La Paz: Malatesta 2005
- , *La lucha por el poder en Bolivia*, La Paz: Plural 2005
- Rebick, Judy, “Peaceful Revolution is taking shape,” *The Toronto Star*, 9 September 2006
- Spronk, Susan, “A Movement Toward or Beyond “Statism?”, *YES Magazine*, March - April 2007
- PINR, “Bolivia’s Evo Morales Launches His Movement Toward Socialism into the Political Trenches”, 15 June 2006.



Keterkaitan Gerakan Penduduk Asli (*Indigenous Movements*)¹ dan Kekuatan "Kiri" (*Left*) di Amerika Latin

Nur Iman Subono²

Dalam tahun-tahun belakangan ini, kita menyaksikan gerakan penduduk asli (*indigenous movements*) atau masyarakat Indian di wilayah Amerika Latin semakin tampil kepermukaan secara politik dalam konteks nasional. Bahkan lebih jauh dari itu, di wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah telah lahir partai-partai politik berbasis etnis (*ethnic parties*). Di Bolivia misalnya, Evo Morales yang maju dalam pemilu 2002 menggunakan kendaraan politiknya, partai *indigenous*, yang dikenal dengan nama MAS atau *Movimiento al Socialismo*. Demikian juga di Ekuador, partai politik Pachakutik, atau lengkapnya *Movimiento de Unidad Plurinacional* adalah partai yang menghantarkan Lucio Gutiérrez menjadi presiden di tahun 2002. Kecenderungan yang serupa juga muncul dalam dua tahun belakangan ini di Kolombia, Nikaragua, dan Venezuela.

Partai-partai politik ini tentu saja sangat berbeda dengan partai-partai tradisional yang selama ini sudah mendominasi kehidupan politik di

Amerika Latin. Pada umumnya partai-partai berbasis etnis ini secara eksplisit berupaya untuk merepresentasikan kepentingan politik penduduk asli yang sudah lama diabaikan dan dimarginalkan dalam tatanan sosial yang ada. Memang kehadiran mereka ini menimbulkan pro dan kontra dalam dinamika politik di wilayah Amerika Latin. Di satu sisi, ada kalangan yang menerima kehadiran mereka karena menyadari bagaimana mereka selama ini merupakan kelompok yang mayoritas secara sosial, tapi minoritas secara politik. Karenanya wajar sekali jika saat ini mereka tampil dalam arena politik dengan membawa kendaraan partai politik mereka sendiri. Namun di sisi yang lain, banyak yang menganggap bahwa kehadiran mereka sangat tidak *compatible* dengan demokrasi, dan bahkan hanya akan melahirkan atau memperbesar konflik etnik dan menciptakan destabilisasi demokrasi. Yang belakangan ini mengecam partai-partai *indigenous* tersebut karena sikap mereka yang menolak demokrasi sebagai "*the only game in town*", dan

¹ Dalam tulisan ini kata kelompok-kelompok *indigenous*, penduduk asli, dan masyarakat Indian digunakan secara bergantian dalam pengertian yang kurang lebih sama.

² Staf Redaksi Jurnal SosDem, staf pengajar di Jurusan Politik, FISIP UI, dan peneliti di Demos, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

ini diperlihatkan antara lain dengan kerusuhan dan pembontakan yang menggulingkan presiden di Ekuador, dan juga Bolivia. Bahkan lebih jauh lagi, dalam dinamika politik, kelompok-kelompok *indigenous* atau masyarakat Indian, baik langsung maupun tidak, lebih memiliki kedekatan, baik politis maupun ideologis, dengan kelompok-kelompok radikal "Kiri" di Amerika Latin saat ini. Bagi banyak pihak, khususnya kalangan bisnis dan pemilik modal dalam negeri maupun asing, ini hanya akan menyebarkan pengaruh yang buruk di wilayah Amerika Latin setelah berakhirnya Perang Dingin. Tentu gambarannya adalah "Kiri" masa lalu yang sering tampil dalam bentuk perlawanan bersenjata atau gerilyawan menentang otoritas kekuasaan pemerintah.

Siapa dan Mengapa Mereka Hadir?

Pertanyaan pertama yang akan muncul bila kita bicara kelompok-kelompok *indigenous* yang hidup di wilayah Amerika Latin adalah, siapa sebetulnya mereka? Bagaimana kita mendefinisikan siapa yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok *indigenous*? Ternyata memang tidak mudah, dan tampaknya banyak definisi yang bicara mengenai kelompok-kelompok *indigenous*. Dan Rosengren, Komisi SIDA, bisa jadi benar ketika mengatakan bahwa tidak ada kriteria objektif dalam mendefinisikan siapa kelompok *indigenous* tersebut, kecuali hanya masalah askriptif yang dilakukan diri mereka sendiri atau pihak lain. Ada definisi yang sedikit banyak diterima diajukan oleh Mr. Jorge Martinez Cobo, *Special Rapporteur of the Working Group on Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of the Commission for Human Rights* yang mengatakan bahwa :

"Penduduk asli (*indigenous peoples*) adalah mereka yang memiliki kontinuitas sejarah dari masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial, yang berkembang dalam wilayahnya sendiri, menganggap diri mereka

berbeda dari sektor-sektor lain dalam masyarakat yang dewasa ini berlaku dalam wilayah-wilayah tersebut atau bagian dari wilayah-wilayah tersebut. Mereka membentuk saat ini sektor-sektor masyarakat yang non-dominan dan terbentuk untuk memelihara, membangun, dan meneruskan pada generasi mereka di masa depan wilayah leluhur dan identitas etnis mereka, sebagai dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsa atau masyarakat, sesuai dengan sistem legal, pranata-pranata sosial, dan pola-pola kultural mereka sendiri."

Bolivia, Peru, Ekuador, dan Kolombia bisa dimasukkan dalam kategori negara-negara Andean di Amerika Selatan yang paling beragam etnisitasnya. Biasanya ciri-ciri masyarakat Indian tersebut sebagian terbentuk karena kondisi-kondisi alamiah seperti antara mereka yang hidup di dataran tinggi dan rendah, kemudian sebagian karena proses-proses sosial dan budaya, dan juga sebab kesejarahan. Data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga sensus seperti *Instituto Nacional de Estadística e Informática* (INEI) Censos Nacionales menunjukkan jumlah, wilayah dan beragamnya penduduk asli di

negara-negara Andean tersebut. Untuk sekedar gambaran ada baiknya melihat tabel I.

Mengapa dewasa ini gerakan masyarakat Indian atau indigenous semakin tampil kepermukaan secara politik? Ada banyak penjelasan di sini. Ada yang melihatnya, mulai tahun 1980an dan 1990an, mereka sebagai bagian dari munculnya gerakan sosial baru (*new social movements*) yang dipicu oleh kebangkitan kembali identitas etnis *indigenous* setelah selama ratusan tahun mereka di bawah dominasi kalangan *mestizo* dan kulit putih. Disamping itu, ada yang memahami kebangkitannya kembali karena difasilitasi oleh runtuhnya tatanan struktur korporatis di tingkat regional dan dorongan transisi ke arah demokrasi di tingkat global, yakni transisi yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Tapi ada juga yang memiliki argumen bahwa mobilisasi politik kelompok penduduk asli atau Indian ini dimungkinkan karena berkembangnya aliansi transnasional yakni aliansi antara masyarakat indigenous secara global di Bagian Selatan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia atau LSM Lingkungan secara global di Bagian Utara. Namun ada kasus negara seperti Ekuador misalnya, federasi masyarakat *indigenous* pertama yang dibentuk

Tabel I
Masyarakat Indigenous
negara-negara Andean di Amerika Selatan

No	Negara	Jumlah	Jumlah Suku	Lokasi
1	Bolivia	4.135.026	3 31	Dataran Tinggi Dataran Rendah
2	Peru	4.841.899	2 46	Dataran Tinggi Dataran Rendah
3	Kolombia	656.841	21 61	Dataran Tinggi Dataran Rendah
4	Ekuador	3.112.100	1 10	Dataran Tinggi Dataran Rendah

Sumber: diolah dari beberapa sumber

muncul sebelum terjadinya proses transisi demokrasi. Kehadirannya lebih banyak berkaitan dengan dinamika interaksi dengan aktor-aktor dalam negeri seperti serikat buruh, partai politik sayap "Kiri", dan kependetaan Katolik yang banyak dipengaruhi oleh Teologi Pembebasan.

Keterkaitan "Kiri" dan "Indigeneous"

Dalam catatan sejarah Amerika Latin, kelompok-kelompok penduduk asli ini, dalam dinamika dan pasang-surutnya, lebih memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak, dengan kelompok-kelompok "Kiri", baik yang memilih jalan perlawanan bersenjata maupun jalur elektoral. Pada tahun 1980an, kebangkitan kembali partai-partai politik sayap "Kiri" ternyata juga jatuh bersamaan dengan semakin matangnya kedewasaan politik dan efektifnya gerakan penduduk asli. Mereka terbentuk, pada tahun 1970an dan 1980an, dalam konteks menguatnya jalur elektoral yang dipilih kelompok-kelompok "Kiri" di berbagai wilayah di Amerika Latin. Banyak para pimpinan penduduk asli bergabung, dan banyak organisasi gerakan sosial penduduk asli yang mendukung partai-parti "Kiri" terutama yang berbasis di wilayah pertanian. Tapi ada juga mereka yang terlibat dalam gerakan perlawanan bersenjata, dan dalam banyak kasus, komandan-komandan yang memimpinnya berasal dari kalangan *mestizo*, yang lebih mempromosikan strategi militer dan ideologinya dengan basis kelas. Ini artinya kelompok-kelompok bersenjata ini lebih memilih untuk mensubordinasikan identitas etnis di bawah tuntutan-tuntutan perjuangan kelas. Kita bisa sebut misalnya,

gerilyawan Sendero Luminoso (Peru) dan FMLN (El Salvador). Meskipun demikian ada juga pimpinan-pimpinan *indigenos*nya lebih menonjol, ideologi Indianis dan kritik terhadap penindasan rasialnya juga lebih dominan. Di sini ada nama-nama kelompok-kelompok perlawanan seperti Aliansi Quintin Lame-M 19 (Kolombia), EZLN (Meksiko), dan EGTK (Bolivia).

Tipologi Relasi "Kiri" dan "Indigenous"

Donna Lee Van Cott, profesor dari University of Connecticut, AS, membuat tipologi yang menarik dalam melihat relasi antara kekuatan "Kiri" dan kelompok-kelompok *indigenous* di Amerika Latin. Layaknya sebuah spektrum, relasi tersebut bergerak dari dominannya kelompok *indigenous*, kemudian adanya mitra sejajar atau keseimbangan kekuasaan (*balance of power*), menuju ke dominannya kekuatan "Kiri". Secara mudahnya digambarkan dalam spektrum seperti tertera di bawah ini :



Tipologi ini dilihat dengan merujuk pada hal-hal sebagai berikut; (a) bentuk organisasinya (misal parpol atau gerakan); (b) lamanya aliansi yang diharapkan; (c) kekuatan relatif kelompok *indigenous* versus para pemimpin "Kiri" dan organisasi; (d) ekstensi geografis atau skala keterkaitan (misal lokal, nasional).

Dominannya Kelompok "Indigenous"

Ada dua bentuk yang terlihat dalam relasi kekuasaan di mana kelompok-kelompok penduduk asli lebih dominan. Yang pertama merujuk organisasi gerakan sosial penduduk asli

membentuk partai politik dan mengajak dan memasukan (*incorporated*) para pemimpin "Kiri" dan organisasi-organisasi populer menjadi bagian dalam organisasi gerakan penduduk asli. Partai-partai politik yang berbasis gerakan penduduk asli muncul dan menguat pada tahun 1990an. Bisa dibilang mereka berhasil secara politik karena menformulasikan kinerja dan tampilan yang lintas-etnis (*cross-ethnic*) dengan melibatkan kalangan miskin *mestizo* dan juga kelas menengah urban yang terpinggirkan. Dalam banyak hal, mereka bergantung pada bantuan kalangan intelektual "Kiri" dan pimpinan serikat buruh, dan berupaya untuk membentuk kinerja politik yang lebih mandiri dan progresif ditengah-tengah meredupnya partai-partai politik sayap "Kiri" dan melemahnya peran serikat-serikat buruh. Beberapa contoh bisa disebutkan di sini antara lain *Alianza Social Indigena*, Kolombia (1991), *Movimiento al Socialismo* atau MAS, Bolivia (1995), dan *Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik* (Pachakutik), Ekuador (1996).

Yang kedua merujuk pada partai etnis atau partai *indigenous* yang menjadi mitra senior dalam sebuah aliansi elektoral dengan partai-partai "Kiri" atau gerakan populer. Partai-partai *indigenous* tersebut semakin mendapatkan kekuatannya pada saat, setelah pemilu, mengajak mitranya dari kalangan "Kiri" yang kurang memiliki sumber daya manusia atau organisasi di tingkat pedesaan maupun gerakan sosial atau partai yang kurang dinamis di tingkat nasional. Kita bisa menyebutkan antara lain nama seperti Pachakutik-Nuevo Pais, Ekuador (1996 dan 1998); aliansi lokal di Ekuador antara Pachakutik dan Izquierda Democrática, Partido Socialista-Frente Amplio, MPD dan

3 Sebagian besar materi ini diambil dari tulisan Donna Lee Van Cott.

partai-partai gurem lainnya, Ekuador (1996-2006); Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas dan Patria Para Todos, Venezuela (2000).

Perimbangan Kekuasaan atau Mitra Seajar

Dalam tahapan ini, ada semacam "tarik-menarik" antara kelompok *indigenous* dan kekuatan "Kiri", baik atas dasar kesepakatan untuk membangun kemitraan yang sejajar atau dalam bentuk perjuangan untuk mengontrol gerakan atau organisasi. Perimbangan kekuasaan ini bergerak sangat dinamis, dan beragam dari waktu dan tempat. Yang pertama mengambil bentuk adanya kerjasama antara wakil-wakil dari partai-partai *indigenous* dan partai-partai politik sayap "Kiri" di parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam banyak kasus, kecuali untuk keberhasilan MAS di Bolivia, partai-partai *indigenous* biasanya hanya minoritas dalam memposisikan wakil-wakilnya di parlemen. Karenanya, dalam upayanya untuk mempromosikan hak-hak mereka, menghambat kebijakan-kebijakan neoliberal, dan memasukan kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan pemerintah, partai-partai *indigenous* membentuk aliansi dengan partai-parti "Kiri-Tengah" dan "Kiri" yang *compatible* dengan mereka secara ideologis. Kita bisa menyebutkan misalnya Pachakutik dan partai-partai "Kiri" di parlemen nasional, dan majelis konstituente, Ekuador (1996-2006); wakil-wakil *indigenous* dari PUAMA dan CONIVE dan MVR di bawah Chavez di majelis konstituente, Venezuela (1999).

Kemudian yang kedua, organisasi gerakan sosial penduduk asli bergabung dengan organisasi-organisasi kerakyatan dalam kegiatan protes, demonstrasi atau unjuk rasa. Pada tahun 1980an dan awal 1990an, gerakan *indigenous* banyak yang melakukan pawai akbar, memblokir jalan, dan mengadakan pertemuan massa dengan simpati, dan dukungan dari organisasi-organisasi gereka Katolik

dan Protestan, asosiasi ilmuwan, dan LSM. Sebaliknya, pada akhir 1990an, gerakan sosial *indigenous* menjadi poros dari mobilisasi lintas-etnis dan lintas-kelas. Mereka ikut terlibat dalam protes-protes terhadap berbagai kebijakan neo-liberal yang dimotori oleh gerakan sosial populer seperti di Meksiko, Chili, Ekuador dan negara-negara lainnya. Misalnya yang terkenal, aliansi untuk mendongkel presiden Bucaram (1997) dan Mahuad (2000), Ekuador. Kemudian, "Perang Air" (*Water War*) di Cochabamba, Bolivia (2000); protes terhadap mereka yang mendukung anti nasionalisasi gas dan mendongkel Sánchez de Lozada, Bolivia (2003); penurunan presiden Carlos Mesa, Bolivia (2005); dan protes-protes paska pembrontakan Zapatista, Meksiko, (1994).

Yang selanjutnya, ketiga, organisasi kelompok *indigenous* dan para pimpinan organisasi populer serta kalangan intelektual "Kiri" membentuk partai politik bersama (*joint political party*). Biasanya ini dilakukan pada saat, baik kelompok *indigenous* maupun gerakan "Kiri", berada dalam posisi lemah secara politik. Karenanya, mereka bekerjasama membentuk kendaraan politik untuk menempuh jalur politik elektoral. Kita bisa menyebutkan misalnya, Eje Pachakuti, Eje de Convergencia Patriótica, Bolivia (1980an), Frente Democrático Nueva, Guatemala (akhir 1990an).

Dominannya Kelompok "Kiri"

Bagaimana situasi dan kondisinya jika kelompok-kelompok "Kiri" justru yang dominan dalam relasinya dengan kelompok-kelompok *indigenous*? Sedikitnya ada 4 model dari relasi tersebut yang bisa kita paparkan. Pertama, gerakan dan partai *indigenous* dan partai-partai "Kiri" saling berkompetisi dalam aliansi elektoral. Biasanya semuanya bermula pada saat kalangan *indigenous* menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang dalam pemilu jika atas usaha mereka sendiri, atau bisa juga sebagai bagian dari

usaha mereka untuk mempertahankan status mereka sebagai gerakan sosial. Lain daripada itu, untuk menghindari tercemar atau terkontaminasi dalam kompetisi elektoral atau pemilu, maka mereka lebih memilih untuk beraliansi dengan partai-parati "Kiri" untuk prospek elektoral yang lebih menjanjikan bagi mereka. Di sini kita bisa menyebutkan nama seperti Movimiento Bolivia Libre-organisasi *indigenous* dataran rendah, CIDOB, Bolivia (1997), dan Partido Sociedad Patriótica-Pachakutik, Ekuador (2002).

Kedua, gerakan dan partai *indigenous* menyokong kandidat dari kalangan "Kiri". Pilihan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak ada kandidat mumpuni yang bisa diusung oleh kalangan *indigenous* sendiri. Karenanya mereka bersama kalangan "Kiri" mempromosikan kandidat dari sayap "Kiri" untuk berlaga dalam politik elektoral atau pemilu dengan harapan kandidat tersebut bisa merepresentasikan kepentingan dan aspirasi mereka. Misalnya kita melihatnya dalam berbagai gerakan *indigenous* yang mendukung kandidat dari PRD, Meksiko (akhir 1980an hingga 1990an). Kemudian lainnya, Pachakutik mengusung Freddy Ehlers (1996, 1998) dan Rafael Correa (2006) sebagai kandidat presiden di Ekuador.

Ketiga, partai-partai "Kiri" memasukkan atau melibatkan gerakan *indigenous* dalam daftar kandidat atau caleg. Sebelum 1995, partai-partai "Kiri" biasanya menempatkan individu-individu *indigenous* tersebut dalam daftar nomer sepatu. Akibatnya, jarang sekali, jika tidak mau disebutkan tidak mungkin, mereka yang kemudian terpilih sebagai anggota parlemen. Namun setelah 1990an, popularitas kalangan *indigenous* terus menguat, dan karenanya tidak mengherankan apabila partai-partai "Kiri" mulai memperhitungkan keberadaan mereka dan mulai memasukan beberapa dari mereka dalam daftar nomer jadi. Bahkan

ada yang mengajak individu-individu *indigenous* untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi jagoan mereka. Sebut saja misalnya ADM-19 di Kolombia mengajak pimpinan kalangan *indigenous*, Jesús Piñacuè, menjadi kandidat wakil presiden (1994). Demikian juga MBL di Bolivia mengusung tokoh *indigenous*, Marcio Fabricano sebagai calon wakil presiden. Adapun partai-partai "Kiri" yang terlibat antara lain seperti Izquierda Democrática-CONAIE, Partido Socialista-Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Ekuador (1980an hingga saat ini); PRD di Meksiko (1980an hingga saat ini); dan Movimiento Bolivia Libre, sejumlah organisasi, Bolivia (1990an).

Yang terakhir, keempat, partai-partai "Kiri" membentuk aliansi partai atau subunit kelompok *indigenous* yang merupakan bagian dari mereka. Dalam kenyataannya di wilayah Amerika Latin merupakan hal yang biasa elit-elit partai "Kiri" membentuk partai-partai *indigenous* "bawahan" (*underbow*) mereka. Kita bisa menyebutkan misalnya Partai Peronis di Argentina, yang bisa masuk kategori partai "Kiri", maka kita bisa menemukan agrupaciones, yang merupakan organisasi *indigenous*, sebagai subunit atau "bawahan" dari partai Peronis.

Penutup

Apa yang digambarkan di atas, pada dasarnya lebih merujuk pada tipologi relasi kekuasaan antara kalangan "Kiri" dan kelompok masyarakat *indigenous* di wilayah Amerika Latin. Dalam kenyataannya tentu akan sangat berkaitan dengan dinamika politik yang pasang-surut, dan konteks tempat dan waktu. Namun demikian, kebangkitan "Kiri" di wilayah Amerika Latin dalam 10 terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari muncul dan berkembangnya organisasi gerakan *indigenous* di berbagai wilayah.

Meskipun demikian kita pun tidak serta merta bisa menyimpulkan

bahwa kalangan *indigenous* memiliki kapasitas dan kekuatan yang besar, apalagi jika sudah beraliansi dengan kalangan "Kiri" di Amerika Latin. Dalam catatan sejarah, baik kalangan "Kiri" maupun kelompok *indigenous*, memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar dalam mempengaruhi atau bahkan menentukan kebijakan politik di tingkat nasional. Ini disebabkan karena mereka sendiri secara internal memang sangat terfragmentasi atau terpolarisasi, atau juga karena tata ekonomi internasional yang seringkali tidak berpihak pada mereka. Tapi ceritanya akan menjadi lain sama sekali apabila mereka mampu menguasai sumber daya alam yang akan menempatkan mereka sebagai kekuatan regional. Di sini kita akan menyebutkan orang seperti Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), dan Rafael Correa (Ekuador) yang mampu menggunakan sumber daya alam mereka sebagai kekuatan politik yang ampuh, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hector Schamis dalam *Journal of Democracy*, mencirikan mereka sebagai "petro-left". Sebaliknya, kalangan "Kiri" sendiri biasanya lebih memiliki pengaruh di tingkat lokal. Model yang dikembangkan Partai Buruh (PT) dengan *Participatory Budget* di Porto Alegre adalah salah satu eksperimen politik "Kiri" yang menarik, dan ternyata memang sukses dan direplikasi di banyak wilayah Amerika Latin maupun negara-negara lain di dunia.

Akhirnya, kita harus menyadari bahwa berbagai upaya untuk mempromosikan demokrasi yang lebih bermakna (substansial) memang tidak boleh berhenti pada sekedar prosedural. Banyak jalan ke Roma, dan pengalaman Amerika Latin memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu memikirkan perjuangan yang benar-benar sejati, yakni adanya kontrol masyarakat atas urusan-urusan publik dengan basis kesetaraan politik. Itu esensi demokrasi yang bermakna [nis].

Daftar Pustaka

- Korovkin, Tanya, "Indigenous Movements in Central Andes: Community, Class, and Ethnic Politics," *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 1 (2), 2006
- Madrid, Raúl L, "Critical Debates: Indigenous Parties and Democracy in Latin America", *Latin American Politics and Society*, tanpa nomer dan tahun.
- Rosengren, Dan, "Indigenous Peoples of the Andean Countries: Cultural and Political Aspects", A Study Commissioned by SIDA, April 2002.
- Schamis, Hector, "Populism, Socialism, and Democratic Institutions", *Journal of Democracy* 17 (October), 2006.
- Van Cott, Donna Lee, "Indigenous People and the Left in Latin America: Diverse Forms of Linkage, Diverse Implications", workshop on the Left Turn in Latin America, May 25-27, 2007, University of British Columbia/Simon Fraser University, British Columbia.
- , "Indigenous Parties, Mayoral Leadership and Institutional Innovation in the Andes", paper presented at the 65th Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, Illinois, 12-15 April 2007



BELAJAR DARI ARGENTINA

IVAN A HADAR*)



Dalam Pilpres terakhir, Oktober 2007, Christina Fernandez de Kirchner terpilih sebagai presiden baru Argentina menggantikan suaminya, Nestor Kirchner. Sejumlah pengamat mengatakan, Christina Kirchner akan

diuji, seberapa jauh ia dapat mengatasi inflasi dan kriminalitas yang tinggi serta investasi asing yang rendah. "Ia menghadapi tantangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan periode suaminya," kata Michael Shifter, pengamat Amerika Latin di *The Dialogue*, lembaga kajian di Washington. Saat menjabat presiden, Nestor Kirchner berupaya memulihkan krisis keuangan parah di

Argentina, dengan berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 8 persen per tahun.

Meskipun demikian, seperempat dari 37 juta rakyat Argentina masih hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 9 persen

dari rakyat Argentina kini pengangguran. Apapun, semua pengamat sepakat, bahwa Argentina sedang keluar dari keterpurukan. Semoga cerita sukses Argentina keluar dari keterpurukan ekonomi ini, bisa menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Nestor Kirchner, Argentina berhasil pulih dari keadaan pahit ekonomi yang mengacaukan kehidupan rakyat selama dua dekade. Kebangkitan ekonomi terjadi sejak 2001, justru setelah Argentina "mengusir" IMF dan merangkul Venezuela.

Bank Dunia pernah menyebut dekade 1980-an sebagai dekade yang hilang bagi Amerika Latin dan Argentina. Kini Argentina, yang berpenduduk 40 juta jiwa, memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 212 miliar dollar AS dan pendapatan per kapita 6.500 dollar AS. Keberhasilan Argentina didorong oleh keberanian menolak pembayaran utang ke kreditor internasional. Argentina juga menolak resep ekonomi IMF, yang dituding telah gagal total di semua wilayah Amerika Latin. Investor dan IMF mengucilkan Argentina. Namun,



<http://capital-federalenbuenosaires.com>

Bangsa ini telah banyak kehilangan, baik kehilangan pulau maupun harga diri. Janganlah ramalan UNICEF tentang generasi yang hilang menjadi kenyataan. Belajarlah dari Argentina.

Presiden Venezuela Huga Chavez menolong Argentina dengan membeli obligasi Pemerintah Argentina. Dana dari Venezuela berperan membantu Kirchner mengatasi persoalan ekonomi. Bagaimana dengan kita?

Pada 2005, dari selisih kewajiban finansial dan asset yang dimiliki, terdapat minus sebesar Rp 515 triliun. Dengan demikian, rasio utang Indonesia terhadap total asset, terbilang sangat besar yaitu 161 persen. Saat ini, kondisi tersebut belum jauh berubah. Anehnya, pemerintah terkesan adem-ayem. Direktur Informasi dan Akuntansi Departemen Keuangan, misalnya, mengatakan bangsa Indonesia tidak perlu pesimistis. Ironisnya, argumentasi untuk tetap optimistis itu lewat perbandingan utang Indonesia dengan negara-negara superkaya seperti AS dan Jepang. Tak heran, banyak yang mempertanyakan *sense of crisis* dari penguasa negeri ini.

Beda dengan apa yang dilakukan pemerintah Argentina. Pada Maret 2005, dengan raut wajah berseri, Kirchner mengumumkan kepada seluruh rakyat Argentina keberhasilan pemerintah

mengurangi utang luar negerinya. Buah dari perundingan *alot* selama tiga tahun. Dari segi jumlah, pengurangan utang Argentina ini, terbesar sepanjang sejarah.

Meski coba diboikot oleh IMF dan lembaga keuangan swasta, mayoritas pemegang obligasi (*bondholders*) swasta, akhirnya menyetujui tawaran Argentina untuk melakukan restrukturisasi utang sebesar 130 miliar dollar AS. Dari jumlah tersebut, hanya sepertiga yang harus harus dibayar Argentina. Itu pun, dalam tempo 40 tahun. Ternyata, berbeda dengan kecemasan petinggi Indonesia, pengurangan utang telah menaikkan peringkat kredit Argentina di pasar internasional. Para *bondholders* boleh berharap bahwa nilai surat utangnya pun akan meningkat berbarengan dengan perbaikan ekonomi negeri yang pernah dijuluki "Swis Amerika Selatan" ini. Sesuatu yang bukan mustahil melihat pertumbuhan ekonomi Argentina yang mencapai angka 8-9 persen pada dua tahun terakhir.

Kesepakatan ini, menurut Kirchner merupakan sebuah lompatan jauh

sekaligus "titik balik" bagi perekonomian Argentina. Sebuah hambatan besar, berhasil disingkirkan, meski "tantangan dan pergulatan baru sudah menunggu", lanjutnya berkaitan dengan rencana untuk kembali berunding dengan IMF. Sejak Agustus lalu, Argentina memang tidak lagi mengambil kredit baru untuk menghindari campur tangan IMF dalam restrukturisasi utang luar negerinya. Kini, setelah berhasil dalam langkah awalnya, Argentina kembali bernegosiasi dengan IMF dan para kreditor multilateral lainnya berkaitan dengan cicilan sisa utangnya.

Menteri Keuangan Argentina ketika itu, Roberto Lavagna, mengatakan total utang publik Argentina yang tadinya berjumlah 190 miliar Dollar AS (akhir Desember 2004), berkurang menjadi 125 miliar dollar AS atau sebanding dengan 72 persen pendapatan kotor nasional. Sementara beban utang, turun dari 10 miliar dollar AS menjadi 3,2 miliar dollar AS dari penghasilan ekspor.

Keunikan kasus Argentina tampak ketika akhir 2001 menyatakan bangkrut dan tak mampu membayar utang. Hal tersebut, sekaligus mengakhiri sebuah fase ekonomi politik yang

bertumpu pada privatisasi dengan dampak terjadinya akumulasi modal dan pendapatan pada sekelompok elit. Lebih dari itu, hal tersebut juga memunculkan perdebatan mendalam tentang model alternatif penyelesaian utang luar negeri. Pemerintahan Kirchner, memiliki posisi yang jelas dalam berunding dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, yaitu menselaraskan restrukturisasi utang dengan pertumbuhan ekonomi. Hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan sepanjang tahun 90an, ketika restrukturisasi diberlakukan bagi total jumlah utang yang sama serta beban pembayarannya yang melejitkan jumlah utang baru. Waktu itu, perundingan dilakukan untuk tahapan jangka pendek tanpa upaya membagi tanggung jawab negara pengutang dan kreditor.

Hal yang juga menarik, butir-butir perundingan yang alot dan mengundang konflik, utamanya bukan berkaitan dengan usulan jumlah pengurangan nilai surat utang (*bonds*), melainkan pada persyaratan (*conditionalities*) IMF dalam rencana pembangunan ekonomi Argentina. Pemerintah mengemukakan berbagai dampak buruk "Model" IMF seperti de-industrialisasi, kerusakan sebagian besar sentra dan alat produksi, melejitnya pengangguran dan kemiskinan.

Strategi restrukturisasi utang Argentina yang disodorkan Roberto Lavagna, meskipun disebut-sebut sebagai "paradigma baru", sebenarnya pragmatis dan memakai kaidah yang selama ini disepakati bersama. Ketika sebuah negara berada dalam kondisi nyaris bangkrut, demikian Lavagna, "paket pertolongan" IMF bisa dipakai untuk membayar para investor. Hal ini, mengacu pada pendapat mantan Menteri Keuangan AS Paul O'Neill, bahwa pengurangan utang harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, pemerintah dan investor.

Tak heran bahwa acuan "Model Argentina" bagi solusi krisis utang

global, ramai dibicarakan. New York Times, misalnya, mensinyalir bahwa "*Argentina's example may encourage other developing countries to act similarly*" (4/3/2005). Sebuah "pergolakan" yang diramal bakal berdampak besar bagi sistem keuangan internasional. Menurut Miguel Kiguel, salah seorang anggota "perunding utang" (*debt negotiator*) Argentina, restrukturisasi utang negerinya memperlihatkan bahwa dalam kasus kesulitan anggaran, "*sovereigns*" atau kemauan politik serta keuletan berunding sebuah bangsa menjadi semakin penting. Bahkan boleh jadi, yang terpenting. "Kini, aturan main telah berubah", tulis Larry Rohter (New York Times, 4/3/2005). Apakah Indonesia mau mengikuti aturan main baru ini?

Nampaknya tidak. Satu minggu setelah Argentina memperoleh keringanan signifikan utang luar negerinya, petinggi negeri ini, masih merasa "sangat berterima kasih" ketika negara-negara kaya anggota Paris Club hanya memberikan moratorium utang (penundaan pembayaran) pada tahun 2005 kepada Indonesia sebesar 2,6 miliar dollar AS. Selain penundaan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo tadi, bunga yang tidak dibayar selama 2005 akan direkap (*recapitalized*) dan ditambah menjadi utang pokok yang harus dibayar pada 2007 dan 2008.

Padahal, beban utang luar negeri kita yang mencapai lebih dari 134 miliar dollar AS, hanya sedikit menyisakan ruang bagi negara untuk melakukan pembangunan. Sebenarnya, dengan saldo yang menunjukkan angka minus Rp. 2.100 triliun seandainya Indonesia adalah sebuah perusahaan, maka perusahaan itu telah masuk dalam kategori bankrut. Kenyataannya, agar tetap bisa membayar kembali utangnya, pemerintah cukup lama "dipaksa" menjalankan "*Struktural Adjustment Program*" (SAP) godokan IMF. Artinya, nilai nominal cicilan utang, umumnya menjadi jauh lebih besar ketimbang

alokasi dana untuk pengurangan kemiskinan. Dampak program tersebut, tak jarang berupa trauma, kesengsaraan dan perusakan berbagai bidang kehidupan, tergusurnya petani gurem, penyunatan subsidi pendidikan, kesehatan dan tunjangan sosial. Dalam kaitan ini, UNICEF memperingatkan bahwa Indonesia bakal menghadapi kenyataan "generasi yang hilang" akibat kekurangan gizi dan buruknya kesehatan serta rendahnya pendidikan rakyatnya. Puluhan juta manusia di tanah air seakan dirampas kesempatannya memperbaiki hidup, karena pemerintah diharuskan mencicil utang luar negerinya.

Menurut hitung-hitungan kasar, setiap harinya, Indonesia harus menyisihkan 2,5-4 juta dollar AS, untuk membayar bunga utang kepada negara kreditor dan lembaga keuangan internasional, padahal - menurut ukuran garis kemiskinan di bawah 2 dollar AS per hari - lebih dari separuh rakyat negeri ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, rasanya siapa pun akan sepakat dengan suara kritis para aktivis dalam dan luar negeri yang semakin santer menganjurkan pengurangan utang. Tuntutannya, selama setiap hari puluhan ribu anak-anak di negara berkembang, mati kelaparan atau sakit serta sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan, uang mereka sebaiknya dipakai untuk membeli makanan, bukan untuk mencicil utang luar negerinya. Pemerintah pilihan rakyat, seharusnya lebih alot dalam berunding. Bangsa ini telah banyak kehilangan, baik kehilangan pulau maupun harga diri. Janganlah ramalan UNICEF tentang generasi yang hilang menjadi kenyataan. Belajarlah dari Argentina.

*) Koordinator Nasional Target MDGs (BAPPENAS/UNDP). Wakil Pemred Jurnal Sosdem.



SRITUA ARIEF:



www2.kompas.com

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN DEPENDENSI DI INDONESIA

Kebangkitan neososialisme di Amerika Latin sebagaimana telah disinggung dalam diskusi yang dimuat dalam jurnal edisi ini, salah satunya, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran strukturalis yang berkembang luas di kawasan tersebut. Dalam hal ini, kita dapat merujuk pemikir-pemikir ECLA sebagai perintis teori dependensi seperti Celso Furtado yang menerbitkan buku pada tahun 1968, *Economic Development of Latin America*. Kemudian, kita juga dapat merujuk pada para pemikir *marxis* yang juga turut mempengaruhi pemikiran ECLA seperti Fernando Cardoso dan Enzo Faletto yang menulis *Dependency and Development in Latin America* (1969). Buku karya Cardoso dan Faletto ini menjadi sebuah buku klasik teori dependensi (Fakih, 2003; Alvin Y So dan Suwarsono, 2006). Selain itu, kita juga masih mengenal Andre Gunde Frank yang bergabung dengan mazhab teori dependensi tahun 1960, dan menjadi motor perkembangan awal teori ini karena jasanya dalam memperkenalkan karya dependensi ke negara-negara

berbahasa Inggris. Mazhab teori dependensi juga tidak dapat dilepaskan dari para pemikir *neomarxis* Amerika Latin lainnya seperti Thetonio Dos Santos yang memperkenalkan konsep "*the new dependence*" dalam rangka menguraikan kesalahan kebijakan substitusi impor di negara-negara Amerika Latin. Masih banyak pemikir-pemikir lainnya yang turut mewarnai sejarah pemikiran kritis di Amerika Latin, dan menjadi banyak rujukan bagi analisis ekonomi politik kontemporer.

Keterkaitan antara sejarah pemikiran dan keberhasilan gerakan suatu bangsa barangkali memerlukan telaah lebih lanjut. Namun, sumbangan pemikiran tersebut dalam menginspirasi setiap gerakan tidak akan dapat dinafikan begitu saja. Dalam konteks inilah, pemikiran Sritua Arief utamanya dalam menjelaskan ketergantungan ekonomi Indonesia menjadi menarik. Setidaknya, ada dua alasan yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen ini. Pertama, tidak banyak pemikir yang menggunakan teori dependensi untuk menganalisis persoalan-persoalan

pembangunan di Indonesia, dan Sritua Arief menjadi salah satu pemikir diantara yang jumlahnya sedikit tersebut. Bahkan, ia dapat dikatakan menjadi ilmuwan sosial pertama yang dengan tegas menggunakan teori dependensi untuk menganalisis ketergantungan ekonomi Indonesia. Ilmuwan sosial lainnya yang menggunakan pendekatan dependensi untuk menganalisis pembangunan di Indonesia diantaranya adalah Mochtar Mas'oe'd (1989), Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1977, dan yang paling kontemporer adalah studi Syamsul Hadi (2008), Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia. Mochtar Mas'oe'd menggunakan pendekatan *Guillermo O'Donnell* untuk menjelaskan ekonomi politik Orde Baru pada awal pemerintahan, sedangkan Syamsul Hadi menawarkan otonomi relatif dalam upayanya untuk menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, yang dalam hal ini adalah Jepang.

Sejak kemunculannya, Orde Baru memang lebih pragmatis dalam mengambil kebijakan pembangunan. Dihadapkan pada "kebangkrutan" ekonomi Orde Lama, Orde Baru dihadapkan pada dua pilihan kebijakan (Mas'oe'd, 1989: 124), yakni melakukan pembangunan dengan mengandalkan modal dalam negeri yang langka atau menggunakan modal asing. Pilihan pertama memerlukan waktu yang cukup lama dan transformasi struktural yang mendalam, sedangkan pilihan kedua sebaliknya. Orde Baru akhirnya memilih opsi kedua. Maka selanjutnya diciptakanlah negara otoriter untuk mendukung usaha-usaha tersebut. Hasilnya, seperti dianalisis Sritua Arief, ketergantungan dan keterbelakangan.

Alasan kedua berhubungan dengan relevansi pendekatan dependensi dalam menganalisis ekonomi Indonesia. Tuduhan Sritua Arief atas keterbelakangan dan ketergantungan

di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pilihan-pilihan kebijakan pembangunan yang diambil oleh rejim, yang dalam hal ini adalah pendekatan ekonomi *orthodoks* atau neoklasik. Pilihan kebijakan ini menjadi sebab mengapa ekonomi Indonesia mengalami ketergantungan. Bahkan, lebih dari itu, struktur ekonomi Indonesia sangat eksploitatif dimana terjadi penghisapan ekonomi rakyat baik oleh modal asing ataupun oleh pemodal pribumi. Sritua Arief menyebut hubungan-hubungan ekonomi seperti ini sebagai suatu bentuk neokolonialisme baru. Ilustrasi di bawah ini barangkali akan memperjelas aliran-aliran surplus ekonomi Indonesia, dan bagaimana pada akhirnya struktur ekonomi yang eksploitatif tersebut gagal menciptakan kemakmuran bagi Indonesia.

Dengan berdasarkan pada data yang di-release IMF, Sritua Arief (2005: 70-71) menunjukkan bahwa selama periode 1973-1990 nilai kumulatif arus masuk investasi asing sebesar US\$ 5775 juta telah diiringi dengan nilai kumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri sebesar US\$ 58859 juta. Ini berarti, menurut Sritua Arief, telah diikuti dengan US\$ 10,19 *financial resources* yang keluar. Ini terjadi karena tingginya komponen sumber-sumber keuangan di dalam negeri yang telah digunakan untuk membiayai investasi asing. Sumber-sumber keuangan ini diperoleh baik dari cabang-cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia maupun dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks ini, menurut Sritua Arief, Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada jaman kolonial Belanda. Indonesia terus memasok surplus ekonomi yang setia pada pihak asing.

Sebagai seorang pemikir strukturalis, Sritua Arief dengan tegas menggugat model pembangunan liberalisme klasik yang sangat eksploitatif tersebut (1981).

Dalam pandangan neo-strukturalis, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang bersifat agraris dan mewarisi *cultural stelsel*, maka sektor pertanian harus menjadi pondasi pembangunan. Arah pembangunan adalah pengembangan pasar dalam negeri atau "permintaan efektif dalam negeri", dan bukan pasaran eksternal karena ekspor hanyalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh pertumbuhan dalam negeri. Oleh karena itu, transformasi ekonomi tidak boleh dipahami sebagai pergeseran struktural dari sektor pertanian ke industri, tetapi sebagai suatu proses yang mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian. (Arief, 1998:10-11). Dengan demikian, pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas ekspor dan bukan semata bergerak ke arah industrialisasi dengan meninggalkan basis pertanian. Jika ini terjadi, maka industrialisasi hanya akan menciptakan struktur ekonomi yang sangat eksploitatif.

Sebagai seorang yang concern terhadap ekonomi kerakyatan, pemikir seperti Sritua Arief tidaklah banyak jumlahnya. Setidaknya, yang menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan yang kemudian dapat dibaca luas oleh masyarakat sebagai sebuah wacana tanding atas aliran ekonomi mainstream, yakni liberal. Di Universitas Gadjah Mada, ada ilmuwan seperti Prof Mubyarto yang terus berupaya hingga akhirnya hayatnya mengembangkan konsep ekonomi Pancasila. Kritik ideologisnya terhadap ekonomi *mainstream* membuatnya dituduh "membawa ekonomi surga ke dunia" (Mubyarto, 2003). Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran Sritua Arief terutama analisisnya tentang Indonesia akan senantiasa menarik dan relevan.

Sritua Arief lahir di Stabat Sumatra Timur pada tanggal 25 Mei 1938. Ia mendapatkan gelar sarjana muda di bidang ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen Medan tahun

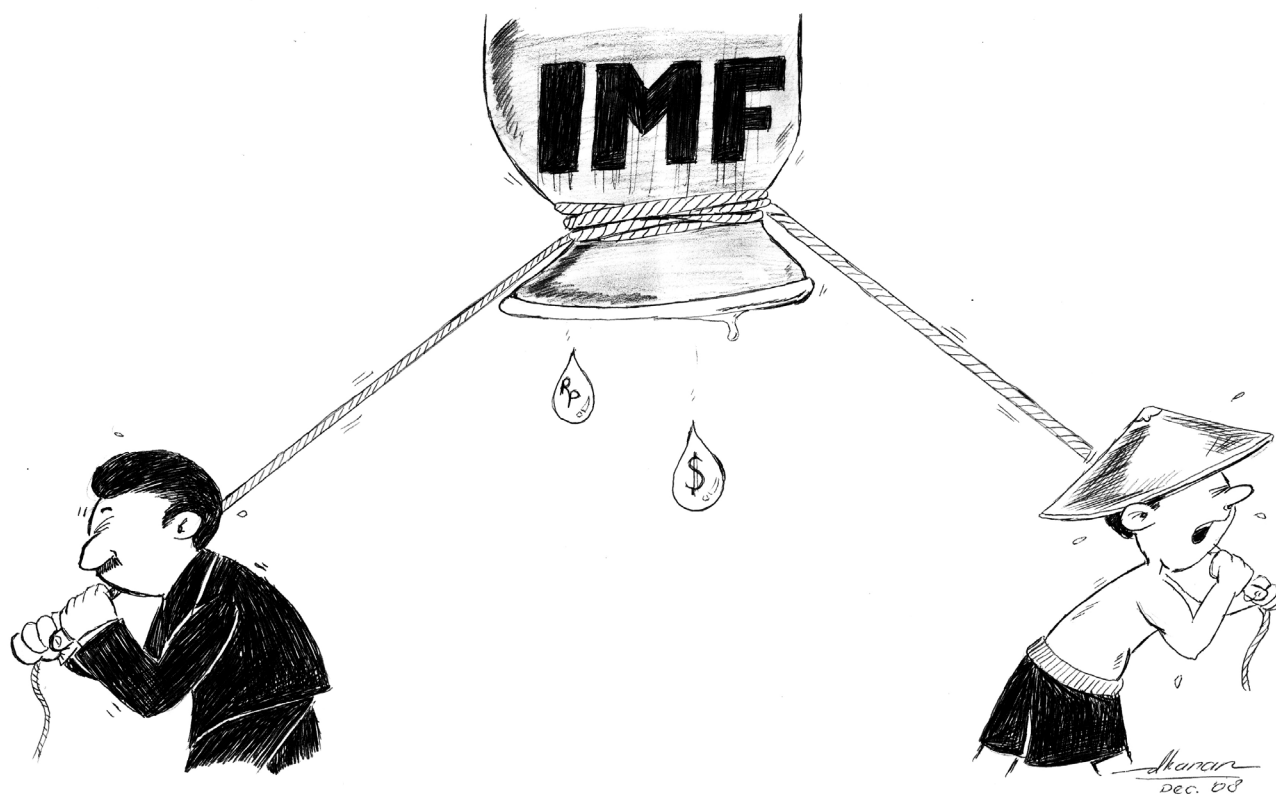
1960. Kemudian, mendapatkan gelar *Master of Business Administration* dari Cornell University AS tahun 1963, dan gelar Ph.D. dalam ilmu ekonomi dari University of Hull Inggris tahun 1979. Sebagai seorang akademisi, ia merupakan salah seorang pemikir yang cukup produktif dalam menulis. Banyak karya telah dipublikasikan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang pengajar dan konsultan dalam berbagai lembaga pemerintah. Tulisan-tulisan kritisnya tentang Indonesia dapat dilihat diantaranya adalah *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal* (1979); *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan* (ditulis bersama Adi Sasono) (1981); *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri, dan Ekonomi Indonesia* (1987); *Dari Pembangunan Sampai Ekonomi Politik* (1990); *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan*

Ekonomi (1993); *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Arus Globalisasi* (1998); *Teori Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan* (1998). Keseluruhan karya ini belum termasuk yang dipublikasikan di berbagai jurnal internasional. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (2002).

Pada tanggal 17 Desember 2002, Sritua Arief meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat *stroke* yang dideritanya sejak 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, karya dan pemikirannya akan tetap hidup dan menjadi bahan rujukan bagi banyak studi ekonomi politik pembangunan di Indonesia, utamanya studi-studi pembangunan yang menggunakan perspektif kritis.

Daftar Pustaka

- Arief, Sritua. 1998. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: CIDES
- Arif, Sritua. 2005. *Negeri Terjajah: Menyingkap Illusi Kemerdekaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist
- Hadi, Syamsul. 2008. *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia & Japan Foundation
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES
- Mubyarto. 2003. "Globalisme, Populisme, Dan Ekonomi Pancasila," Seminar Bulanan I PUSTEP-UGM, Yogyakarta 4 Februari 2003.
- Suwarsono dan Alvin Y. So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES



IVAN A. HADAR
Koordinator Nasional
TARGET MDGs,
UNDP/BAPPENAS;
Wakil Pemred Jurnal
Sosdem

PLURALITAS KELOMPOK KIRI AMERIKA LATIN

Umum disepakati, terdapat dua kecenderungan kiri di Amerika Latin. Di satu sisi, yaitu (pemerintahan) kiri yang dinilai "pragmatis", "rasional" dan "modern" yang terdapat di Cile, Brasilia dan Uruguay berhadapan dengan kiri yang "demagogis", "nasionalistis" dan "populistik" di Venezuela, Bolivia, Paraguay dan Argentina.

Namun, tak jarang, ada pula yang mengatakan terdapat kecenderungan yang lebih banyak, lebih rumit, karena tergantung pada lahan tempatnya bersemai. F.R. Gallegos (2008), misalnya, mengatakan bahwa kiri Amerika Latin diwarnai oleh warisan kelembagaan neo-liberalisme, pengaruh dan posisi gerakan sosial serta sejarah perkembangan parpol progresif di masing-masing negara tempatnya bertumbuh-kembang. Dengan demikian, terdapat lebih dari dua kecenderungan – meski semuanya memiliki kemauan yang sama, yaitu melawan agenda neo-liberal lewat penguatan negara dan perbaikan kondisi sosial.

Secara umum, disepakati bahwa sejak kemenangan Hugo Chavez di Venezuela (1998), dengan sedikit pengecualian (antara lain Meksiko dan Kolumbia), terjadi apa yang disebut "pergeseran ke kiri" di hampir semua Negara Amerika

Latin. Dalam diskusi – yang saya ikut, ketika diundang oleh Nueva Sociedad di Buenos Aires, Oktober 2008, meski topiknya adalah "pencarian alternatif pembiayaan pembangunan pasca krisis keuangan global" - isu ini pun menjadi bahasan yang pas dan sangat produktif.

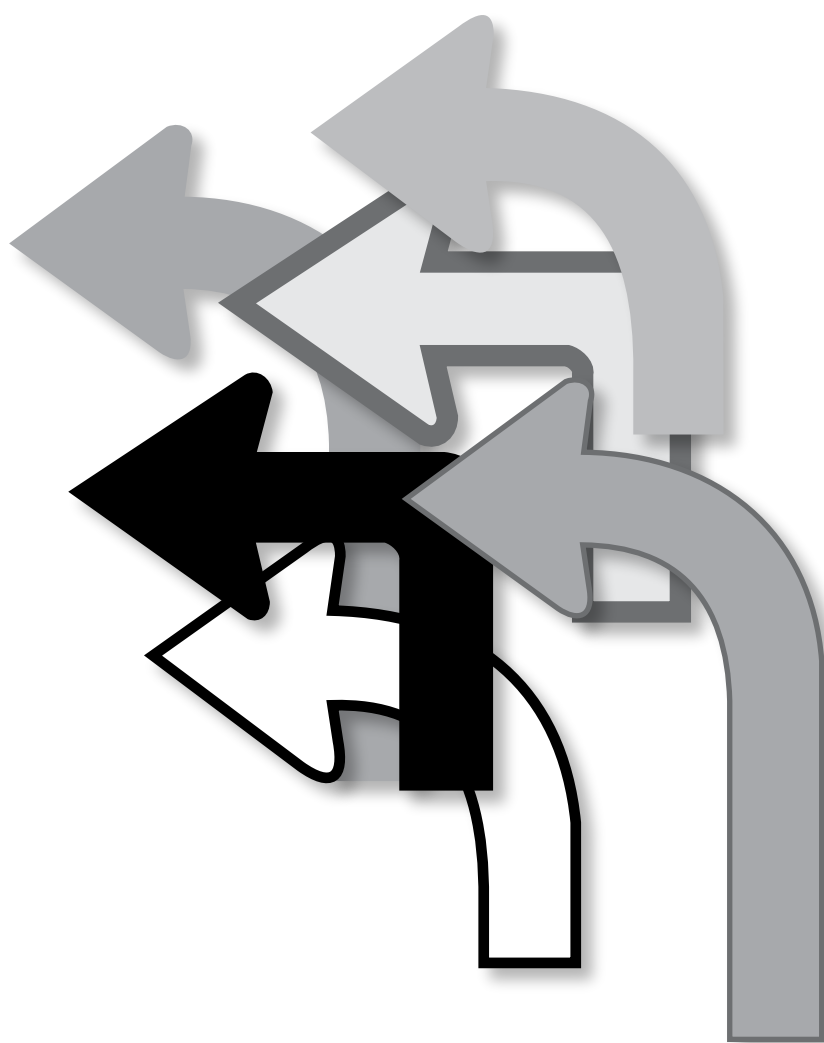
Referensinya sangat luas, terkait apakah "pergeseran ke kiri" ini cenderung seragam, ataukah terdapat dua jalan yang berbeda (kiri demokratis dan kiri populistis), atau bahkan lebih banyak lagi seperti yang diyakini Gallegos tadi. Yang pasti, semua ini menunjukkan, betapa berbedanya Amerika Latin dibandingkan referensi "hitam putih" Eropa tahun 1970an yang sekedar membagi kecenderungan progresif (sosialistis) atau reaksioner (sosial demokratis).

Teori Sosial Demokrasi (SosDem) Amerika Latin, sepenuhnya berbeda dengan Eropa. Kiri Amerika Latin, secara tradisional bersifat revolusioner, anti-kapitalistik dan (tak jarang) anti-demokratis. Ketika berkuasa dan berkesempatan merencanakan aturan main, yang kemudian dilakukan seringkali sepenuhnya mengubah sistem kapitalistik dan demokrasi burjoasi. Kata kunci seperti "Godesberg", "New Labor" atau "Pacto de Moncloa"

ketika SosDem menjadi lebih moderat dan membuka diri bagi kelas menengah, jarang terucapkan di Amerika Latin.

Hal ini, lebih dari sekedar pertanyaan politik dan akademis yang menarik. Berbagai pemerintahan kiri di Amerika Latin, nampaknya secara praksis berjalan tanpa ideologi dan tanpa teori. Praktek dan wacana politik, nampaknya tidak berjalan seiring. *Jurnal Nueva Sociedad* dalam edisi Khusus 2008, mengajukan judul "Seberapa Kiri, Kirinya Amerika Latin?", memuat berbagai tulisan yang mendiskusikan wacana dan langkah politik, atau latar belakang sejarah dan (gerakan) sosial yang menjadi penyebab "pergeseran ke kiri" di Latin Amerika. Hal yang terasa perlu untuk memahami perubahan paradigma dan mencari jawaban atas dua pertanyaan terpenting berikut: Bisakah kelompok kiri Latin Amerika memenuhi janjinya; dan bisakah hal tersebut berlaku langgeng?

Sepanjang 80an, Amerika Latin mengalami "Dekade yang Hilang" dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah, angka kemiskinan yang melejit, serta distribusi pendapatan terburuk di dunia. Setelah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan pada paruh pertama 90an di bawah "arahan dan kendali" Bank



Dunia dan IMF, kembali terjadi “5 tahun yang hilang” pada paruh kedua 90an. Penyebabnya, penyesuaian struktural neo-liberal (Konsensus Washington) tidak mampu menepati janji perbaikan. Sebaliknya, Argentina sebagai Negara “pajangan” reformasi neo-liberal saat itu, pada 2001 terjerembab dalam krisis yang sangat serius.

Akibatnya, para pemilih memberikan kartu merah bagi pemerintahan dan parpol tradisional dan memilih kandidat yang menyandang posisi kiri. Hugo Chavez, Evo Morales dan Rafael Correa, misalnya, mewakili kecenderungan tersebut. Sementara di Negara-negara dengan tradisi demokrasi termasuk memiliki parpol kiri yang cukup kuat (seperti di Brasilia, Cile, Argentina), terjadi perubahan paradigma secara ideologis dalam sistem politiknya.

Namun, perubahan apapun yang terjadi, yang tak kalah penting adalah seberapa besar “ruang gerak” yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan. Inilah salah satu alasan dari sikap pragmatis sebagian pemerintahan kiri Amerika Latin. Penjelasan lainnya, kelompok kiri Amerika Latin secara de facto mengalami “SosDem-isasi” untuk memenangkan suara kelas menengah. Dengan demikian, “pergeseran ke kiri” di Amerika Latin, pada saat yang sama juga bisa berarti “pergeseran ke kanan” kelompok kirinya menjadi SosDem.

Meskipun, secara detil, terdapat beragam wacana dan praktek politik pemerintahan di Amerika Latin, setidaknya terdapat tiga kecenderungan yang sama. Pertama, (semakin) aktifnya Negara dalam perekonomian. Kedua, Negara memprioritaskan kebijakan

sosial sebagai kebijakan pendistribusian kue pembangunan dan ketiga, terjadi diferensifikasi hubungan politik dan ekonomi luar negeri. Sementara itu, tak ada satupun yang mempertanyakan stabilitas moneter dan keuangan, aturan pasar bebas dan integrasi pasar dunia. Semua elemen Konsensus Washington tersebut, akibat pengalaman hiper-inflasi sepanjang 90an, diserap menjadi bagian penting kebijakan pemerintah.

Sepuluh tahun “pergeseran ke kiri” di Amerika Latin, telah menimbulkan perbaikan sosial-ekonomi yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan menurun dari 48% menjadi 36% total penduduk. Di Brasilia, 11 juta keluarga memperoleh tunjangan langsung berkat program “Bolsa Familia” – dari sebelumnya, yang “hanya” berjumlah 3,6 juta keluarga yang memperoleh manfaat tersebut pada tahun 2003. Di banyak Negara Amerika Latin, terjadi perbaikan dalam distribusi penghasilan rakyatnya.

Namun, semua ini bisa terjadi berbarengan dengan “export booms” yang berlangsung sejak 2003 selama 10 tahun. Hal tersebut, telah mempertebal isikis Negara. Meski, pada saat yang sama porsi pengeluaran sosial dibandingkan total pengeluaran, nyaris tidak atau hanya sedikit meningkat. Begitu pula dengan porsi pajak yang hanya 20% dan terbilang rendah dalam total anggaran. Sementara itu, di beberapa Negara, Brasilia misalnya, struktur pajaknya masih sangat *regresif*. Begitu pula banyak yang masih mensubsidi konsumsi kelas menengah sehingga melemahkan kemampuan investasi dalam sebuah Negara yang infrastruktur ekonominya masih terbilang lemah.

Terkait beberapa hal tadi, untuk pertamakalinya, SosDem di Amerika Latin memiliki kesempatan. Tinggal bagaimana kelompok “kiri tengah” ini memanfaatkan peluang tersebut.

**Buenos Aires/Jakarta, Oktober 2008/
Januari 2009**

SEJARAH

Pasca lengsernya Soeharto dan tumbanganya Orde Baru, bermunculan berbagai organisasi maupun perorangan yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai penganut ideologi sosial-demokrasi (SosDem). Meskipun demikian, sebagian besar dari organisasi maupun pribadi tersebut, bergerak nyaris tanpa menjalin kontak satu dengan lainnya. Bahkan ada kesan, setiap organisasi merasa diri sebagai yang “paling SosDem” dibandingkan lainnya.

Boleh jadi, hal tersebut disebabkan oleh jarang atau tidak pernah adanya upaya untuk mendiskusikan pandangan masing-masing tentang apa sosdem itu sendiri dan *platform* apa yang bisa disepakati untuk mempersatukan gerakan dengan ideologi yang sama ini. Penyebab lain dari kurangnya upaya pendekatan antara mereka yang berideologi SosDem adalah keterputusan sejarah perdebatan ideologi selama era Orde Baru.

Saat ini, gagasan-gagasan besar sebenarnya kembali memperoleh peluang untuk hadir pada pentas politik dan wacana di Indonesia. Sosialisme demokrasi adalah salah satunya. Sejarah perkembangannya serta pemetaannya di Indonesia diungkapkan dalam tulisan ini.

Sosialisme

Jauh sebelum lahirnya pemikiran Karl Marx (1818–1883), pemikiran untuk menghapuskan perbedaan antara miskin dan kaya, persamaan hak bagi semua manusia dan/atau penghapusan hak milik pribadi telah muncul sejak jaman pra industri. Antara lain pada pemikiran Budha, Perjanjian Baru dan Lama (terutama dalam isi “khotbah di bukit”), ordo gereja abad pertengahan, Platon, Morus dan Campanellas. Tetapi baru pada revolusi industri, sejak awal abad 19, gagasan sosialisme semakin menguat. Adalah para sosialis awal di Inggris dan Prancis yang mulai mengembangkan gagasan yang berlandaskan gambaran dan alasan etika tentang kehidupan yang bermartabat dalam sebuah tatanan masyarakat yang didamkan, tanpa menganalisa dengan tepat dan sistematis persyaratan sosial dan politiknya.

Mereka berkeyakinan, daya tarik pemikirannya akan mempengaruhi kelas yang berkuasa waktu itu, tanpa berupaya membentuk kekuatan politik. Karena itu mereka disebut kaum sosialis utopis. Horkheimer (1875 – 1973), menilai utopia sebagai “impian akan adanya tatanan kehidupan yang adil dan benar”.

Berbeda dengan pemikiran kaum sosialis awal tersebut, Karl Marx

SOSDEM

mencoba melakukan suatu analisa menyeluruh mengenai kapitalisme, terkait kemunculannya, perkembangan serta konflik yang menyertainya. Ia juga menganalisa dan memprognosa kehancuran kapitalisme, yang menurutnya sebagai suatu keharusan sejarah dan menamakan pemikirannya sebagai sosialisme ilmiah. Berbeda dengan kaum sosialis awal, Marx mengembangkan strategi politik untuk pengorganisasian kelas buruh serta perjuangan kelas mereka dalam menentang kapitalisme melalui revolusi. Selanjutnya, membentuk sistem sosialis dan berlanjut menjadi sistem komunis yang tidak mengenal kelas. Pemikiran Marx banyak dipengaruhi oleh Aufklärung Eropa (yang percaya pada kemajuan dan akal budi), gagasan radikal-demokratis revolusi Prancis tahun 1789, pemikiran sosialisme awal dan pemikiran ekonom klasik dari Inggris (Adam Smith, Malthus dan David Ricardo) serta perdebatannya dengan para filosof idealisme (Kant, Fichte dan terutama Hegel). Di bawah pengaruh berbagai macam pemikiran ini, Karl Marx dan Friedrich Engels (1820–1895) mengembangkan ajaran-ajarannya yang meliputi dialektika dan historisme materialisme serta politik ekonomi.

Berbeda dengan anjuran Marx,

Ferdinand Lassalle (1825–1864), yang mendirikan “Allgemeine Deutsche Arbeiterverein”, partai sosialis pertama di Jerman (1863), yang memilih jalan damai menuju sosialisme. Menurutnya, dijaminnya hak memilih dapat mengantar buruh dan partainya memiliki mayoritas suara di parlemen dan negara kapitalis melalui reformasi UU secara bertahap, untuk berubah menjadi sosialis. Ia mengusulkan agar buruh bersatu dan bernaung dalam “asosiasi produktif” (koperasi), sehingga mereka menjadi pemilik usaha sendiri dan menerima sepenuhnya hasil dari kegiatan usahanya.

Yang lebih tegas lagi adalah Eduard Bernstein (1850–1932) yang menolak pemikiran Marx dengan melakukan pertimbangan kritis dan melakukan revisi terhadap *marxisme* berdasarkan persyaratan historis yang mengalami perubahan (revisionisme). Istilah ini pertama kali muncul di kalangan sosial demokrat Jerman tahun 1891. Dalam tulisannya “*Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie*” tahun 1899 (Persyaratan Sosialisme dan Tugas-tugas Sosialdemokrasi), ia menolak pendapat Marx tentang hukum sejarah yang meramalkan hancurnya kapitalisme dan keharusan revolusi untuk mewujudkan

sosialisme dan menentang strategi perjuangan kelas yang militan dan revolusioner yang dijalankan gerakan buruh Jerman waktu itu.

Ia kemudian mengusulkan kerja sama Partai Sosial Demokrat (SPD) Jerman dengan kekuatan-kekuatan demokratis lainnya serta secara bertahap menciptakan tatanan sosialis melalui jalan parlementer yang damai, melalui reformasi politik, sosial dan ekonomi. Pemikiran Bernstein terutama dipengaruhi oleh pemikiran *Fabian Society*, yang didirikan tahun 1884 dan memiliki pengaruh besar dalam gerakan buruh di Inggris. Kelompok ini juga menentang *Marxisme* yang revolusioner dan menginginkan sosialisasi ekonomi secara bertahap, evolusi dan tanpa kekerasan serta perubahan negara dan masyarakat ke arah tatanan sosialis.

Reaksi terhadap revisionisme ini, terutama muncul dari Lenin yang menolak teori Bernstein. Sejak itu partai komunis uni soviet menentang revisionisme yang mereka sebut sebagai penyimpangan ke arah kanan terhadap ajaran marxisme-leninisme. Perbedaan pandangan mengenai konsep dan jalan menuju sosialisme telah menyebabkan terjadinya pemisahan gerakan buruh sosialis ke dalam faksi sosial demokrat dan faksi komunis yang mendukung

marxisme dan *leninisme* dan menjadi kebijakan politik partai-partai sosialis di negeri-negeri mereka selama Perang Dunia Pertama (1914–1918). Himpunan Sosialis Internasional yang merupakan organisasi sentral partai-partai sosialis sedunia mengalami perpecahan, ketika masing-masing partai sosialis mendukung negerinya sendiri selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama.

Setelah Lenin memenangkan revolusi Oktober, kaum bolsyewik Rusia mengganti nama partai mereka menjadi partai komunis tahun 1918 untuk membedakan diri mereka dari kaum sosialis demokrat. Di sisi lain kaum sosialis di Jerman dalam upayanya menunjukkan perbedaan pokok mereka dengan partai komunis, menamakan diri mereka sosialis demokrat. Kedua kubu ini masing-masing tetap mempergunakan *marxisme* untuk memperkuat pendirian mereka. Adalah hal yang keliru menyamakan *marxisme* dengan Kkmunisme dan Sosialis Demokratis dengan anti *marxisme*. Kenyataannya keduanya merupakan cabang dari *marxisme* yang memiliki perbedaan tajam dalam masalah pokok. Sosialisisme Demokratis memakai unsur demokratis dari *marxisme*. Sedangkan *marxisme-leninisme* mengambil sifat "ilmiah" dari *marxisme* sebagai argumen yang membenarkan "kediktatoran proletariat" yang meninggalkan demokrasi.

Sosialisisme Demokrasi

Sosialisisme Demokrasi merupakan arah partai yang menghubungkan prinsip-prinsip sosialisisme dengan demokrasi. Yang termasuk sosialisisme demokrasi adalah partai-partai politik dengan program yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Meskipun demikian, ada tiga persamaan berikut. Pertama, bertujuan membangun tatanan negara, ekonomi dan sosial yang bebas dan sosialis. Kedua, mendukung perubahan melalui reformasi untuk mencapai tujuan

politik. Sosialisisme Demokrasi memakai cara-cara legal dan demokrasi parlementer. Untuk mengubah dan mengatasi sistem kapitalisme dilakukan reformasi di bidang politik, sosial dan ekonomi. Sosialisisme Demokrasi secara prinsip berbeda dengan ideologi dan program Sosialisisme Revolusioner atau komunisme dan partai-partai komunis, yang menghendaki sosialisisme melalui jalan revolusi di bawah pimpinan diktatur proletariat. Ketiga, sikap demokratis. Sosialisisme Demokrasi menganut sistem kekuasaan berdasarkan demokrasi perwakilan dan aktif memperjuangkan negara hukum yang demokratis dan bebas, dan menolak segala macam bentuk diktatur. Karenanya mereka bekerja sama dengan partai-partai yang demokratis.

Partai-partai di Eropa yang sekarang berasaskan SosDem hampir semuanya lahir pada paruh ketiga abad 19 dan biasanya bernama partai sosialis demokrat, partai sosialis atau partai buruh. Naiknya *fasisisme* sejak tahun 1933 di bawah Hitler telah memporakporandakan dan mengorbankan ribuan kaum Sosialis Demokrat dan buruh di Jerman. Baru setelah Perang Dunia Kedua, Sosialis Demokrat kembali tampil dan bersama-sama dengan demokrat Kristen dan liberal membentuk konstitusi Jerman yang baru dengan memberikan kontribusinya dalam membentuk "negara sosial" yang berarti mewajibkan negara menegakkan tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Jalan damai yang ditempuh Sosialis Demokrat telah membuka peluang kelompok ini meraih kekuasaan melalui jalan parlementer dengan mengikuti pemilihan umum di masing-masing negeri.

Perubahan cepat setelah perang dunia kedua mendorong mereka mengubah program partai untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan dengan demikian dapat menambah suara pada pemilu. Di Jerman kaum Sosialis Demokrat melalui Program *Godesberg* tahun

1959 melakukan perubahan secara mendasar dengan tujuan utamanya, yaitu tidak lagi menggantikan sistem kapitalisme dengan sistem sosialisisme dan menerima sistem ekonomi pasar sebagai hal yang tidak terelakkan. Nilai-nilai dasar Sosialisisme Demokrat yang meliputi kebebasan, keadilan dan solidaritas masuk ke dalam program politik dan ekonomi. Keadilan berarti kesempatan sama bagi penentuan nasib sendiri untuk semua orang. Solidaritas menuntut tiap individu menggunakan kebebasannya sebagai abdi masyarakat. *Orientierungsrahmen '85* dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) memberikan batasan yang lebih tepat tentang nilai-nilai fundamental sosialisisme demokratis, agar dapat dibedakan dari demokrat Kristen dan liberal yang menggunakan istilah yang sama.

Dalam bidang ekonomi, terutama antara tahun 60 sampai 70-an, berlangsung kemakmuran ekonomi dan semakin terintegrasinya buruh ke dalam sistem kapitalisme. Buruh tidak lagi menjadi kelas yang berseberangan dengan pemilik modal, tetapi mereka menjadi satu kesatuan dalam proses produksi dengan diterapkannya hak turut menentukan pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Upah yang tinggi serta jaminan sosial yang luas dan kesempatan buruh untuk menikmati pendidikan lanjut selama bekerja merupakan bagian dari sistem ekonomi pasar, yang di Jerman lebih dikenal sebagai sistem Ekonomi Pasar Sosial (*Soziale Marktwirtschaft*). Peran negara menjadi sedemikian besar untuk melakukan intervensi dan memberikan subsidi bagi kelompok yang memerlukannya. Setelah terjadinya krisis minyak bumi dan kenaikan inflasi yang meningkatkan angka pengangguran, secara perlahan peran negara semakin berkurang. Ketika tahun 80-an kelompok konservatif mengambil alih kekuasaan di negara-negara industri, kebijakan ekonomi yang sebelumnya berorientasi pada sisi permintaan dengan anggaran

defisit negara menurut anjuran Keynes, bergerak ke sisi penawaran, yaitu lebih kepada kepentingan industri dan semakin mengecilnya peran negara.

Masa kemakmuran di negara-negara kesejahteraan (*welfare state*) mengalami penurunan. Hampir semua bentuk subsidi yang dianggap memberatkan pengeluaran negara dan meningkatkan inflasi dihapuskan. Kini pendulum kekuasaan bergeser ke arah kepentingan industri yang semakin membesar dan meluas sampai ke tingkat dunia. Negara tidak lagi memiliki kekuasaan dan kekuatan mengontrol industri dan gerak modal yang bergerak cepat ke seluruh dunia, tetapi berada di bawah dikte kepentingan modal. Era globalisasi (neo-liberal) menyadarkan banyak pemikir di kalangan SosDem untuk mengkaji ulang peran negara yang semakin terbatas dan memikirkan bentuk kerja sama dan pengelolaan regional atau global yang dapat mengontrol kembali peran kekuatan pasar/modal.

Pemetaan Sosialisme di Indonesia

Berikut, pemetaan sederhana terhadap kelompok-kelompok atau gerakan yang mengklaim diri sosialis, atau setidaknya lewat ide-ide yang ditawarkan lekat dengan jargon-jargon sosialisme. Jargon sosialisme, yang dimaksud adalah keinginan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam penikmatan dan akses terhadap hasil-hasil produksi dan sumber-sumber produksi. Memang bisa saja, klaim itu tak jelas. Artinya, dari segi pengorganisasian dan ideologi tidak khas dan tidak mengikuti pakem gerakan sosialisme. Tapi efek yang diciptakan, serta musuh yang dihajar adalah sama dengan musuh kaum sosialis. Juga, jangan dilupakan, alternatif solusi yang diusung sangat menguntungkan bagi perkembangan sosialisme demokrat. Tambahan lagi, nilai-nilai universal yang relevan dengan sosialisme, yaitu *equality*, *fairness*, *egalitarianisme*, dan keadilan (*justice*), menjadi anutan kelompok-kelompok

itu.

Setidaknya, ada empat kategori. Pertama, adalah kelompok sosialisme demokratis yang berkiblat ke barat, terutama Eropa. Ide dan pembelajaran sosialisme didapatkan saat

pendukungnya mendapatkan gembelangan dan studi di negara-negara seperti Belanda, Perancis dan Jerman. Ini terutama melanda aktivis di era pergerakan kemerdekaan dengan tokoh-tokohnya yang sangat fenomenal. Seperti Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan HOS Tjokroaminoto. Mereka membuat organisasi-organisasi sendiri dan melakukan perlawanan bawah tanah terhadap pemerintahan kolonialis. Di periode lanjutannya, mereka turut berjasa dalam melahirkan partai-partai sosialis di Indonesia, seperti PSI. Dalam arus yang sama, kita juga bisa menyebut Sneeveld dengan ISDV (*Indische Socialistische Democratische Vereniging*), yang kemudian mewarnai arah gerakan SI (Sjarikat Islam), dan menjadikan SI merah (komunis) dan SI putih. Intinya, mereka menyerap dan ingin menerapkan ide-ide sosialisme yang mereka dapat dan pelajari di Eropa.

Kedua, gerakan-gerakan sosialisme yang bernuansa religius. Tokohnya, yang terkenal adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoto dengan gerakan Sjarikat Islamnya. Ide ini sebetulnya punya argumentasi menarik. Dalam khasanah keagamaan di Nusantara, nilai-nilai keadilan, buruh, orang miskin, kaum tertindas lumayan populer. Dalam Islam maupun Kristen, soal-soal kemanusiaan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengabdian dan ibadah sosial mereka.

Ketiga, kaum sosialis yang benar-benar menyandarkan diri pada kekayaan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat adat kita. Gerakan seperti ini memang lahir belakangan. Mereka percaya bahwa masyarakat kita memiliki kearifan dan kebijakan sendiri dalam mengelola alam, hidup, dan mengatur hubungan-hubungan sosial mereka.

Dalam terminologi mutakhir, dikenal istilah *local genius*, dan *indigenous knowledge*.

Gerakan terakhir berfokus pada perjuangan untuk kepentingan hak-hak masyarakat adat yang tertindas. Musuh mereka sama, yaitu kapitalisme dan kekuatan modal. Keempat, adalah apa yang disebut sebagai Kiri Hijau, misalnya apa yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Bandung. Mereka melihat ketidakadilan dalam penguasaan tanah, hutan, kebun milik para petani yang dirampas oleh negara (sebagai agen kapitalis). Mereka melakukan pendokumentasian terhadap Sistem Hutan Kerakyatan (SHK). Contoh lain adalah gerakan-gerakan yang dilakukan kawan-kawan Plasma di Kalimantan Timur.

Secara umum, dua kelompok pertama menyandarkan diri pada pemikiran-pemikiran Marx, Engels, dan tokoh-tokoh intelektual kiri lainnya. Sementara dua terakhir, lebih mengakar, punya pijakan, dan nampaknya terlibat serius dalam persoalan-persoalan riil di tingkat akar rumput. Untuk mudahnya, dua kelompok pertama disebut sebagai Sosialisme Eksplisit (lantaran terbuka, ideologis, dan punya pakem jelas). Sementara dua yang terakhir sebagai kelompok Sosialisme Implisit.

Keseluruhan kelompok itu tak harus bergerak dalam arus yang sama. George Aditjondro menganalogikannya sebagai arus aliran sungai yang deras, yang terdiri dari arus di permukaan dan arus di bawah permukaan, namun mereka mengalir ke arah yang sama. Kalau ada sinergi dari berbagai kekuatan itu, maka mereka menjadi tantangan yang konkrit terhadap perjalanan kapitalisme. Paling tidak, seperti yang dikatakan oleh Anne Gunder Frank, sinergi itu akan menjadi *first barrier* (rintangan utama) bagi perkembangan kapitalisme.

Sekali lagi, meski beda dalam bentuk organisasi dan simbol-simbol yang mereka anut, namun kesemuanya menganut kepercayaan bahwa harus

ada distribusi yang adil terhadap asset dan penikmatan produksi. Di sisi lain, juga harus ada keadilan, kebersamaan, kesederajatan, komunalitas, dan equality. Jadi ada semacam Common Denominator yang bisa menyatukan gerak langkah dalam mencapai tujuan bersama dalam kelompok-kelompok yang sangat berbeda-beda itu. Agar mengarah pada terciptanya sistem yang memungkinkan terjadinya pemerataan terhadap hasil-hasil produksi.

Di sini tidak dilakukan pemisahan mana yang paling murni dari gerakan sosialis yang berkembang di Indonesia. Dalam spektrum ideologis, posisinya sangat jelas. Mereka yang cenderung kepada *profit*, individualisme, modal, dan akumulasi kapital berposisi sebagai kapitalis, sementara mereka yang memilih komunalisme, *equality*, *egaliter*, dan pemerataan hasil-hasil produksi, maka kiblatnya adalah sosialisme.

Kalau misalnya ada penggabungan antara sosialisme eksplisit dan sosialisme implicit, maka ada beberapa varian yang bisa dilihat. Misalnya, kesamaan dalam melihat adanya "*dominant discourse*" dan siapa yang menjadi "*oppression discourse*".

Juga terlihat dalam agenda organisasi dan partai ada tiga dominasi dalam mengeset isu, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosialis. Yaitu terjadinya "*kota centris*", "*manufacturing-centris*", dan "*java-centris*". Gerakan-gerakan kaum sosialis terlalu melihat Jawa sebagai pusat aktivitas dan kegiatan. Jarang sekali yang mau terlibat dalam advokasi dan pendampingan masyarakat lokal yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan Maluku.

Sementara itu sektor yang kerap menjadi garapan kaum sosialis, rata-rata mengarah pada buruh yang bekerja pada *sector manufactur* dan fabrikasi. Inipun juga terjadi di lingkungan industrial di Jawa. Jarang yang melakukan pendampingan dan memusatkan perhatian pada buruh pemetik teh, buruh kebun kelapa sawit,

buruh HPH, nelayan, buruh karet, buruh pertambangan, buruh pertambangan, dan buruh-buruh lainnya. Padahal, penderitaan para buruh di sektor-sektor tersebut tak kurang menyedihkannya dibanding buruh di sektor industri fabrikasi.

Apa yang dilakukan kawan-kawan KPA di Bandung bisa dilihat sebagai bagian dari Kiri Hijau yang melakukan penggedoran dalam advokasi, kampanye dan gerakan mereka. Mereka keluar dari bias *Java-Centris*, *Manufacturing-Centris*, dan *Kota-Centris*. Mereka mendampingi para korban di perkebunan HPH, mendampingi para masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak agraria mereka, mendampingi petani, buruh kebun dan lain sebagainya.

KPA bergerak selain dengan mengusung isu penyelamatan hutan, dengan mengkampanyekan sistem hutan kerakyatan (SHK), juga melakukan delegitimasi terhadap kebijakan HPH yang sangat merugikan. Begitu juga dengan kawan-kawan di plasma, yang melakukan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat di Kalimantan. Nah apa yang dilakukan oleh Kawan-Kawan KPA dan Plasma ini adalah bagian dari gerakan Sosialisme Implisit.

Lantas, ada juga mereka yang melakukan gerakan sosialisme *implicit* dengan pendekatan religius. Misalnya, beberapa pesantren yang mengusahakan sistem pengelolaan tanah pertanian secara bersamaan. Di Bali, Gusti Gedong Oka, penganut Ghandisme dan Ashramisme, melakukan gerakan-gerakan yang memiliki ciri sosialisme religius. Sampai di sini, saatnya melihat apa yang menjadi tantangan dari gerakan sosialisme di Indonesia. Tantangan paling nyata untuk saat ini adalah *statement sweeping* terhadap kelompok-kelompok kiri yang ingin melaksanakan reformasi secara total. Kita melihat berbagai spanduk, posko anti komunis dan pernyataan-pernyataan para elit politik di media *massa*. Tapi justru saat ini perbincangan

tentang sosialisme, komunisme, revisionisme, *stalinisme*, dan *marxisme* menjadi relevan. Kita harus menjelaskan kepada publik apa yang menjadi pembeda dari aliran-aliran ideologis itu.

Tantangan kedua yang juga mesti dihadapi adalah kelemahan analisis kaum sosialis di tanah air terhadap apa yang menjadi "*mode of production*" di Indonesia. Jarang yang mampu memetakan persoalan *mode of production* ini secara tepat. Kalau di Jawa, *mode of production*nya barangkali adalah industrial *manufacturing*. Sementara di Kalimantan, persoalannya sangat berbeda, mereka melakukan pengusahaan terhadap hutan, laut, dan sungai dengan *mode of production* seperti model dalam komunisme purba.

Ivan Hadar
Koordinator Nasional Target MDGs
(Bappenas/UNDP), Wakil Pemimpin
Redaksi Jurnal Sosdem

Tulisan ini adalah ringkasan dari studi 'Gerakan Sosial Demokrasi Di Indonesia' yang dilakukan oleh Ivan Hadar/Suchjar Effendi/Indah Nuritasai/Fadjoel Rachman; IDE/FES – Mei 2001. Terkait Sejarah Sosialisme Demokrasi, bahannya ditulis oleh Suchjar Effendi; sedangkan Pemetaan SosDem di Indonesia, bahannya berasal dari diskusi terbatas dengan narasumber George Aditjondro. M.Hokheimer, *Anfaenge der buergerliche Geschichtsphilosophie*, 1930, dalam Reinhart Beck, *Sachwoerterbuch der Politik*, KroenerVerlag, Stuttgart 1977.



Resensi

Kebebasan, Negara, dan Pembangunan di Mata Arief Budiman

Judul Buku : Kebebasan, Negara, Pembangunan
Penulis : Arief Budiman
Penerbit : Kerjasama Pustaka Alvabet dan Freedom Institute
Cetakan : Pertama, Agustus 2006
Tebal : xiii + 446 halaman

Meminjam istilah Dr. Ali Syari'ati, ilmuwan sosial sekaligus seorang mujjahid, pejuang kemanusiaan asal Iran (yang meninggal secara tragis, di bunuh oleh Savak, polisi rahasia rezim Reza Pahlevi yang despotik-otoriter), di setiap jaman kebebasan akan selalu menjadi arena taruhan dari jenis-jenis manusia—seperti dilambangkan Al-Qur'an—yang berwatak Fir'aun, Haman, Qarun, dan Bal'am. Fir'aun adalah simbol penguasa yang korup, penindas dan selalu merasa benar sendiri; sebuah rezim yang menjadi tonggak kedzaliman dan kemusyrikan. Haman adalah prototip yang mewakili entitas teknokrat, ilmuwan, dan umumnya kaum intelektual yang menopang tirani dengan melacurkan ilmu. Qorun adalah cermin kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus menghisap seluruh sumber daya ekonomi rakyat. Bal'am melambangkan kaum rohaniawan, tokoh-tokoh agama, yang menggunakan agama untuk melegitimasi kekuasaan yang korup dan meninabobokan rakyat. Menurut Syari'ati, pada setiap jaman keempat jenis manusia ini akan selalu tampil sebagai pendukung status quo dan penentang perubahan sosial (Ali Syari'ati, Ideologi

Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1989).

Namun, lanjut Syari'ati, di setiap jaman juga akan selalu tampil kaum Rausyanfikir, pemikir yang tercerahkan, yang siap mengorbankan dan mengabdikan dirinya untuk melawan rezim-rezim yang membela status-quo. Arief Budiman—dalam batasan tertentu—mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori Rausyanfikir, karena sebagai ilmuwan, Arief tidak hanya memotret dan menyodorkan realitas pada kita, namun ia juga mengajak kita untuk bersikap kritis dalam terus berkhidmat menemukan kebenaran. Ilmuwan sejati, meminjam perspektif Edward Shils dalam Cendekiawan dan Politik (LP3ES, 1984), bukanlah individu atau sekelompok begawan yang hidup di atas menara gading, yang netral dan tidak berpihak. Bagi Shils, cendekiawan secara moral-intelektual harus berpihak. Atas dasar profesinya, setiap intelektual punya tanggung jawab sosial untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Sebagai intelektual-aktivis, Arief Budiman sadar akan tanggung jawab itu. Sejak masih mahasiswa di Fakultas Sastera UI, ia sudah melakukan berbagai kritik dan demonstrasi atas pemerintahan

Soeharto yang kebijakannya nyata telah keluar dari kepentingan rakyat. Arief, yang dilahirkan dari sebuah keluarga minoritas Cina, pernah mengalami masa-masa pahit menghadapi diskriminasi, dan merasakan perihnya memperjuangkan kebebasan di zaman otoritarianisme Soeharto (1965-1998). Pengembaraan intelektual dan pergulatannya dalam dunia aktivis mahasiswa memberi sketsa nyata pada pembentukan kepribadian Arief, dan tentu memberi kesadaran paripurna akan pentingnya memperjuangkan kebebasan manusia di negeri ini sebagai persoalan krusial bangsa. Setelah menjadi ilmuwan, Arief adalah sosok yang tak pernah surut menicita-citakan hadirnya kebebasan di negeri ini

Kompilasi Pemikiran

Buku karyanya ini, merupakan serpihan-serpihan pemikiran yang berhasil dihimpun dari tulisan-tulisan Arief antara tahun 1965 sampai 2005 yang terserak dalam berbagai ragam tulisan, mulai dari makalahnya, pengantar buku, dan berbagai artikelnya yang telah dimuat di sejumlah media massa. Fokus tulisan ini terbatas pada pandangan-pandangan Arief pada persoalan sosial-ekonomi-politik yang berkisar pada hubungan negara dan masyarakat; jadi hanya beberapa esai yang relevan saja yang akan disoroti. Tidak salah, jika buku ini mengompilasi sejumlah tema yang luas, bahkan tak saling terkait. Buku ini ditulis hadir dalam konteks waktu yang tetap aktual, yakni terus berlangsungnya

krisis kebebasan, gugatan atas eksistensi dan peran negara, serta kritik atas ideologi dan model pembangunan yang dipilih Indonesia, yang hingga kini tak mampu memberi kemandirian pada negara dan mensejahterakan kehidupan mayoritas rakyatnya.

Kendati mengangkat tema beragam, buku ini masih bisa dibaca sebagai sebuah kaledoskop pemikiran kritis Arief Budiman. Karena garis besar buku ini masih tak jauh dari tiga tema besar yang selama ini jadi perhatiannya; kebebasan, negara, dan pembangunan.

Mungkin kalau pun ada kelemahan, dapat dikata buku ini tidak lagi memiliki kontekstualisasi untuk sekarang ini. Walau begitu, kerangka “teori struktural” yang dijadikan pijakan Arief tetap menjadi semacam kunci yang bisa dijadikan alat dalam mengamati negeri ini sampai detik ini. Di antara tema yang diangkat, antara lain adalah masalah politik, filsafat, sosial, budaya, seni dan psikologi. Bisa dimaklumi kalau kemudian tulisan dalam buku ini tidak membangun konfigurasi pemikiran Arief secara utuh sebagaimana dalam buku Arief yang lain; *Negara dan Pembangunan* (1991) *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (1997) dan *Teori Pembangunan Negara Ketiga* (1995).

Negara, Pembangunan, dan Kemiskinan

Sejak awal, isu negara dan pembangunan telah menarik minat banyak ilmuwan sosial di berbagai negara untuk menganalisis relasi antara negara dan masyarakat dalam kerangka modernisasi ekonomi dan politik, terutama relasi negara dan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Relasi negara dan pembangunan sebagai dua institusi penting dalam memahami proses modernisasi di negara-negara pascakolonial memang menjadi topik bahasan hangat para intelektual Barat sejak awal abad ke-20. Interaksi antara negara dan pembangunan telah melahirkan

sebuah konsep dan praktik kehidupan baru dalam tata relasi masyarakat global yang dikenal sebagai modernisasi. Problemnya, di Indonesia—terutama pada masa Orde Baru—kata pembangunan telah menjadi kosa kata ajaib yang mampu menihilkan berbagai hal. Atas nama pembangunan, kritik dan oposisi dianggap ancaman, partisipasi luas masyarakat dianggap halangan, pertemuan ilmiah, rapat politik, dan forum akademis yang kritis terhadap kebijakan pembangunan dianggap sebagai perlawanan,

Begitu pun dengan Arief Budiman, sebagai ilmuwan sosial ia mulai tertarik terhadap teori-teori negara dan teori-teori pembangunan sejak awal tahun 1970, saat ia masih menjadi mahasiswa program doktor di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Bertolak dari perspektif teori struktural, kakak kandung Soe Hok Gie ini mencita-citakan “kebebasan” manusia dalam bangunan masyarakat madani (*civil society*) ketika ia berhadapan dengan kekuasaan negara. Dalam konsep ini, Ketua Program Indonesia pada Melbourne University, Australia ini melihat masyarakat madani akan menjadi *balance* karena hal itu berperan sebagai mitra yang kritis. Dengan teori struktural itu pula, ia lantas mengkritisi pola pembangunan Indonesia dalam kaitannya dengan proyek pengentasan kemiskinan. Ia tidak setuju dengan pendekatan universal yang didengungkan oleh pendukung teori modernisasi yang melihat akar masalah kemiskinan Dunia Ketiga disebabkan karena ketertinggalan sebagai faktor *inheren* dalam negara itu sendiri, sehingga jawaban yang tepat adalah memodernisasi negara yang bersangkutan.

Menurut Arief, akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan pada negara maju, campur tangan dari luar (negara-negara kapitalis) sehingga kemudian “menghalangi” kemajuan negara berkembang. Dengan perspektif itu, Arief lantas mengajukan

pendekatan lain karena setiap negara itu, menurutnya, memiliki keunikan sendiri dan ciri khas yang tidak bisa digebyah-uyah atau disamakan.

Dalam konteks eksistensi dan peran negara, Arief juga menyampaikan berbagai pandangannya tentang lembaga yang bernama negara. Pertama, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Bahkan, kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya. Kedua, kekuasaan yang sangat besar dari negara ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.

Menurut Arief, ideologi “negara netral” dan berdiri di atas semua golongan (*Weberian*) inilah yang hingga kini masih menjadi pandangan dominan di Indonesia, baik di kalangan pejabat negara maupun di kalangan masyarakat sipil. Kalau pun negara ternyata tidak berpihak pada kepentingan umum, hal ini dianggap sebagai kasus abnormal. Yang harus diperbaiki. Padahal, bisa saja negara yang “menyeleweng”, dimana keberpihakan negara pada satu kelompok tertentu justru dianggap normal.

Karakter “pemikiran kritis” Arief bisa dikatakan memiliki konsistensi yang kokoh dalam mengemukakan argumentasi dan bahkan teguh dalam memegang prinsip. Sebagai ilmuwan sosial, ia berperan besar mengenalkan teori struktural ini setelah dia pulang studi dari Harvard. Sebelum itu ia lebih konsens menggulirkan isu seputar seni-budaya, sosial-politik dan psikologi.

Pertengahan tahun 1980-an, ia bahkan sempat menggulirkan isu tentang polemik sastra kontekstual.

Konsep yang digelindingkan ini sebagai bentuk penolakan terhadap universalisme sastra yang menilai setiap orang memiliki "citra rasa" yang sama dalam mengapresiasi sastra. Padahal setiap orang, daerah dan zaman, menurutnya, punya nilai-nilai sendiri yang tidak bisa disamakan. Karena itu, sastra universal, baginya, kehilangan arti dan tidak lagi menjadi patokan umum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, pada dasarnya ada dua jalan bagi pengelolaan sistem perekonomian negara. Jalan pertama adalah sistem perekonomian di mana faktor-faktor produksi, baik dalam pengertian tradisional—tanah, tenaga kerja, dan modal, maupun dalam berbagai varian modernnya dewasa ini—berada dalam penguasaan bebas setiap individu. Jalan kedua adalah sistem perekonomian di mana faktor-faktor tersebut berada dalam penguasaan otoritas negara, atau birokrat perencanaan sentral. Jalan pertama adalah sistem ekonomi pasar, yang oleh Karl Marx dengan tepat dinamakan kapitalisme. Jalan kedua adalah sosialisme, atau komunisme.

Bertumpu pada antipatinya yang mendalam terhadap kapitalisme dan, sebaliknya, pengagungannya yang berlimpah terhadap sosialisme, Arief Budiman dengan 'kuas' tebalnya menyapukan pandangan kritisnya terhadap berbagai konsep dan fenomena pembangunan di negeri ini. Arief meyakini bahwa "pembangunan" pada hakekatnya adalah upaya menempatkan kelas mana yang harus dikedepankan, sekalipun dengan kemungkinan terjadinya benturan dengan kelompok kepentingan lain. Baginya, kebebasan individu bukanlah suatu pilihan dan tidak perlu diagungkan, sebab "Ideologi yang mengatakan bahwa kebebasan individu lebih penting daripada keadilan sosial (dalam kebebasan individu termasuk juga

kebebasan untuk menumpuk kekayaan meskipun masyarakat tersebut hidup dalam keadaan yang serba kurang) tentu saja sangat menguntungkan kaum *elite*..." (halaman 44).

Bagi Arief, Indonesia adalah negara berkembang yang melakukan transformasi modernisasinya dengan jalur kapitalisme. Ia menyimpulkan (halaman 46): "Jelas, sistem demokrasi tidak bisa hidup lebih lama lagi kalau kapitalisme mau dipertahankan." Dalam artikelnya, "Negara-Negara Dunia Ketiga dan Sistem Kapitalisme", Arief mengutip Albert Hirschman (halaman 45), dan bergabung menjadi ilmuwan yang membuat setiap individu harus merasa bersalah karena menjadi kaya, sebab "sistem ekonomi kapitalis ini bekerja dengan cepat sehingga segolongan orang jadi kaya dengan cepat, segolongan lainnya jadi miskin. ... Tapi setelah beberapa saat ternyata bahwa orang-orang miskin ini tidak kebagian maju, sementara orang-orang kaya terus maju, maka mulailah timbul ketidaksabaran..."

Mengambil jalur pekonomian pasar adalah sebuah kesalahan, menurut Arief, sebab Sayangnya, kompetisi bebas ini tidaklah dimulai dari awal, di mana tiap orang mulai dengan modal yang sama. Dalam keadaan seperti ini, sudah jelas bahwa mereka yang memiliki alat-alat produksi akan jadi semakin kaya, karena dari produksi yang dihasilkan, sebagian besar keuntungan akan pergi ke kantong pemilik modal..." (halaman 44).

Dengan demikian, asumsi dan konsekuensinya menjelas: bagi Arief, sosialisme *Marxis* merupakan jalan keluar yang mutlak. Menurutny,"Karl Marx telah meramalkan bahwa pada suatu hari nanti, akibat persaingan antara kaum pemilik kapital sendiri yang saling memakan sesama rekannya, kaum miskin yang semakin banyak jumlahnya bakal sadar akan kepincangan yang terjadi di masyarakat tersebut dan akan bersatu untuk menghancurkan kaum kapitalis. [...] Tetapi revolusi ini tidak

kunjung terjadi. Yang dilupakan Marx adalah bahwa salah satu kekuatan sistem kapitalis adalah satu kesanggupannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukan memperbaiki secara total, melainkan secara parsial..." (halaman 42-43)

Pencarian Sistem Alternatif

Lepas dari konsistensi dan sikap kritis Arief Budiman yang perlu kita apresiasi atas karyanya ini, kita belum melihat tawaran-tawaran alternatif dari Arief tentang bagaimana peta jalan bagi penyelesaian problem kebebasan, negara, dan pembangunan di Indonesia. Sebagai usulan, barangkali kita perlu menukik ke isu yang lebih spesifik, seperti ideologi atau sistem ekonomi apa yang cocok bagi Indonesia, sehingga arah kebebasan dan target pembangunan bisa sungguh-sungguh menjawab persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Tawaran alternatif ini barangkali merupakan refleksi menarik dalam upaya mencari sistem ekonomi nasional yang lebih sesuai dengan semangat konstitusi, suatu sistem ekonomi yang pro-rakyat. Sebab pencarian sistem ekonomi ini sejalan dengan kian menguatnya gerakan anti kapitalisme-neoliberal dalam dua dekade terakhir. Para aktivis anti globalisasi kini tak lagi cukup berteriak "*ganyang* neoliberalisme". Mereka harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: adakah sistem ekonomi alternatif di luar mekanisme pasar? Mungkinkah membiayai pembangunan tanpa utang luar negeri? Bisakah perbankan nasional dibuat sehat tanpa skema IMF? Mungkinkah memperkuat struktur keuangan BUMN tanpa privatisasi? Adakah peluang bagi eksistensi ekonomi rakyat?

Di era globalisasi dan integrasi pasar saat ini, paling tidak terdapat empat pemain penting penggerak ekonomi global. Dua kelompok pertama adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan multinasional (MNC's).

Sementara dua kelompok terakhir adalah modal keuangan dan tenaga kerja. Se jauh ini yang paling besar mengambil manfaat dari arus globalisasi adalah modal keuangan global yang dikelola korporasi-korporasi multinasional. Kini pertumbuhan modal 500 perusahaan multinasional di dunia mencapai tujuh kali lipat dari 721 miliar dolar AS pada tahun 1971 menjadi 5,2 triliun dolar AS pada tahun 1991. Pada tahun 2005, modal keuangan global diprediksi telah berkembang menjadi 50,2 triliun dolar AS.

Secara historis, terdapat sejumlah alternatif mekanisme ekonomi di luar sistem kapitalisme-neoliberal. Pertama, adalah sistem sosialisme. Ide dasar sistem ini menempatkan proses produksi dan pemasaran hasil produksi di bawah kontrol kelas pekerja. Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya menjual tenaganya, tapi juga menguasai dan mengontrol hasil kerjanya. Saat ini, sistem ekonomi sosialis masih beroperasi secara terorganisir di Kuba. Tetapi secara umum, pascaruntuhnya Uni Soviet, sistem ekonomi sosialis telah dianggap sebagai moda ekonomi masa lalu.

Kedua, sistem ekonomi nasionalistik. Kendati tidak secara tegas menolak kapitalisme, secara ideologis sistem ini berwatak anti modal asing. Sekelompok akademisi menyebut sistem ini sebagai "etatisme", istilah lain dari kapitalisme negara. Blue print sistem ini adalah pembangunan ekonomi nasional wajib dibimbing, dikawal, dan difasilitasi negara agar tidak terjungkir ke dalam persaingan pasar bebas.

Tetapi, dimata kaum neoliberal, sistem ini dipandang sebagai handicap kemajuan ekonomi. Rigiditas ekonomi—yang menjadi konsekuensi model nasionalisme ekonomi—dianggap sebagai biang keladi krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Timur dan Tenggara pada medio 1990-an lalu. Campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi menjadi penyebab darisuburnya korupsi dan perilaku moral-

hazard. Korea Selatan masa kediktatoran militer, Taiwan masa Chiang Kai Shek, dan Iran di bawah rejim Mullah adalah prototipe sistem ekonomi bercorak nasionalistik. Dalam batasan yang lebih ketat, model ekonomi Soviet dan Cina saat ini bisa dimasukkan dalam kategori ini.

Ketiga, sistem ekonomi berwatak populis. Dalam sistem ini, pemerintah yang berkuasa memberi prioritas pada sektor usaha kecil dan menengah dalam negeri. Tetapi, berbeda dengan sistem nasionalistik, sistem ekonomi populistik juga memberi ruang yang relatif luas bagi serikat pekerja dan serikat tani untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi negara. Argentina di masa Peronisme adalah prototipe sistem ini. Saat ini, sistem ekonomi Venezuela di bawah Hugo Chavez—atau Bolivia di bawah Evo Morales—dianggap banyak pakar tengah berjalan menuju ke arah sistem ekonomi ini.

Keempat, sistem ekonomi negara kesejahteraan (*welfare state*). Asumsi yang mendasari model ini adalah, pasar kapitalis—dengan logika maksimasi *profit*-nya—tak mungkin bisa menjawab kebutuhan yang berbau sosial, seperti pendidikan dan kesehatan gratis atau jaminan sosial bagi rakyat miskin. Sementara negara dianggap sebagai institusi yang wajib menyejahterakan dan melayani publik. Negeri-negeri di kawasan Skandinavia (seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia) adalah *prototipe* negara yang hingga kini masih konsisten menerapkan model *welfare state*.

Lalu, sistem apa yang bisa dipakai sebagai alternatif di luar kapitalisme-neoliberal di Indonesia? Bung Karno pernah menawarkan Marhaenisme sebagai model ekonomi sosialis ala Indonesia, dengan prinsip "berdikari"-nya. Sementara Bung Hatta juga pernah menawarkan ide ekonomi gotong-royong atau sistem koperasi yang dianggapnya lebih sesuai dengan ciri khas ekonomi masyarakat Indonesia. Secara konseptual, kedua ide *the*

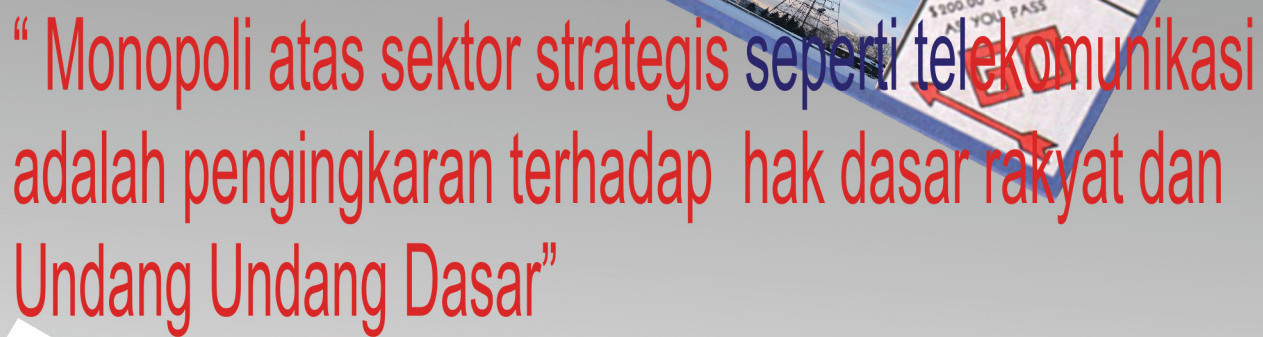
founding fathers itu lebih mengarah ke prinsip populisme ketimbang sosialisme atau nasionalisme ekonomi.

Masalahnya, kedua ide sistem ekonomi itu bisa dibilang layu sebelum berkembang. Marhaenisme diganti oleh model *rent-capitalism*-nya Orde Baru, sementara ide koperasi Bung Hatta—yang terbungkus dalam varian ekonomi Pancasila—dipakai sebatas mata pelajaran di sekolah. Di luar kedua ide itu, belum ada gagasan *genuine* yang bisa memberi ruang bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Lalu, masih adakah peluang bagi tampilnya gagasan ekonomi alternatif yang pro-rakyat di negeri ini?

Kita berharap, di masa yang akan datang Arief Budiman bisa melahirkan karya-karya yang lebih solutif bagi penyelesaian berbagai problem kebebasan, isu-isu pembangunan, dan peran negara; yang dalam kasus Indonesia hingga kini masih bertabrakan dengan tujuan-tujuan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

Masalahnya sekarang, apakah para elite, politisi, dan birokrat di negeri ini punya keberpihakan ideologis untuk menyelesaikan berbagai problem bangsa? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan negara untuk memberantas kemiskinan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan-kejahatan negara lainnya secara radikal? Jika negara tak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalam memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi, maka keterpurukan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi di negeri ini. ***

Launa, adalah Redaktur Jurnal Demokrasi Sosial, Project Officer pada Asian Labor Network on International Financial Institution (ALNI) Indonesia, dan peneliti pada Institute for Community Empowering and Development (INSTEAD).



Dipersembahkan oleh
Jurnal Sosial Demokrasi



Memperjuangkan Demokrasi untuk kepentingan rakyat bukanlah sekedar "*keperluan sejarah*" tetapi juga karena "*tuntutan moral*"

